Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI & APPTI
Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031-8288598; 8280009 ext.109
Fax. 031-8288598
Email unipress@unesa.ac.id

ISBN : 978-602-449-284-7
978-602-449-284-7

Rr. Nanik Setyowati, dkk

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN POLITIK GLOBAL

Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS

HUBUNGAN INTERNASIONAL & POLITIK GLOBAL

Buku Ajar

Rr. Nanik Setyowati
Maya Mustika Kartikasari
Siti Maizul Habibah

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN POLITIK GLOBAL

Penulis

Rr. NANIK SETYOWATI
MAYA MUSTIKA KARTIKASARI
SITI MAIZUL HABIBAH

Penerbit
Unesa University Press

HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN POLITIK GLOBAL

Diterbitkan Oleh
UNESA UNIVERSITY PRESS
Anggota IKAPI No. 060/JTI/97
Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015
Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109
Fax. 031 – 8288598
Email : unipress@unesa.ac.id
unipressunesa@yahoo.com

xi,168 hal., Illus, 15.5 x 23

ISBN : 978-602-449-284-7

copyright © 2018 Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint, microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho- Nya penulis dapat menyelesaikan buku ini. Buku yang berjudul " Hubungan Internasional dan Politik Global" ini merupakan buku dengan pembahasan tentang Hubungan Internasional dan Politik Global yang meliputi Pengantar, Tatanan Internasional,Organisasi Internasional, Interaksi Sistem Internasional, Politik Luar Negeri RI, Pola Kekuatan Dunia, Ekonomi Internasional, Dinamika dalam Sistem Internasional, Kekuatan Negara dan Polarisasi Kekuatan Dunia.

Buku ini dipergunakan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa S1 PPKn Jurusan PMP-KN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Unesa Surabaya dan pemerhati Hubungan Internasional dan Politik Global lainnya. Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan dalam buku ini. Hal ini akan menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan perbaikan dan revisi di kesempatan mendatang. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk kesemmpurnaan isi buku ini. Penulis berharap buku ini bias bermanfaat bagi para mahasiswa dan pembaca.

Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu terselesaikannya buku ini

Surabaya, November 2017
Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**
Kata Pengantar ..... **iii**
Daftar Isi ..... **v**
Tinjauan Matakuliah HI dan Politik Global ..... **ix**

BAB I PENGANTAR **1**
A. Hubungan Internasional ditinjau dari Perspektif Sejarah dan Ilmu 1
B. Pengertian Hubungan Internasional 3
C. Tiga Asas Hubungan International 4
D. Subjek Hubungan Internasional 4
E. Objek Hubungan Internasional 5
F. Peranan Hubungan Internasional 5
G. Macam-macam Hubungan Internasional 5
H. Organ Pelaksana Hubungan Internasional 6
I. Rangkuman 16
J. Latihan dan Tugas 17

BAB II TATANAN INTERNASIONAL **18**
A. Perang dan Damai dalam HI 18
B. Diplomasi dan Hukum Internasional dalam mewujudkan International Order 22
C. Rangkuman 34
D. Latihan dan Tugas 35

BAB III ORGANISASI INTERNASIONAL **36**
A. Pengertian Lembaga/Organisasi Internasional 37
B. Tinjauan Sejarah Lembaga/Organisasi Internasional 38
C. Perserikatan Bangsa-Bangsa 40
D. Badan-badan Utama PBB 45
E. Organisasi-Organisasi Antar pemerintahan di bawah PBB 51
F. Organisasi-Organisasi Non pemerintah 53

G. Organisasi - Organisasi Kawasan 54
H. Rangkuman 58
I. Latihan dan Tugas 59

BAB IV INTERAKSI INTERNASIONAL DALAM POLITIK INTERNASIONAL 60
A. Politik Internasional sebagai Kajian Utama Hubungan Internasional 60
B. Negara Sebagai Aktor Utama Dalam Politik Internasional 64
C. *Setting* Interaksi Internasional 67
D. Pola Hubungan dalam Interaksi Politik Internasional 67
E. Rangkuman 69
F. Latihan dan Tugas 70

BAB V TINJAUAN TENTANG POLITIK DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI 71
A. Pola Determinan Politik Luar Negeri 71
B. Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri 80
C. Contoh Kasus : Normalisasi hubungan RI dan RRC 84
D. Rangkuman 87
E. Latihan dan Tugas 87

BAB VI KEKUATAN NEGARA DAN POLARISASI KEKUATAN DUNIA 89
A. Kekuatan Nasional 89
B. Polarisasi Kekuatan Dunia 93
C. Rangkuman 112
D. Latihan dan Tugas 112

BAB VII EKONOMI INTERNASIONAL 114
A. Interdependensi Ekonomi Global 115
B. Sistem Moneter Internasional (SMI) 117
C. Institusi Ekonomi Internasional 122
D. Rangkuman 127
E. Latihan dan Tugas 128

BAB VIII DINAMIKA DALAM SISTEM INTERNASIONAL 129
A. Globalisme 129
B. Regionalisme 132
C. Konflik Etnis 136
D. Rangkuman 140
E. Latihan dan Tugas 140

BAB IX INDONESIA DALAM POLITIK DUNIA 142
A. Lahirnya Politik Luar Negeri yang Bebas-Aktif 144
B. Konsepsi Politik Luar Negeri RI 147
C. Rangkuman 162
D. Latihan dan Tugas 163

GLOSARIUM 164

DAFTAR PUSTAKA 166

TINJAUAN MATAKULIAH HI DAN POLITIK GLOBAL

1. Standar Kompetensi

Mahasiswa memiliki kemampuan mendeskripsikan hakikat hubungan internasional dengan segenap aspeknya melalui politik luar negeri, kebijakan luar negeri dan misi diplomatik, serta mengkaji berbagai masalah dan pola interaksi politik internasional dalam kerangka sistem politik internasional.

2. Kompetensi Dasar

a. Menjelaskan bidang kajian dan konsep-konsep dasar dari ilmu Hubungan Internasional
b. Mendeskripsikan konsep perang dan damai dalam hubungan internasional
c. Menjelaskan bidang kajian dan konsep-konsep dasar dari ilmu Hubungtan Internasional
d. Menjelaskan mekanisme interaksi dalam politik internasional
e. Menganalisis hubungan politik luar negeri dan kebijakan luar negeri.
f. Menjelaskan kekuatan negara dan polarisasi kekuatan dunia.
g. Mendeskripsikan konsep ekonomi internasional
h. Mendeskripsikan konsep dinamika dalam sistem internasional
i. Menjelaskan politik luar negeri Republik Indonesia dalam perpolitikan dunia

3. Indikator

a. Mendeskripsikan sejarah timbulnya HI
b. Menjelaskan pengertian HI
c. Mendeskripsikan aktor utama dalam HI
d. Menjelaskan tiga asas dalam HI
e. Mengidentifikasi konsep perang dan damai dalam hubungan internasional

f. Mendeskripsikan peran Diplomasi dan Hukum Internasional dalam mewujudkan *International Order***.**
g. Menjelaskan pengertian Lembaga/Organisasi Internasional
h. Menjelaskan tinjauan Sejarah Lembaga/Organisasi Internasional :
i. Mendeskripsikan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa
j. Mendeskripsikan mekanisme politik internasional.
k. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi interaksi politik internasional
l. Menjelaskan pola determinan kebijakan luar negeri.
m. Menjelaskan proses kebijakan luar negeri.
n. Memberi contoh kasus tentang politik dan kebijakan luar negeri.
o. Menjelaskan unsur kekuatan negara.
p. Menjelaskan polarisasi kekuatan dunia.
q. Mengidentifikasi konsep-konsep ekonomi internasional
r. Mendeskripsikan batasan ekonomi internasional
s. Mendeskripsikan sistem moneter internasional
t. Menganalisis peran institusi ekonomi internasional
u. Mengidentifikasi konsep-konsep globalisme, regionalisme, dan konflik etnis
v. Mendeskripsikan batasan globalisme,regionalisme, dan konflik etnis
w. Menjelaskan proses lahirnya politik luar negeri Republik Indonesia
x. Menjelaskan konsepsi politik luar negeri Republik Indonesia

4. Tujuan Pembelajaran

a. Menganalisis sejarah timbulnya HI
b. Menjelaskan pengertian HI
c. Mendeskripsikan subjek dalam HI
d. Mendeskripsikan objek dalam HI
e. Menjelaskan tiga asas dalam HI

f. Mengidentifikasi konsep perang dan damai dalam hubungan internasional
g. Mendeskripsikan peran Diplomasi dan Hukum Internasional dalam mewujudkan *International Order*
h. Menjelaskan pengertian Organisasi Internasional
i. Menjelaskan tinjauan Sejarah Organisasi Internasional :
j. Mendeskripsikan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa
k. Mendeskripsikan organisasi dibawah PBB
l. Menjelaskan organisasi kawasan
m. Mendeskripsikan mekanisme politik internasional.
n. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi interaksi politik internasional
o. Menjelaskan pola determinan kebijakan luar negeri.
p. Menjelaskan proses kebijakan luar negeri
q. Memberi contoh kasus tentang politik dan kebijakan luar negeri
r. Menjelaskan unsur kekuatan negara
s. Menjelaskan polarisasi kekuatan dunia
t. Menjelaskan konsep-konsep ekonomi internasional
u. Mendeskripsikan batasan ekonomi internasional
v. Mendeskripsikan sistem moneter internasional
w. Menganalisis peran institusi ekonomi internasional
x. Menjelaskan konsep globalisme
y. Menjelaskan konsep regionalisme
z. Menjelaskan konsep konflik etnis
aa. Mendeskripsikan batasan globalisme, regionalisme, dan konflik etnis
ä. Menjelaskan proses lahirnya politik luar negeri Republik Indonesia
ö. Menjelaskan konsepsi politik luar negeri Republik Indonesia

BAB I
PENGANTAR

Kompetensi Dasar

Menjelaskan bidang kajian dan konsep-konsep dasar dari ilmu Hubungan Internasional

Indikator Pencapaian:

1. Mendeskripsikan sejarah timbulnya HI
2. Menjelaskan pengertian HI
3. Mendeskripsikan aktor utama dalam HI
4. Menjelaskan tiga asas dalam HI

MATERI

Setiap manusia di dunia ini senantiasa berhubungan satu dengan yang lain. Hubungan yang terjadi bermula sejak manusia itu ada, dan mereka menyadari bahwa dalam kehidupan ini selalu membutuhkan orang lain. Kemudian berlanjut dengan hubungan yang lebih luas lagi yaitu dalam keluarga, kelompok masyarakat, bangsa, dan pada akhirnya menuju kehidupan antarnegara. Dengan demikian hubungan internasional bermula dari hubungan individual berlanjut kelompok dan bangsa serta pada akhirnya negara.

Dalam materi Hubungan Internasional ini akan diberikan beberapa pengertian dari Hubungan Internasional menurut beberapa tokoh untuk lebih memperjelas.

A. Hubungan Internasional ditinjau dari Perspektif Sejarah dan Ilmu

Hubungan internasional telah ada sejak adanya negara. Dalam hal ini terdapat dua pola yaitu :

1. Yunani Kuno dengan pendapat : Negara ideal adalah negara yang kecil (3000 - 5000 orang) sehingga mudah diatur, saling membantu dan sederajad.

2. Romawi Kuno dengan pendapat: negara ideal adalah negara besar sehingga bisa menguasai dunia yang melahirkan paham Imperialisme yaitu suatu paham yang ingin membentuk negara yang lebih besar.

   Dalam perkembangannya suatu negara bisa mempunyai hak untuk berhubungan dengan negara lain jika memiliki empat kriteria, yaitu.

   a. Mempunyai rakyat.
   b. Mempunyai wilayah.
   c. Mempunyai Pemerintah yang berdaulat.
   d. Mempunyai kemampuan melakukan hubungan dengan bangsa lain.

Hubungan Internasional merupakan bagian dari kajian Ilmu Politik. Hasil penelitian dari Unesco yang berjudul *"The Contemporary of Political Science"* (1948), ilmu politik dibagi menjadi empat :

1. Teori Politik yang meliputi :
   a. Teori politik.
   b. Sejarah ide-ide politik.
2. Lembaga Politik yang meliputi :
   a. Konstitusi.
   b. Pemerintahan Nasional.
   c. Pemerintahan Daerah.
   d. Fungsi Sosial dan Ekonomi Pemerintahan.
   e. Perbandingan Lembaga-Lembaga Politik.
3. Partai Politik, Group dan Pendapat Umum yang meliputi :
   a. Partai-Partai Politik.
   b. Group dan Asosiasi.
   c. Partisipasi warga negara dalam pemerintahan.
   d. Pendapat Umum.
   e. Propaganda.
4. Ruang Lingkup Hubungan Internasional yang meliputi :
   a. Politik Internasional.
   b. Organisasi dan Administrasi Internasional.
   c. Hukum Internasional.

B. Pengertian Hubungan Internasional

1. **KJ.Holsti:**
   Hubungan Internasional merupakan semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda baik yang disponsori pemerintah maupun tidak.
2. **Webster :**
   Hubungan Internasional merupakan suatu kegiatan manusia dimana manusia tersebut berasal dari satu negara atau lebih baik secara individu maupun kelompok.
3. **Norman D Palmer** dan **Howard C Perkins** :
   Hubungan Internasional merupakan suatu studi dari masyarakat dunia dalam masa transisi.
4. **Brigjen Slamet** :
   Hubungan Internasional merupakan sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri dari asas-asas (*International customs*) serta peraturan-peraturan tingkah laku yang mengikat negara-negara (*International treties)* dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara satu sama lain.
5. **Frans S Fernandus** :
   Hubungan Internasional merupakan suatu kegiatan manusia dalam mana manusia berasal dari sebuah negara atau lebih baik individu maupun kelompok berinteraksi baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung.
6. **Sumarsono Mestoko** :
   Hubungan Internasional merupakan suatu disiplin yang disusun secara sistematis, sedangkan ilmu pengetahuan lain disusun secara analitis artinya berasal dari disipilin ilmu sebelumnya.

Secara umum pengertian Hubungan Internasional merupakan interaksi aktif antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan secara Internasional. Unsur-unsur Hubungan Internasional menurut kami adalah sebagai berikut :

1. Interaksi.
2. Individu, masyarakat, kelompok, bangsa, dan negara.

3. Langsung maupun tidak langsung.
4. Dengan aturan tertentu.
5. Secara Internasional.
6. Tujuan bersama.

C. Tiga Asas dalam Hubungan Internasional

Dalam Hubungan Internasional terdapat tiga asas yaitu :

1. Asas Teritorial (Asas Wilayah) :

Didasarkan pada kekuasaan negara atas wilayahnya. Menurut asas ini, setiap negara melaksanakan berlakunya peraturan-peraturan atau hukum bagi semua orang dan semua benda yang ada di wilayahnya. Bila asas ini dilaksanakan secara mutlak maka berarti hukum dari negara itu berlaku bagi setiap orang dan benda yang ada di wilayahnya.

2. Asas Kebangsaan (Asas Nasional Prinsip) :

Didasarkan pada kekuasaan negara terhadap para warga negaranya.. Menurut asas ini, setiap warga negara (WN) dimana pun dia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dan harus tunduk pada hukum dii negaranya. Dengan demikian asas ini bersifat eksteriterial yang nantinya hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warga negara-nya meskipun mereka berada di negara asing.

3. Asas Kepentingan Umum :

Didasarkan pada wewenang yang dimiliki suatu negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan masyarakatnya, sehingga dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri pada semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut-paut dengan kepentingan umum. Dan hukum tidak terikat pada batas-batas kepentingan warga negara.

D. Subjek Hubungan Internasional :

Subjek Hubungan Internasional terdiri atas :

1. Individu yaitu perorangan yang memiliki peran secara internasional
2. Kelompok yaitu baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berpengaruh di dunia internasional

3. Organisasi atau lembaga yaitu yang bersifat internasional
4. Negara yaitu negara-negara yang mengikatkan diri secara organisasi baik dibawah PBB mapun tidak.

E. Objek Hubungan Internasional :

Objek Hubungan Internasional adalah :

1. Hubungan kegiatan diplomatik
2. Hukum internasional
3. Ekonomi internasional
4. Politik internasional
5. Bidang kebudayaan internasional
6. Kerjasama di segala bidang

F. Peranan Hubungan Internasional :

1. Untuk menjalin kerja sama dan meningkatkannya.
2. Untuk meredam, mengantisipasi, dan menyelesaikan konflik yang terjadi.
3. Untuk menjalin persahabatan.
4. Untuk menciptakan suasana yang damai dan tenteram.
5. Untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan kepentingan internasional.

G. Macam-Macam Hubungan Internasional :

1. Hubungan Individual : turis, mahasiswa yang belajar di luar negeri, bisnis (mengadakan kontak-kontak pribadi, sehingga timbul hubungan timbal-balik).
2. Hubungan Antarkelompok (*intergroup relation*) : yaitu hubungan antar-lembaga-lembaga seperti lembaga sosial, keagamaan, perdagangan (bersifat insidental, periodik atau permanen) misalnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Hubungan Antarnegara : negara sebagai aktor dalam Hubungan Internasional merupakan satu kelompok yang terdiri atasi individu-individu dengan ciri-ciri sebagai berikut.

- pribadi-pribadi yang menjadikan dirinya salah satu unsur organisasi negara, terikat oleh rasa solidaritas (misalnya : bahasa, keturunan, latar belakang dan tradisi yang sama), sehingga pribadi-pribadi tersebut sadar untuk hidup bersatu sebagai satu kesatuan.
- individu-individu yang bersatu tersebut mendiami teritorial yang sama, yang berfungsi sebagai wilayah negara yang batas-batasnya disepakati dan dijamin warga negaranya.
- organisasi negara yang dibentuk oleh pribadi tersebut, menyelenggarakan pemerintahan yang mengatur seluruh individu yang berada dalam suatu wilayah negara dan kekuasaan pemerintahan serta tidak terpengaruh kekuasaan yang lain dalam melaksanakan hubungan dengan negara lain (ada rakyat, wilayah dan pemerintah).

Dengan memperhatikan beberapa aspek Hubungan Internasional, maka dapat kita lihat betapa banyak manfaat yang diperoleh suatu negara ketika memiliki hubungan dengan negara lain. Hubungan internasional terjadi sebagai bagian dari interaksi sosial dalam konteks negara. Interaksi internasional sangat dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, dan pengetahuan tiap-tiap negara tentang diri dan lingkungannya. Hal itu merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan dalam mempelajari hubungan internasional.

H. Organ Pelaksana Hubungan Internasional

Sebagaimana kita ketahui, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional suatu bangsa maka bangsa tersebut tidak terlepas dari keberadaan negara-negara lain di dunia. Dengan berbagai bentuk dan karakter masing-masing. Untuk itu perlu diadakan hubungan internasional secara baik dengan negara yang menghargai negara tersebut sesuai dengan harkat dan martabat bangsa dan negaranya. Dibawah ini diuraikan beberapa organ kelengkapan nasional yang dimiliki oleh suatu negara.

Kelengkapan (Organ) Nasional:

1. **Kepala Negara.**

   Wewenang untuk menunjuk organ yang mewakili negara di dalam hubungan Internasionalnya ditentukan oleh konstitusi negara yang bersangkutan. Pada umumnya dilakukan oleh dan atau atas nama Kepala Negara (Kaisar, Raja atau Presiden). Semua tindakan Kepala Negara menjadi tanggung-jawab negara yang bersangkutan.

2. **Kementerian Luar Negeri.**

   Dalam hubungan antarnegara , pelaksanaan kebijakan luar negeri pada Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri memegang pimpinan nasional atas korps diplomatik dan korps konsuler. Dulu hubungan bersifat formal, namun sekarang boleh bersifat pribadi sehingga lebih meningkatkan mutu Hubungan Internasional.

3. **Pejabat-Pejabat Diplomatik**

   a. **Perkembangan Sejarah :**

      Penempatan perwakilan baru dianggap lazim setelah abad ke-17, pada mulanya hanya dua bulan saja setiap tahunnya. Pada zaman Hugo Grotius (1583-1645) mulai ada perwakilan yang menetap sehingga pada akhirnya adanya perwakilan merupakan suatu kebutuhan. Presiden selaku Kepala Negara dalam menyelenggarakan kerja sama dengan negara lain selalu dibantu oleh para duta dan konsul yang diangkatnya maupun duta dan konsul negara lain. Yang dimaksud dengan duta dan konsul adalah wakil negara asal mereka yang memimpin suatu perwakilan dan selalu siap melayani hubungan antarnegara. (G.Kartasapoetra, 1982 : 84).

   b. **Perwakilan aktif dan pasif :**

      Perwakilan aktif : wewenang untuk mengirimkan perwakilan di luar negeri.

      Perwakilan pasif : wewenang untuk menerima perwakilan dari negara lain.

Biasanya 2 perwakilan ini dimiliki oleh negara yang berdaulat penuh, walaupun tidak ada keharusan untuk itu. Hanya demi persahabatan wajib menerima perwakilan dari negara lain, tetapi terkadang ada pertimbangan khusus sehingga suatu negara tidak melakukan hal tersebut, misalnya Paus menempatkan, tetapi Vatikan tidak menerima perwakilan dari negara lain.

c. Tugas Perwakilan Diplomatik :

Melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi Menlu mengurus kepentingan-kepentingan negara di negara dimana ia ditempatkan, dengan tujuan untuk memudahkan kontak atau hubungan dengan negara penerima. Berbagai tugas itu antara lain :

1. Memelihara hubungan baik.
2. Menyelesaikan pertentangan pendapat atau persengketaan dengan sikap serta penyelesaian yang penuh kedamaian (*peace full*).

   Pada prinsipnya :

   - Perwakilan akan selalu memberikan keterangan-keterangan kepada pemerintah yang diwakilinya mengenai segala sesuatu (poleksosbudhankam) di Negara dimana mereka ditempatkan
   - Sebagai pembela rakyatnya yang bermukim di negara yang ditempati.
   - Sebagai organ negara untuk mengurus pengaduan dan tuntutan apabila terjadi pelanggaran kewajiban internasional.

Delegasi khusus yang berkedudukan lepas dari pos diplomatik dapat dibentuk untuk membantu tugasnya.

Adapun tugas-tugas pokok perwakilan diplomatik menurut G.Kartasapoetra adalah sebagai berikut.

1. Mengadakan hubungan-hubungan kenegaraan.
2. Bertindak sebagai juru penjelas atau membawa suara resmi dari negaranya.
3. Mengadakan berbagai perundingan yang menyangkut masalah-masalah antara negaranya dengan negara tempat bertugas.
4. Bertindak sebagai pelindung warga negara yang ada di negara tempat bertugas.
5. Jika diperlukan bertindak sebagai pencatat sipil, pemberian paspor, dan sebagainya.

d. Kepangkatan :

Berdasarkan Reglement Wina pada 19-3-1815 dan Protokol Aken pada 21-11-1818, pimpinan pos diplomatik dibagi dalam empat kelas, yaitu

1. Duta Besar (Dubes)

Merupakan pangkat tertinggi (berlangsung atas dasar timbal-balik), tetapi Swiss mengangkat seorang *Gezant* (perwakilan setingkat di bawah Dubes). Negara-negara Sekutu (anggota PBB) dapat menempatkan wakil-wakilnya di PBB tidak dalam pangkat diplomatik, tapi tetap punya hak veto atau kekebalan diplomatik (perjanjian antara PBB dan Sekutu (AS) pada 26 Juni 1947), tanpa *agreement* (keterangan persetujuan/tidak keberatan). Beda Dubes dengan *Gezant* : Kalau Dubes bisa langsung bertemu dengan Kepala Negara, kalau *Gezant* harus lewat Menlu.

Kedutaan besar *(embassy*) dipimpin oleh Duta Besar (*ambassador)*, mempunyai kekuasaan penuh dan ditempatkan di negara yang banyak hubungannya dengan negaranya. Karena kekuasaannya yang besar maka dalam melaksanakan tugasnya dapat membuat keputusan boleh tanpa konsultasi dahulu dengan pemerintah pusat.

2. **Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.**
   Setingkat dengan Internuntius (dari Paus). Perbedaannya kalau Dubes setingkat dengan Nuntius. Sebagai kepala kedutaan di dalam hal-hal atau persoalan yang menyangkut kenegaraan antara negara yang didalam melaksanakan tugasnya harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat.

3. **Konsulat Jenderal (Konjen)**
   Biasanya mengepalai beberapa ke konsulan, karena itulah dibawah kekuasaannya terdapat beberapa konsul.

4. **Konsul**
   Konsul mengepalai satu daerah kekonsulan

5. **Kuasa Usaha** (*charge d`Affaires*)
   Ditempatkan pada Menlu, dan berfungsi sebagai *gezant-ad interim*. Kekuasaan kuasa usaha tidak begitu luas yaitu hanya terbatas dengan kegiatan usaha dalam hubungan kenegaraan antara negara yang diwakilinya dengan Negara, dan dia harus selalu mengadakan konsultasi dengan pemerintah pusat.

6. **Minister Resident.**
   Kekuasaanya setingkat di bawah Kuasa Usaha. Dalam praktek internasional terdapat dua kategori perwakilan, yaitu :
   a. Perwakilan diplomatik yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memelihara hubungan rutin antara negara satu dengan lainnya.
   b. Perutusan (*mision*) untuk menghadiri konferensi atau kongres Internasional ikut dalam perbuatan persetujuan dan mewakili negaranya untuk menghadiri upacara negara lain, misalnya upacara kemerdekaan suatu negara, menghadiri pemakaman dan lain-lain. Biasanya hanya terdiri Kepala atau Ketua perwakilan dan isteri. Setiap kedutaan dilengkapi dengan tenaga ahli yang disebut

Atase yaitu terdiri : Atase militer, Atase marine, Atase kebudayaan, Atase perdagangan, Atase Pers dan Juru-juru bahasa.

e. Permulaan dan Akhir Tugas Pekerjaan Perwakilan Diplomatik :

Tugas awal pekerjaan Perwakilan Diplomatik : setelah ia menyerahkan surat kepercayaan (lettre de creance) kepada kepala negara atau tuan rumah. Tugas akhir pekerjaan Perwakilan Diplomatik : dipanggil kembali oleh kepala negaranya dengan menyerahkan surat pemanggilan kembali (lettre de recreance) kepada kepala negara dimana dia bertugas dan ia menerimanya.

Perwakilan diplomatik mempunyai tugas mengadakan hubungan-hubungan antarnegara, dengan negara tempat bertugas, sebagai tugas dari pemerintah pusat. Perwakilan diplomatik tidak akan dibenarkan mencampuri urusan-urusan dalam negeri dimana ia ditempatkan. Bila dilanggar akan di-persona non grata-kan.

Persona non grata terjadi karena :

1. Campur tangan dalam urusan-urusan intern negara tuan rumah.
2. Memanfaatkan status mereka untuk menurutkan kehendak hati dalam kegiatan spionase.
3. Diakibatkan tindakan politik seorang diplomat yaitu bila defisiensi mereka (negara penerima) terganggu oleh pernyataan-pernyataan politik yang tidak bijaksana.

Untuk mencapai suatu tujuan, mewujudkan nilai atau mempertahankan kepentingan, pemerintah harus berkomunikasi dengan mereka yang tindakan dan perilakunya ingin dicegah, diubah atau diperkuat. Adapun caranya dengan melalui saluran diplomatik formal atau dengan komunikasi langsung di antara para menteri dan para kepala negara, yaitu melalui proses diplomasi : Terutama digunakan untuk mencapai persetujuan,

kompromi dan penyelesaian apabila tujuan Pemerintah bertentangan.

Adapun tujuan komunikasi diplomatik adalah :

Untuk saling mengubah atau menyokong tujuan dan kebijakan satu sama lain atau untuk mencapai persetujuan mengenai beberapa isu yang diperdebatkan (mungkin juga ada tujuan lain/efek sampingan, sehingga harus terlebih dulu disesuaikan).

a. Fungsi Diplomat :

1. Memberikan perlindungan Warga Negaranya.
2. Sebagai perwakilan simbolis.
3. Memperoleh informasi.
4. Memberikan nasihat dan membuat kebijakan menyeluruh.

Sedangkan menurut **Sumarsono Mestoko** fungsi diplomat meliputi beberapa hal yaitu :

1. Sebagai wakil yuridis negara yang sah menurut hukum dalam hubungan Internasional
2. Sebagai perwakilan diplomatik.
3. Sebagai lambang negara

b. Bahasa Diplomatik :

Piagam PBB dibuat secara otentik dalam 6 bahasa yaitu :
Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol. Sedangkan sebagai bahasa kerja (*working languages*) adalah Prancis, Inggris dan Spanyol.

c. Kekebalan Diplomatik :

Kekebalan atau imuniteit diplomatik dijamin oleh hukum Internasional, meliputi :

1. *Imuniteit exteritorial* yaitu kekebalan terhadap daerah perwakilan misalnya : daerah kedutaan beserta halaman dan bangunannya.
2. *Imuniteit Kebebasan* yaitu setiap anggota diplomatik atau diplomat dalam hal keluar masuk negara dimana mereka ditempatkan mendapat kekebalan terhadap pemeriksaan

dari petugas pabean misalnya dalam hal dokumen dan surat-menyurat.

Secara lebih rinci kekebalan diplomatik adalah sebagai berikut :

1. Kekebalan pribadi duta.
2. Mendapat perlindungan dari serangan atau ancaman kekerasan.
3. Kekebalan dan perlindungan gedung kedutaan dan tempat tinggal.
4. Kekebalan dan perlindungan terhadap harta benda yang ada hubungannya dengan negara asal.
5. Bebas dari alat paksaan legal (yuridis), bebas dari peradilan setempat baik kriminal maupun sipil.
6. Kekebalan korespondensi.

Selain itu perwakilan diplomatik juga mempunyai hak-hak istimewa sebagai berikut:

1. Bebas untuk tidak membayar pajak.
2. Prioritas menggunakan alat-alat komunikasi.
3. Hak untuk mengibarkan bendera negaranya dikediaman duta.
4. Memakai seragam diplomatik.
5. Mendapat tempat terhormat pada upacara-upacara terbuka.

Demikian beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik. Dan ini berlaku bagi semua pejabat, petugas, istri dan anaknya yang berusia tidak lebih dari 18 tahun. Selain itu perwakilan diplomatik juga harus melaksanakan fungsinya yaitu : Untuk menjamin efisiensi sebagai perwakilan asing disuatu negara dan untuk menciptakan *good will atau* pengertian bersama.

Perwakilan Konsulat :

Pejabat-pejabat konsulat asalnya sejak abad pertengahan, namun berbeda dengan pejabat diplomatik mereka berurusan dengan penguasa ditingkat daerah/setempat. Berbeda dengan

perwakilan diplomatik yang diangkat oleh Kepala Negara, maka Konsul diangkat oleh Menteri Luar Negeri melalui surat pengangkatan yang bernama *Consulair Patent*, tetapi untuk negara RI pengangkatan duta dan konsul dilakukan oleh Presiden selaku kepala negara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD 1945. Konsulat lajim juga disebut konsulair merupakan perwakilan yang bertugas mengadakan hubungan-hubungan dari negaranya yang menyangkut perdagangan, pelayaran, perindustrian dan sebagainya**.**

a. Tingkatan dalam Korps Konsuler :

1. Konsul Jenderal :
   Biasanya mengepalai beberapa ke konsulan, karena itulah dibawah kekuasaannya terdapat beberapa konsul.
2. Konsul dan Wakil Konsul :
   Konsul mengepalai satu daerah kekonsulan, kadang-kadang diperbantukan kepada Konjen, Wakil Konsul diperbantukan pada konsul.
3. Agen Konsul :
   Diangkat oleh Konjen atau oleh Konsul dan ditugaskan mengenai hal-hal terbatas.

Konsul ada 2 golongan :

1. Konsul Profesional, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
   a. Memperoleh pendidikan khusus.
   b. Berasal dari negara asal/pengirim.
   c. Memperoleh gaji tetap.
   d. Memperoleh tunjangan tempat tinggal.
2. Konsul Non Profesional (*Honoraire Consul*), dengan ciri-ciri sebagai berikut :
   a. Berasal dari negara setempat.
   b. Tidak mendapat gaji tetap, hanya honor atas jasanya.
   c. Tidak memperoleh tunjangan tempat tinggal.
   d. Lebih terkenal dibanding konsul profesional.

b. Kekebalan yang dimiliki oleh Konsul :

Seperti pada perwakilan diplomatik, maka konsul juga memiliki beberapa *privillege* (hak-hak istimewa) dan imunitas (kekebalan), tetapi agak terbatas hanya pada dirinya dan staf yaitu :

1. Kekebalan surat dan arsip.
2. Bebas pajak.
3. Menggunakan sandi rahasia.
4. Bebas dari kewajiban hadir pada sidang pengadilan, tapi berhubungan dengan dinas.
5. Berhak berhubungan langsung dengan negara yang mengangkat.

Perundingan *(negotiations)*, Perjanjian *(treaties)* dan Persetujuan *(agreements)*

1. Perundingan melalui kongres dan konferensi internasional yaitu suatu pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil resmi dari berbagai negara bertemu pada waktu dan tujuan tertentu.
2. Perjanjian (*traktat atau treaty*) dan persetujuan (*agreement*) yaitu suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih mengenai penetapan, ketentuan atau syarat timbal-balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada umumnya traktat ditaati karena *pacta sunt servanda* yaitu persetujuan antarnegara harus dihormati.

   Jenis-jenis Traktat :

   a. Berdasarkan jumlah peserta : multilateral, bilateral.
   b. Berdasarkan isi : politik, ekonomi dan lain-lain.
   c. Berdasarkan bentuk : (1) traktat bersifat umum dan tentang aneka masalah, (2) Pakta berisi materi politik seperti pakta pertahanan, konvensi, agreements dan sebagainya.

Sumber hukum Internasional secara material adalah :

1. Kebiasaan Internasional yaitu kebiasaan itu memenuhi kepatutan untuk menjadi hukum Internasional.
2. Traktat atau *treaty* atau perjanjian Internasional dapat diterima oleh masyarakat Internasional sebagai hukum Internasional.

Hasil-hasil *Treaty* :

a. *Contract* suatu perjanjian yang dibuat oleh dua negara/lebih yang akibat hukumnya hanya mengikat kepada negara-negara yang membuat perjanjian tersebut, misalnya perjanjian dwi kewarganegaraan RI dengan Cina .
b. *Law making treaties* perjanjian atau deklarasi yang dibuat oleh beberapa negara tetapi akibat hukum dari perjanjian/deklarasi tersebut mengikat secara sukarela negara beradab di dunia, misalnya Konvensi Den Haag tentang aturan-aturan dalam perang atau Konvensi Jenewa tentang aturan-aturan perlindungan korban perang.

   Di samping itu, ada persetujuan dalam bentuk tertulis atau lisan terbuka untuk negara lain, atau terbatas pada negara tertentu dan hanya berlaku untuk batas tertentu maupun tidak.

I. Rangkuman

Hubungan internasional terjadi sebagai bagian dari interaksi sosial dalam konteks negara. Interaksi internasional sangat dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, dan pengetahuan tiap-tiap negara tentang diri dan lingkungannya. Hal itu merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan dalam mempelajari hubungan internasional. Dalam melakukan hubungan internasional, tiap-tiap negara dilengkapi dengan organisasi pelaksana. Para diplomat merupakan aktor dibalik organ pelaksana. Para diplomat itu diantaranya ada Kedutaan Besar, Konsulat Jendral, Konsulat, dan Kuasa Usaha. Masing-masing dapat dipimpin oleh Duta Besar, Konjen, Konsul, dan Menteri Residen. Kuasa Usaha dapat bersifat *ad hoc* atau *ad interim*, tergantung pada misi diplomatik yang

diembankan. Pada prinsipnya, tugas utama diplomat adalah menjembatanai kepentingan negara dalam interaksi dengan negara lain.

J. Latihan dan Tugas :

Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas !

1. Bagaimana sejarah singkat terjadinya Hubungan Internasional suatu bangsa ?
2. Jelaskan mengapa diperlukan hubungan internasional !
3. Sebutkan peranan Hubungan Internasional !
4. Jelaskan kelengkapan (organ) nasional dari suatu bangsa!
5. Sebutkan perbedaan antara perwakilan aktif dan perwakilan pasif!
6. Mengapa perwakilan diplomatik mempunyai peran penting dalam hubungan internasional suatu negara?
7. Bagaimana supaya hunungan internasional dapat berjalan baik sesuai dengan kerangka kepentingan nasional suatu negara?

BAB II
TATANAN INTERNASIONAL

Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan konsep perang dan damai dalam hubungan internasional

Indikator Pencapaian:
1. Mengidentifikasi konsep perang dan damai dalam hubungan internasional
2. Mendeskripsikan peran Diplomasi dan Hukum Internasional dalam mewujudkan *International Order***.**

MATERI

Dalam kehidupan sehari – hari, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan bisa dilepaskan dari benturan kepentingan antarmanusia. Seperti yang dibahas pada minggu – minggu sebelumnya bahwa perang muncul karena adanya perebutan kepentingan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Namun, walaupun secara naluriah manusia akan terus berkonflik, bukan berarti perang adalah salah satu tujuan manusia untuk hidup, untuk itulah kedamaian diperlukan.

A. Perang dan Damai dalam HI

Perang adalah hal yang sangat buruk bagi manusia. Masalah-masalah yang ditimbulkan menyebabkan berbagai macam ancaman terhadap peradaban manusia. Perdamaian adalah multitafsir yang berarti perdamaian yang dimaksudkan oleh suatu pihak belum tentu berarti sama dengan pihak lainnya tapi setidaknya dengan selalu berusaha untuk menempuh jalur perdamaian peradaban manusia dapat menyelamatkan generasi-generasi dimasa mendatang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Perang dan damai merupakan sesuatu yang tidak akan pernah dapat terpisahkan. Perang terjadi karena situasi damai yang stagnan

namun di saat yang bersamaan ketika perang sudah terjadi, perang menciptakan rasa rindu terhadap perdamaian. Tidak akan ada perang jika tidak ada damai dan begitu pula sebaliknya. Melalui perang, manusia dapat menyalurkan hasratnya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui hasrat mereka yang barbar. Manusia yang tidak memiliki senjata dan kapasitas untuk saling membunuh memang tidak akan pernah puas dengan kondisi di sekelilingnya. Oleh karena itu manusia tidak akan pernah berhenti menciptakan teknologi persenjataan yang canggih sementara manusia juga terus mengharapkan situasi yang stabil dan damai.

Siklus perang dan damai memang diciptakan oleh manusia sendiri. Ketika manusia merasa perang memang satu-satunya cara yang diperlukan untuk membagun konstruksi dunia yang lebih baik, maka perang aka terjadi. Tetapi manusia juga tidak dapat terus menerus terlibat di dalam perang sehingga pada titik tertentu, perdamaian juga diperlukan. Jika dalam konteks ini, konsep *the absence of wars* atau dengan kata lain, perdamaian akan digantikan dengan *the presence of war*, demi mencapai kepentingan yang dibutuhkan. Lalu, jika perang sudah memperoleh kepentingan yang akan dicapai, sesegera mungkin manusia harus segera 'keluar' dari perang. Oleh karena itu, didalam menciptakan perdamaian, manusia yang menginginkannya pertama harus berupaya untuk menjaga kondisi *the absence of war* atau dengan kata lain, *building negative peace* (Barash & Webel, 2002 : 264).

Building negative peace sejatinya dapat diartikan sebagai upaya *to prevent war* (Barash & Webel, 2002 : 264) didalam kondisi *the absence of war*, atau juga dapat diimplementasikan ke dalam upaya *peacekeeping*. Upaya menjaga perdamaian dalam *negative peace* memiliki beberapa tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan menjaga perdamaian dalam konteks *negative peace* terjadi ketika situasi benar-benar damai. Dari banyaknya masalah yang ditimbulkan belum ada satupun negara atau pihak-pihak lain yang dapat melakukan pencegahan perang secara permanen. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak yang terlibat belum berusaha cukup keras untuk menyelasaikan permasalahan ini. Untuk mencapai kondisi *negative peace* dibutuhkan

usaha-usaha yang memakan waktu cukup lama hal ini tak lain dikarenakan oleh sifat alamiah manusia yang gemar dengan tindak kekerasan.

Sementara itu justru dalam situasi yang damai, manusia akan cenderung mencari titik dimana konflik bisa terjadi dan meletus lah perang. Harusnya adalah hal yang mudah bagi manusia untuk mencegah terjadinya perang, namun banyak manusia juga menginginkan teradinya perang. Jendral Omar Bradley menyatakan bahwa akan sangat rumit bagi umat manusia didalam mengakomodasi perdamaian, terlebih karena besarnya perbedaan yang ada diantara umat manusia (Barash & Webel, 2002:265). Oleh karena itulah seringkali di masa *the absence of war*, tensi tinggi diantara manusia dapat semakin meningkat serta menuntun manusia ke medan perang.

Seiring dengan tidak cukupnya mencapai perdamaian yang sejati, tidak hanya sebatas mencegah perang atau bahkan mungkin kegagalan didalam menciptakan *negative peace*, yang menuntun manusia ke dalam kondisi perang, upaya untuk menciptakan perdamaian yang kedua adalah membangun *positive peace*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa manusia tidak dapat terus menerus terlibat dalam perang sehingga manusia akan mencari persamaan nasib agar perdamain dapat tercapai. Tentu saja isu yang ada di dalam *positive peace building* ini tidak sekedar mengenai perang namun juga isu-isu seperti kemanusiaan, kelaparan dan lingkungan. *Positive peace* lebih berupaya untuk menjaga hubungan damai diantara setiap individu di dunia ini dengan melibatkan setiap individu di dalam proses *improvement* isu-isu diatas. Melalui kehidupan yang harmonis dan damai diantara setiap individu, maka perdamaian yang sejati, lebih dari sekedar mencegah perang, dapat dirasakan oleh setiap individu di dunia ini (Barash & Webel, 2002 : 427-428).

Sebenarnya mencegah perang adalah hal yang mudah, banyak solusi berbeda yang bisa diajukan dan telah diimplementasikan dalam derajat yang berbeda. Solusi sederhana dapat kita lihat dalam *"war on drugs"* yang hanya mengatakan "tidak pada narkoba". Tetapi terkadang ada solusi yang tidak cukup inovatif, tidak praktis dan layak

digunakan sehingga menyebabkan permasalahan berujung pada perang. Hal ini dikarenakan solusi yang bervariasi tidak dicoba dalam kombinasi yang benar atau tidak sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini, damai hanyalah ada di angan-angan. Namun kita harus melihat kembali usaha kemanusiaan untuk mencegah perang yang akhirnya kita dapat menjaga peacemakers untuk masa depan dari pembelajaran kesalahan di masa lalu.

St. Agustine mengatakan bahwa *war is waged* yang artinya damai mungkin adalah bentuk dari kemenangan tetapi kemenangan terbesar adalah berperang menggunakan kata-kata daripada menggunakan pedang dan untuk mencapai kemenangan dengan cara damai itu berarti tidak melalui jalan perang. Sejalan dengan pemikiran A. J. Muste yang mengatakan bahwa *There is no way to peace, peace is the way* sehingga damai pada akhirnya harus dipahami, meskipun samar-samar dan seperti penyebab perang, penyebab damai pun juga dipandang dari berbagai sudut pandang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada perdamaian yang abadi. Karena di dalam masa damai, manusia justru cenderung menginginkan perang dengan mengangkat segala perbedaan yang ada. Sebaliknya, tidak ada masa perang yang abadi karena manusia dengan segala persamaan nasib akibat perang akan menginginkan perdamaian dan melupakan perbedaan untuk sejenak. Konsep perdamaian sendiri juga masih mengalami perdebatan, bagaimana sebenarnya kondisi dunia dapat dikatakan damai, apakah benar – benar tidak ada perang atau adanya salah satu aktor yang mampu memegang kendali keamanan internasional. Kembali kepada setiap individu apakah ingin menjaga hubungan baik diantaranya agar tercapainya perdamaian atau terus memancing ketegangan untuk memicu konflik dan perang. Sehingga dalam pembahasan ini tidak bisa dipastikan tentang mind set manusia terhadap perang dan perdamaian itu sendiri, karena keduanya memang muncul karena adanya hubungan kausalitas.

B. Diplomasi dan Hukum Internasional dalam mewujudkan *International Order*.

1. Diplomasi

a. Pengertian Diplomasi

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang yang biasanya disebut dengan diplomat) yang mewakili sebuah negara atau organisasi. Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Perjanjian-perjanjian internasional umumnya dirundingkan oleh para diplomat terlebih dahulu sebelum disetujui oleh pembesar-pembesar negara. Istilah *diplomacy* diperkenalkan ke dalam bahasa Inggris oleh Edward Burke pada tahun 1796 berdasarkan sebuah kata dari bahasa Perancis yaitu *diplomatie*.

Menurut Kepres Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perwakilan diplomatik adalah kedutaan besar Republik Indonesia dan perutusantetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik di seluruh wilayah negara penerima dan/atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.

Diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan Negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan.

b. Bentuk-Bentuk Diplomasi

Macam atau jenis diplomasi berdasarkan tujuan diplomasi terdiri dari Diplomasi Preventif, Diplomasi Penyelesaian konflik, dan Diplomasi Persahabatan. Sedangkan berdasarkan isu dan

substansinya dibedakan menjadi *Security diplomacy*, *Human right diplomacy*, *Economic diplomacy*. *Selain itu juga terdapat jenis diplomasi demokratis.*

Diplomasi Preventif yang dimulai dari perkembangann, manfaat, kelebihan, kekurangan dan implementasi dalam realita kehidupan. Selain itu juga untuk mengetahui diplomasi sebagai penyelesei konflik atau resolusi konflik serta implementsinya di dehidupan. Selanjutnya ialah diplomasi persahabatan dengan kata kunci sama seperti diplomsi preventif yakni mengetahui, manfaat, kelebihan, kekurangan dan implementasi dalam realita.

Berdasarkan isu substansinya terdapat macam diplomasi berdasarkan isu atau substansinya yakni diplomasi security, diplomasi Hak Asasi Manusia dan diplomasi Ekonomi. Masing – masing dari diplomasi tersebut akan diulas untuk mengetahui pengertian, manfaaat, kekurangan, kelebihan dan implementsinya. Berikut jenis-jenis diplomasi.

1) Diplomasi *Preventive*

Prinsip perdamaian dunia sebenarnya tidak mengahendaki adanya suatu kekrasan dalam bentuk apapun, apalagi bentuk serangan bersenjata yang diluncurkan kepada suatu negara. Dunia ini memerlukan *peacemaking peacekeeping* dan *peacebuilding* berdasarkan agenda yang dikemukakan oleh sekretaris jenderal PBB yakni Boutros Ghali, PBB mempunyai agenda yang disebut dengan "*An Agenda for Peace*". Di dalam agenda untuk menjaga perdamaian diperlukan adanya diplomasi preventif.

Diplomasi preventif ada atau muncul setelah perang dingin atau diawal abad ke 20. Diplomasi ini banyak dilakukan oleh negara-negara dunia ketiga yakni negara yang merdeka dan diakui kedaulatannya setelah perang dingin, dan dilakukan untuk mencegah berbagai konflik yang berpotensi perang senjata. Diplomasi preventif secara umum digunakan untuk mencegah keterlibatan negara-negara super power atau negara-

negara besar dalam sebuah konflik lokal maupun regional, karena negara-negara yang sedang berkonflik ingin menyeleseikan masalahnya secara mandiri.

Prinsip diplomasi preventif juga termuat dalam hukum internasional yakni :

1. Larangan menggunakan kekerasan
2. Penyelesaian perselisihan secara damai

Diplomasi preventif ada dan dilakukan karena menurut Mochamad Bedjaoui diplomasi ini memiliki 3 tujuan utama yakni:

1. Mencegah konflik antar pemerintah dan kelompok minoritas dalam suatu negara,
2. Mencegah perselisihan dan konflik secara terbuka,
3. Mencegah penyebaran konflik sekecil-kecilnya apabila terjadi konflik.

Diplomasi preventif ini dapat dilakukan melalui jalur politik, militer, ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional termasuk *National Goverment Organization* (NGO), dimana semua element itu bertujuan untuk :

a) Mencegah masalah peningkatan konflik dalam dua negara,
b) Mencegah konflik yang berkompetensi menggunakan senjata,
c) Mencegah intensitas geografis konflik meluas hingga terjadi krisis kemanusiaan,
d) Mencegah dan mengelola agar krisis kemanusiaan tidak semakin parah, dan
e) Sebagai bagian terhadap kondisi krisis guna memberi solusi.

2) Diplomasi Penyelesaian Konflik

Konflik adalah suatu kondisi sosial yang muncul ketika ada dua aktor atau lebih yang mencoba untuk mewujudkan tujuan yang berbeda.Di dalam hubungan internasional konflik

sering terjadi diantara negara-negara karena adanya suatu benturan kepentingan yang berbeda antara dua aktor atau lebih dan aktor-aktor negara tersebut berusaha untuk menggunakan *power*-nya yakni dengan mempengaruhi aktor lain guna tercapainya tujuan nasional negaranya. Bentuk dari konflik yang sering terjadi di kalangan internasional berupa perang, genosida, aksi vandalisme, persuasi, perkawinan politik, dan lan-lain. Jadi pada saat konflik telah terjadi maka perlu dilakukan suatu upaya untuk menyeleseikan konflik serta mencegah penyebaran konflik.

Untuk menyelesaikan konflik antar negara secara internasional maka terdapat bentuk dari diplomasi yang lebih spesifik yakni Diplomasi Penyelesaian Konflik. Sesuai dengan namanya diplomasi penyeleseian konflik dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar negara. Ketika konflik terjadi dan para aktor telah menggunakan powernya maka keadaan menjadi sangat tidak kondusif, sehingga diplomasi memilii peran yang berpengaruh terhadap kelangsungan konflik antar negara. Karena diplomasi dianggap sebagai cara yang terbaik untuk menghindari tindak dan pemikiran tentang kekerasan jadi jalan akhir yang ditempuh adalah dengan bernegosiasi untuk mencapai hasil penyeleseian masalah yang dihadapi.

3) Diplomasi Persahabatan

Diplomasi persahabatan ada dimaksudkan untuk menjalin persahabatan dan sangat menghindari penyelesaian konflik dengan peperangan. Hubungan yang baik antara dua negara atu lebih memudahkan negara-negara tersebut dalam mencapai kepentingannya dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun ideologi. Dan biasanya yang melakukan diplomasi persahabatan ialah negara-negara yang serumpun yang merupakan negara sahabat yang diperkuat denga negosiasi dana diplomasi. Pada akhir masalah identik dengan perdamaian. Menlu RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa mengutarakan tujuan

utama dari diplomasi persahabatan ialah mempererat hubungan antar negara dengan negara lainnya dan menghindari perang antar negara. Hal tersebut tertulis dalam point kelima ynag tertuang di *Vienna Convention on Diplomatic Relation* tahun 1961 yang berisi "meningkakan hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima serta memajukan hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan".

Selain itu diplomasi juga memengaruhi penyebaran ideologi. negara yang memiliki ideologi yang kuat akan berusaha untuk merangkul banyak negara untuk menganut dan mengaplikasikan ideologi tersebut serta secara tidak langsung menghalangi penyebaran ideologi lain dari negara lain. Jika suatu negara menganut ideologi yang sama, dapat dipastikan negara-negara tersebut memiliki hubungan yang sangat baik dan erat karena mereka merupakan sahabat.

4) Diplomasi Demokratis

Diplomasi demokratis adalah sebutan bagi diplomasi Amerika Serikat (AS) yang baru pada abad ke-20 (tahun 1919) ikut berkecimpung dalam percaturan politik internasional melalui kehadiran Presiden Woodrow Wilson di Konggres Versailles untuk menyelesaikan persoalan Perang Dunia I. Dalam pertemuan itu Presiden Woodrow Wilson mengusulkan gagasan 14 Pasal untuk perdamaian dunia (dikenal dengan *Wilson Fourteen Points*) dan salah satunya adalah gagasan untuk mewujudkan "*open covenant openly arrived at*" alias "perjanjian terbuka yang dicapai secara terbuka." Pengertian demokratik di sini merujuk kepada pola pertanggungjawaban pelaksanaan politik luar negeri yang berlaku di AS, atau proses politik yang berlaku di AS berkaitan dengan keterlibatan internasional pemerintahnya. Mengingat Amerika adalah negara dengan sistem pemerintahan demokratis, maka semua kebijakan luar negeri harus dipertanggungjawabkan kepada

rakyat melalui Konggres (DPR-nya Amerika) karena lembaga ini memiliki hak ratifikasi (persetujuan).

Ketika Presiden Woodrow Wilson menandatangani Piagam Liga Bangsa-bangsa *(League of Nations)* maka ia harus mempertanggungjawabkannya kepada Konggres, yang ternyata menolak meratifikasinya. Karena Piagam LBB tidak diratifikasi oleh Konggres, maka dengan sendirinya AS tidak berkewajiban melaksanakan alias tidak menjadi anggota Liga. Dalam perkembangannya sekarang ini diplomasi demokratis sering justru digunakan untuk menyembunyikan maksud yang sebenarnya apabila sebuah negara tidak mau menandatangani sebuah perjanjian internasional. Amerika, misalnya, menjadikan alasan tidak diratifikasinya beberapa konvensi atau kesepakatan internasional oleh Konggres sebagai pembenar untuk tidak menjalankan konvensi hukum laut internasional, Protokol Kyoto, dan lain-lain. Israel juga menggunakan alasan persetujuan Parlemen untuk menganeksasi beberapa wilayah Arab yang ia rebut melalui Perang Enam Hari tahun 1967. Jadi, di sini diplomasi demokratis hanya istilah semata, atau hanya berlaku untuk hubungan antarkekuasaan di dalam negeri meskipun keputusan itu bisa sangat tidak demokratis bagi orang lain.

c. *Fungsi dan Tugas Diplomasi*

Diplomasi memiliki fungsi untuk mendamaikan beragamnya kepentingan ini atau paling tidak membuatnya berkesesuaian.Sedangkan, fungsi utamanya adalah negosiasi. Diplomasi mempunyai ruang lingkup menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara-negara melalui negosiasi yang sukses. Bila negosiasi gagal, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik yang lebih besar yakni, peperangan antar negara.

Dalam perannya diplomasi mempunyai peran yang sangat beragam dan banyak untuk bermain di dalam hubungan internasional. Dalam menjalankan hubungan antara masyarakat

yang terorganisasi, diplomasi, dengan penerapan metode negosiasi, persuasi, tukar pikiran, dan sebagainya, mengurangi kemungkinan penggunaan kekuatan yang sering tersembunyi. Diplomasi merupakan salah satu bagian penting dalam pemeliharaan perdamaian. Pentingnya diplomasi sebagai pemelihara keseimbangan dan kedamaian tatanan internasional. Diplomasi telah memainkan peranan besar dalam mengatur kebijakan-kebijakan internasional. Banyak masalah yang nyata bisa diselesaikan melalui diplomasi. Sehubungan dengan ini penelitian Richard W. Sterling mengatakan, "sungguh, diplomasi adalah politik hubungan internasional, politik internsional bagi arti yang paling tepat bagi istilah itu."Pada intinya, pentingnya diplomasi sebagai suatu instrument tatanan internasional yang damai tak bisa dipungkiri dan mengoptimalkan aktivitas komunikasi internasional.

Selain itu menurut beberapa pendapat, Fungsi Diplomasi adalah:

Konvensi Vienna 1961 :

- Mewakili negara pengirim di negara penerima.
- Melindungi kepentingan negara pengirim dengan negara penerima.
- Melakukan perundingan dengan negara penerima.
- Mencari informasi di negara penerima untuk negara pengirim atau menyampaikan informasi negara untuk negera penerima.
- Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan penerima serta memajukan hubungan ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan.

d. *Tugas dan Tujuan Diplomasi*

Diplomasi juga memiliki beberapa tugas, yaitu:

1) Menetapkan tujuan berdasarkan kekuatan sesungguhnya dan kekuatan potensial yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Menilai Tujuan negara lain dan kekuatan sesungguhnya dan potensial yang tersedia untuk mencapi tujuan tesebut.
3) Menetapkan seberapa jauh tujuan-tujuan yang berbeda ini cocok satu sama lain.
4) Menggunakan sarana-sarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

Tujuan Diplomasi menurut ahli

Kautilya, ahli stategi politik di masa dinasti Mauryan di India, memaparkan ada empat motif diplomasi:

a) *Acquisition*: tujuan diplomasi adalah untuk membuat hubungan dengan negara lain (hubungan diplomatik).
b) *Preservation*: tujuan diplomasi adalah untuk menjaga hubungan hubungan dengan negara lain.
c) *Augmentation*: tujuan diplomasi adalah untuk memperluas hubungan diplomatik.
d) *Proper distribution*: tujuan diplomasi adalah harmoni, perdamaian.

Dengan kata lain tujuan dari diplomasi yang baik atau efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri. Kepentingan terdepan tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Tetapi selain pertimbangan yang vital tentang keamanan nasional, terdapat tujuan vital yang lain antara lain memajukan ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan waega negara sendiri di negara lain, mengembangkan budaya dan ideologi, peningkatan prestise nasional, memperoleh persahabatan dengan negara lain, dan sebagainya. Secara luas tujuan ini bisa dibagi menjadi empat: politik, ekonomi, budaya dan ideologi.

2. Hukum Internasional

a. Definisi Hukum Internasional

Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, Hukum Internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar

negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan, pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.

Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:

a. Negara dengan negara
b. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak dibawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Hukum Dunia berpangkal pada dasar pikiran lain. Dipengaruhi analogi dengan Hukum Tata Negara *(constitusional law)*, hukum dunia merupakan semacam negara (federasi) dunia yang meliputi semua negara di dunia ini. Negara dunia secara hirarki berdiri di atas negara-negara nasional. Tertib hukum dunia menurut konsep ini merupakan suatu tertib hukum subordinasi.

Dalam hubungan internasional, hukum internasional memiliki peran sebagai berikut:

a. Sebagai aturan/acuan dalam melakukan Perjanjian Internasional
b. Sebagai proses dalam menyelesaikan Sengketa Internasional di Mahkamah Internasional
c. Sebagai langkah dalam menjaga perdamaian dunia.

b. Sumber Hukum Internasional

Pembahasan mengenai sumber hukum yang dimaksud disini adalah sumber hukum formal atau istilah sebagaimana yang telah terurai dalam pembahasan mengenai Bab "Mengenal Hukum Tata Negara" dalam buku ini yaitu disebut "sumber hukum formil. Sebagaimana telah disampaikan, jika sumber hukum formil yaitu menyangkut proses pembentukan atau proses mempositifkan suatu ketentuan umum menjadi hukum. Dalam kaitan ini Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan jika "sumber hukum dalam arti formal memberi jawaban kepada pertanyaan : di manakah kita mendapat ketentuan hukum yang dapat diterapkan sebagai kaidah dalam suatu persoalan yang konkret."

Berdasarkan hukum tertulis ada dua tempat yang menunjuk atau mencantumkan secara tertulis sumber hukum dalam arti formal, yaitu Pasal 7 Konvensi Den Haag XII tertanggal 18 Oktober 1907 yang mendirikan Mahamah Internasional Perampasan Kapal di Laut (*International Prize Court*) dan dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional yang tercantum dalam Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945.

Terhadap kedua hukum tertulis yang berisi penunjukkan pada sumber hukum formal di atas, hanya Piagam Mahkamah Internasional yang tercantum dalam Piagam PBB saja yang digunakan. Hal ini karena Makamah Internasional mengenai Perampasan Kapal tidak pernah terbentuk, disebabkan tidak mencapai jumlah ratifikasi yang diperlukan. dengan demikian bagi hukum internasional positif hanya digunakan ketentuan Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, dalam mengadili

perkara yang diajukan kepadanya maka Mahkamah Internasional akan menggunakan :

a. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh Negara-negara yang bersengketa;
b. Kebiasaan Internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
c. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
d. Putusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai Negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum.

Urutan penyebutan sumber hukum dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional di atas tidaklah menggambarkan urutan pentingnya masing-masing sumber hukum tersebut sebagai sumber hukum formal, karena soal urutan adalah adalah sama sekali tidak ditentukan dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional. Satu-satunya klasifikasi yang dapat diadakan adalah sumber hukum formal itu dibagi atas dua golongan, yaitu sumber hukum utama atau primer yang meliputi angka 1 hingga 3 Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional. Serta sumber hukum tambahan atau subsider yaitu putusan-putusan pengadilan dan ajaran sarjana hukum yang paling terkemuka dari berbagai Negara.

Persoalan sumber hukum mana yang terpenting antara ketiga sumber hukum utama atau primer yang disebutkan oleh Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional di atas sebenarnya adalah bergantung dari pangkal tolak atau sudut pandang saja. Ditinjau dari sudut pandang sejarah, maka kebiasaan hukum internasional merupakan sumber hukum yang tertua. Dengan demikian kebiasaan internasional dapat dianggap sebagai sumber hukum yang terpenting apabila melihat dari sudut sejarah. Sebaliknya perjanjian internasional dapat dianggap sebagai sumber yang terpenting apabila dilihat berdasarkan kenyataan bahwa

semakin banyak persoalan yang dalam perkembangannya diatur denga perjanjian antara Negara-negara termasuk pula masalah yang tadinya diatur oleh hukum kebiasaan. Sumber ketiga yaitu prinsip hukum umum juga dapat dipandang sebagai sumber yang terpenting apabila ditinjau dari sudut fungsi sumber hukum ini dalam perkembangan hukum baru oleh Mahkamah Internasional. Sumber hukum inilah yang memberikan kelonggaran kepada Mahkamah Internasional untuk menemukan atau membentuk kaidah hukum baru dan mengembangkan hukum internasional berdasarkan prinsip hukum umum.

c. Peranan Hukum Internasional dalam Menjaga Perdamaian Dunia

Permasalahan yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain atau satu negara dengan dan banyak negara akan dapat menimbulkan konflik dan pertentangan, baik dalam kaitannya dengan hak suatu negara atau banyak negara, maupun dengan kebiasaan seorang kepala negara, diploatik atau duta besar.

Semua subjek ini mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti permainanan internasional dan mengikuti aturan yang telah disepakati secara bersama atau secara internasional. Suatu negara yang telah membina hubungan kerja dengan negara lain, haruslah mempunyai korps diplomatik pada negara yang bersangkutan. Seorang diplomat harus tunduk pada hukum diplomatik yang telah ditentukan secara internasional.

Berikut ini adalah contoh mengenai peranan hukum internasional berdasarkan sumber-sumbernya dalam menjaga perdamaian dunia:

1. Perjanjian pemamfaatan benua Antartika secara damai *(Antartic Treaty)* pada tahun 1959.
2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian *(Non-Proliferation Treaty)* pada tahun 1968.

3. Perjanjian damai Dayton (Ohio-AS) pada tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia mematuhinya. Untuk mengatasi perjanjian tersebut. NATO menempatkan pasukannya guna menegakan hukum internasional yang telah disepakati.

C. Rangkuman

Ruang lingkup hubungan internasional diantaranya perang, konferensi internasional, diplomasi, spionase, olimpiade, perdagangan, bantuan luar negeri, imigrasi, pariwisata, pembajakan, penyakit menular, revolusi kekerasan. Sebagai fenomena sosial, ruang lingkup hubungan internasional sangat jamak, alias tidak berurusan dengan masalah-masalah politik saja. Namun seiring perkembangan zaman ruang lingkup hubungan internasional juga berkembang yaitu menyangkut masalah-masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, alih teknologi, kebudayaan, kerja sama keamanan dan kejahatan internasional.

Hubungan internasional sebagai disiplin ilmu atau bidang studi, diantaranya meliputi berbagai spesialisasi seperti politik internasional, politik luar negeri, ekonomi internasional, ekonomi politik internasional, organisasi internasional, hukum internasional, komunikasi internasional, administrasi internasional, kriminologi internasional, sejarah diplomasi, studi wilayah, *military science*, manajemen internasional, kebudayaan antar bangsa, dan lain sebagainya.

Permasalahan yang terjadi antara satu negara dengan negara yang lain atau satu negara dengan dan banyak negara akan dapat menimbulkan konflik dan pertentangan, baik dalam kaitannya dengan hak suatu negara atau banyak negara, maupun dengan kebiasaan seorang kepala negara, diploatik atau duta besar. Semua subjek ini mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yang dalam pelaksanaannya harus mengikuti permainanan internasional dan mengikuti aturan yang telah disepakati secara bersama atau secara internasional. Suatu negara yang telah membina hubungan kerja

dengan negara lain, haruslah mempunyai korps diplomatik pada negara yang bersangkutan. Seorang diplomat harus tunduk pada hukum diplomatik yang telah ditentukan secara internasional.

D. Latihan dan Tugas

Diskusikan dan kerjakan dengan berkelompok minimal 5 orang perkelompok

1. Apakah dengan setelah adanya perang bisa menjamin terciptanya perdamaian?
2. Apakah dengan adanya diplomasi perdamaian bisa tercipta?
3. Apakah Hukum Internasional yang selama ini sudah diterapkan bisa meminimalisir terjadinya konflik internasional?

BAB III
ORGANISASI INTERNASIONAL

Kompetensi Dasar

Menjelaskan bidang kajian dan konsep-konsep dasar dari ilmu Hubungtan Internasional

Indikator Pencapaian:

1. Menjelaskan pengertian Lembaga/Organisasi Internasional
2. Menjelaskan tinjauan Sejarah Lembaga/Organisasi Internasional :
3. Mendeskripsikan tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa

MATERI

Hubungan kerjasama internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara perjanjian internasional atau saling menukar pengiriman korps diplomatik atau konsuler, termasuk melakukan hubungan internsional melalui organisasi internasional. Fenomena berkembangnya peran dan tujuan organisasi internasional juga terkait dengan perkembangan hubungan antar negara. Melalui organisasi internasional, negara berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama terkait dengan bidang-bidang maupun isu-isu dalam hubungan internasional. Organisasi internasional dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan Hubungan Internasional. Selain itu dapat digunakan juga sebagai media kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara.

Dalam perkembangannya organisasi Internasional dewasa ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pertumbuhan dari organisasi Internasional ini amat pesat sejak permulaan abad XX, saat ini sudah berjumlah 300 buah. Lembaga/organisasi Internasional mempunyai tugas penting yaitu:

1. Dibentuk dalam rangka hubungan Internasional baik yang bersifat universal/global.
2. Memiliki dasar konstitusional masing-masing.

3. Persamaannya dengan organisasi politik negara organisasi internasional terdiri dari bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Fungsi eksekutif memelihara perdamaian dunia diserahkan pada Dewan Keamanan, fungsi legislatif pada Majelis Umum, dan fungsi yudikatif pada Mahkamah Internasional.

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh organisasi internasional yaitu

1. Fungsi lembaga atau organisasi internasional lebih bersifat promosional dari pada operasional.
2. Sekalipun bersifat operasional, lembaga ini hanya untuk mengadakan penyelidikan/saran, dan bukan untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat.
3. Keputusan yang dikeluarkan lembaga/organisasi internasional lebih bergantung pada suara mayoritas anggota, bukan dari lembaga/organisasi internasional yang bersangkutan.

A. Pengertian Lembaga/Organisasi Internasional

Pengertian lembaga/organisasi internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ (kelengkapan) dari perhimpunan itu sendiri. Juga dapat berarti suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau *charter*. Menurut Boer Mauna, organisasi internasional adalah himpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.

Ada 2 unsur :

1. Unsur Organisasi : perhimpunan itu merupakan satu badan hukum.
2. Unsur Internasional : struktur dan fungsi tiap-tiap organisasi didasarkan atas suatu konstitusi, suatu perjanjian resmi yang menentukan wewenang dan batas-batasnya yang diberikan oleh negara-negara.

Dari segi fungsi :

1. Sebagai organisasi politik : organisasi yang menangani masalah-masalah politik umum PBB.
2. Sebagai organisasi teknik : badan-badan khusus PBB.

Dari segi kekuasaan :

Kebanyakan hanya merekomendasikan dan keputusannya ditujukan kenegara-negara.

Dari segi komposisi :

1. Semua negara diminta menjadi anggota (vokasi internasional).
2. Hanya menerima negara-negara yang diikat solidaritas geo-grafis/solidaritas politis.

Status Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional adalah

1. Sebagai subjek Hukum Internasional.
2. Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotanya
3. Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah Hukum Internasional ditaati.
4. Membantu pembentukan Hukum Internasional.

B. Tinjauan Sejarah Lembaga/Organisasi Internasional

Dalam sejarah manusia, suatu bangsa atau negara selalu ingin menguasai bangsa lainnya. Menginjak abad ke-20, sifat dan cara peperangan telah berubah secara fundamental. Hal ini karena perang selalu membawa bencana, sehingga perlu dicegah. Caranya dengan meninggalkan pemikiran yang sudah usang, penentuan perang dan damai adalah hak setiap negara dan bangsa menurut kemauannya sendiri. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat menghimpun/mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di dunia.Melalui **Perjanjian Versailes pada 10 Januari 1920** dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau *League of Nations* atas usul Presiden AS Woodrow Wilson. Struktur yang dipakai terdiri atas :

1. *The Council* (Dewan).
2. *The Assembly* (Majelis).
3. *The Secretariate* (Sekretariat).
4. *The Permanent Court of Bodies of International Justice* (Mahkamah Tetap Internasional).
5. *The International Labour Organization* (Organisasi Buruh Internasional). Dewan-Dewan LBB semula terdiri lima anggota tetap (AS, Inggris, Prancis, Italia dan Jepang) dan empat anggota tidak tetap. Dalam perkembangannya AS mundur dan anggota tidak tetap menjadi sebelas negara. Dalam perkembangannya Rusia dan Jerman menjadi anggota tetap. Wewenang ketua dewan menentukan perdamaian.

Majelis

Bersama-sama dengan dewan mempunyai hak yang sama dan merupakan badan yang mengurus liga**.**

Sekretariat

Diketuai seorang Sekjen dan terdiri atas 600 petugas. Terbagi dalam 11 seksi (biro), yang bertugas memecahkan masalah dalam ruang lingkup LBB. Tugas Sekjen adalah mencatat dan mempublikasikan serta menyimpan perjanjian internasional.

Mahkamah Tetap Internasional

bertugas bekerja sejajar dan bersama dengan LBB terbatas pada kasus hukum Internasional.

Organisasi Buruh Internasional (ILO)

Setiap negara bebas jadi anggota ILO. Terdiri dari MU yang ber-anggotakan delegasi-delegasi dari setiap negara yang mewakili unsur buruh, majikan dan pemerintah.

Sifat LBB

Merupakan badan untuk mencegah perang dan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.

Fungsi LBB

Sebagai pemelihara perdamaian.

Kelemahan-kelemahan LBB

Sebagai suatu badan LBB mempunyai beberapa kelemahan, yaitu :

a. Adanya kesan bahwa negara anggota tersebut mengutamakan kerja sama internasional daripada kepentingan nasional, padahal tidak demikian.
b. Bahwa Majelis diharapkan memberikan keputusan sebagai tindakan terakhir.

Aktivitas-Aktivitas LBB

1. Penyelesaian persengketaan yang relatif kecil.
2. Pemecahan masalah-masalah darurat.

Kegagalan LBB karena adanya negara-negara yang menerapkan sistem diktator/ militer yang timbul karena adanya depresi. Meskipun demikian, LBB juga mempunyai pengaruh yaitu :

1. Meletakkan dasar dari keinginan manusia untuk memelihara hubungan antar bangsa.
2. Memengaruhi struktur PBB.
3. LBB telah memberi pelajaran kepada manusia tentang cara berorganisasi dalam kehidupan internasional.

Sampai berakhirnya era LBB ada enam negara yang tidak pernah menjadi anggota yaitu Saudi Arabia, Yaman, AS, Oman, Nepal, dan Manchuria.

C. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB merupakan sebuah organisasi global dengan maksud sebagai berikut :

a. Menyelematkan keturunan manusia, sekarang dan yang akan datang.
b. Meneguhkan keyakinan tentang HAM.

c. Terpeliharanya keadilan dan penghargaan terhadap kewajiban yang timbul dari hukum Internasional.

Markas Besar PBB New York
http://www.google.co.id/imglanding?q=pbb&um/

Berdasar asas-asas PBB ada 2 hal pokok, yaitu :

1. Memelihara, mempertahankan perdamaian, dan keamanan internasional (menjadi tujuan utama).
2. Semua tindakan dijiwai oleh semangat gotong-royong atau kebersamaan sesuai dengan asas demokrasi.

Yang harus diingat PBB bukan suatu organisasi yang bersifat **supra nasional**, karena hanya bertindak sebagai wakil dan atas nama negara-negara anggotanya yang masing-masing sama berdaulat.

Kronologi lahirnya PBB secara garis besar

a. Piagam Atlantik *(Atlantic Charter)*

Merupakan maklumat bersama Presiden Franklin D Roosevelt (AS) dengan PM.Winston Churchill (Inggris) pada 14 Agustus 1941. Dibuat diatas kapal Agusta yang waktu itu berposisi disalah-satu

sudut Lautan Atlantik. Piagam berisi delapan buah pasal, tiga buah diantaranya bertalian dengan perencanaan suatu organisasi dunia untuk perdamaian. Pada saat itu juga dikemukakan oleh Roosevelt yang terkenal meliputi lima hal sebagai berikut

1. *Freedom of information* (informasi).
2. *Freedom of religion* (agama).
3. *Freedom from fear* (ketakutan).
4. *Freedom of expression* (mengemukakan pendapat).
5. *Freedom from want* (keinginan).

b. Maklumat Bangsa-Bangsa

Karena belum adanya pernyataan setuju dari beberapa negara (misalnya US), rencana dunia yang damai baru kelihatan dengan dikeluarkannya maklumat oleh bangsa-bangsa yang berserikat yaitu menyetujui isi *Atlantic Charter*. Maklumat bangsa-bangsa ini ditanda-tangani oleh Maxim Litvinov atas nama Soviet Rusia, FD.Rosevelt, Sir Winston Churchill dan TV Song dari Tiongkok pada 1 Januari 1942 di Washington (AS). Keesokan harinya ditambah 22 negara, sehingga 26 negara dengan 4 negara besar (tanpa Prancis) merupakan anggota pertama. Antara Juni 1942-Maret 1945 bertambah 21 negara sehingga menjadi 47 negara.

c. Maklumat Moskow

Karena belum adanya ketegasan mengenai dasar dari organisasi yang dirancang maka diadakan permusyawaratan di Moskow 30 Oktober 1943 antara Menlu V.Molotov (Rusia), Cordel Hull (AS), Anthony Eden (Inggris) dan Foo Ping Sjen (Tiongkok). Kali ini Prancis juga belum ikut serta. Karena ingin segera mewujudkan perdamaian, diadakan pertemuan antara Rosevelt, Stalin dan Churchil di Teheran 28 November-1 Desember 1943. Dalam pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan :

1. Organisasi negara yang dicita-citakan haruslah sesuatu yang baru.

2. Organisasi yang dimaksud harus didasarkan atas persamaan kedaulatan dari negara anggotanya. Setiap negara boleh menjadi anggota.

d. Usul-Usul Dumbarton Oaks

7 Oktober 1944 bertempat di Dumbarton Oaks (dekat Washington DC) dilakukan lagi perundingan antara AS,Inggris dan Tiongkok (nasionalis). Usulnya kerangka serta asas-asas organisasi dunia yang akan dibentuk Rosevelt, usulnya diberi nama *United Nations Organization*. Banyak yang tidak setuju, karena mengingatkan pada persekutuan bangsa-bangsa didalam perang (melawan Hitler), sehingga kurang mencerminkan cita-cita damai. Akhirnya disetujui juga di San Fransisco, sebagai tanda penghormatan pada Presiden Rosevelt yang meninggal dunia 3 pekan sebelum konferensi bangsa-bangsa di San Fransisco pada 25 April 1945.

Kerangka organisasinya adalah sebagai berikut

1. Majelis Umum (*general assembly*) beranggotakan wakil semua negara.
2. Dewan Keamanan (*security council*) terdiri atas 11 anggota dengan 5 tetap dan 6 tidak tetap (selama 2 tahun).
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (*economic and social counsil*).
4. Mahkamah Internasional (*International court of justice*).
5. Sekretariat, Kepaniteraan (*secretary general*).

e. Konferensi Yalta (Semenanjung Krimea)

Diadakan pada 4-11 Februari 1945 antara AS, Inggris dan Rusia mengenai harga suara dalam Dewan Keamanan. Dewan Keamanan harus mendapat 7 suara dari 11 negara anggota DK (dengan termasuk 5 anggota tetap secara bulat). Dalam konferensi tersebut juga diputuskan akan diselenggarakan konferensi suatu Muktamar Perserikatan Bangsa-Bangsa di San Fransisco pada 25 April 1945. Pada saat itu Prancis menolak sebagai pengundang, tetapi bersedia sebagai undangan (akan datang).

f. Konferensi San Fransisco

25 April 1945 di sebuah gedung komedi di San Fransisco telah berkumpul 50 negara, mewakili 85 % dari seluruh dunia. Ada penambahan dari pertemuan sebelumnya yaitu :

1. Perluasan wewenang MU dan dewan ekonomi.
2. Menambah hak-hak manusia agar lebih jelas lagi.
3. Peraturan perwalian.
4. Penetapan suara DK tetap seperti di Yalta.

Rancangan piagam telah diterima secara aklamasi pada 25 Juni 1945 dan ditandatangani pada 26 Juni 1945. Piagam PBB mulai berlaku 24 Oktober 1945 dan sejak saat itu diperingati sebagai Hari PBB (*United Nations Day*). Peserikatan Bangsa-Bangsa didirikan dengan tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan, mengembangkan hubungan bersahabat dan kerja sama antarbangsa dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial, kebudayaan dan kemanusiaan serta memajukan penghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Di samping itu juga menjadi pusat dalam merukunkan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama.

Dasar-Dasar PBB dalam menjalankan tugasnya, meliputi

a. Semua anggota PBB mempunyai kedaulatan yang sama.
b. Semua anggota PBB harus berusaha mematuhi ketentuan-ketentuan Piagam PBB dengan iktikad baik.
c. Semua anggota PBB harus memecahkan sengketa-sengketa antarbangsa dengan cara damai.
d. Semua anggota PBB harus menahan diri dari mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap negara lain.
e. Semua anggota PBB harus membantu PBB dalam tindakan yang diambil sesuai dengan piagam PBB.

Demikian beberapa hal yang dapat kita ketahui tentang kronologi dibentuknya PBB, dan dalam keanggotaaanya PBB bersifat terbuka bagi semua bangsa yang cinta damai yang mau menerima kewajiban-kewajiban seperti yang ditetapkan oleh PBB. Anggota asli

PBB adalah 50 negara. Suatu negara dapat diterima menjadi anggota jika disetujui oleh MU atas rekomendasi DK. Sekarang jumlah anggotanya 189 negara.

Presiden Obama di depan Sidang Umum PBB.
(ANP/EPA)

D. Badan-Badan Utama PBB

1. Dewan Keamanan (*Security Counsil*)

Organisasi ini merupakan organisasi terkemuka karena

a. memikul beban tanggungjawab yang utama mengenai keadaan dan perkembangan perdamaian serta keamanan internasional (pasal 24 ayat 1 Piagam PBB).
b. mengatur sedemikian rupa caranya sehingga tugas pekerjaan dapat berjalan terus-menerus (pasal 28 ayat 1 Piagam PBB).
c. MU tidak diperbolehkan mengurus perkara-perkara yang ditangani DK (pasal 12 Piagam PBB).
d. satu-satunya badan PBB yang mempunyai kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan yang menurut piagam PBB harus dilaksanakan.

e. berhak menyelidiki pertikaian atau situasi yang mungkin membawa pertikaian antara dua negara atau lebih.
f. DK dapat memutuskan langkah-langkah pemaksaan, pengenaan sanksi-sanksi ekonomi bahkan tindakan militer.

Anggota DK semula 11 negara, tetapi sejak disetujui MU pada 17 Desember 1963 dan mulai berlaku 31 Agustus 1965 berubah menjadi 15 negara. Anggota tetap adalah Cina, Prancis, Rusia, Inggris dan AS, sedangkan sisanya sebagai anggota tidak tetap dipilih oleh MU untuk masa jabatan dua tahun. Setiap anggota mempunyai satu suara, tetapi dalam pengambilan keputusan harus dengan persetujuan minimal 9 suara dari 15 anggota (diikuti 5 anggota tetap). Kalau ada anggota tetap yang tidak setuju, maka masalah yang terjadi tidak bisa dijadikan keputusan DK. Inilah yang disebut dengan **Hak Veto** (hak pembatalan), yaitu hak yang dimiliki anggota tetap DK PBB untuk membatalkan suatu keputusan yang diambil dalam sidang DK PBB. Merekalah yang pada hakekatnya memikul beban tanggung-jawab terhadap keadaan dunia yang damai.

Pedoman menjadi anggota tidak tetap DK PBB

1. Kegiatan sesuatu negara di lapangan usaha perdamaian Internasional.
2. Pembagiannya menurut lingkungan geografis, misalnya Asia Tengah, Eropa Barat, dan sebagainya.

Dewan Keamanan baru saja berhasil merumuskan **Resolusi No 1373** yang oleh banyak pihak dianggap sebagai resolusi paling komprehensif yang dapat dijadikan batu pijakan untuk menghadapi aksi terorisme global. Resolusi yang mengikat 189 negara itu mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk mencari, menghukum, atau mengekstradisi teroris yang ditemukan di wilayahnya. Resolusi itu juga mengundang negara-negara untuk tukar-menukar informasi mengenai jaringan teroris dan membekukan aset serta membendung dana, bahkan sepakat untuk membentuk sebuah komite, terdiri atas 15 anggota DK untuk memantau kepatuhan terhadap aturan-aturan itu.

2. Majelis Umum (*General Assembly)*

MU terdiri semua negara anggota (setiap negara mempunyai wakil maksimal 5 orang) dan merupakan badan musyawarah utama PBB dan mempunyai hak membicarakan dan membuat rekomendasikan segala hal di dalam kerangka piagam PBB. MU mempunyai kewenangan untuk memilih anggota-anggota tidak tetap DK, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Dewan Perwalian serta mengangkat Sekjen PBB atas rekomendasi DK. Sidang MU diadakan setahun sekali di New York tiap Selasa minggu ke 3 bulan September dan berlanjut sampai pertengahan Desember. Putusan diambil dengan suara terbanyak biasa, kecuali dengan suara terbanyak tertentu (mayoritas dua pertiga) untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Anjuran-anjuran mengenai usaha perdamaian dan keamanan internasional.
2. Pemilihan anggota-anggota tidak tetap DK.
3. Pemilihan anggota Dewan Ekonomi dan Sosial.
4. Urusan mengenai anggaran belanja.
5. Pengangkatan seorang Sekjen.

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*)

Badan ini berada di bawah pengawasan MU PBB, merupakan badan yang mengkoordinir pekerjaan ekonomi dan sosial PBB serta lembaga-lembanganya biasa yang dikenal sebagai keluarga PBB. Berkaitan dengan salah satu tujuan PBB yaitu kerjasama dalam rangka usaha membereskan masalah-masalah internasional mengenai ekonomi, sosial dan lain-lain. Menurut asas DES : masa damai itu bukanlah masa beristirahatnya senjata, melainkan masa bekerja yang konstruktif dan produktif.

Tugas DES adalah menyelamatkan manusia dari bencana kemelaratan, kemiskinan dan kesengsaraan hidup serta penindasan jiwa dan pikiran. Maksud dan tujuannya adalah hubungan damai dan persahabatan antarbangsa-bangsa berdasarkan asas persamaan derajad serta hak pribadi setiap bangsa.

DES anggotanya adalah 18 negara yang dipilih oleh MU selama 3 tahun dan dapat dipilih lagi. Suara yang diambil adalah suara terbanyak biasa dan bersidang tiga kali setiap tahun. Hasil-hasil DES diantaranya :

a. Sebuah UU Internasional tentang hak-hak kemanusiaan (*International Bill of Human Right*), guna menjalankan tugasnya, dibentuklah *Commission on Human Rights*
b. Kemerdekaan dalam hal pemberitaan (*Freedom of International*).
c. Ketentuan-ketentuan yang akan menjamin kedudukan minoritas yaitu golongan Warga Negara yang karena suku bangsa/agamanya merupakan golongan kecil dalam negaranya.
d. Larangan-larangan perbuatan yang disebut *genocide* yaitu pemusnahan suatu bangsa secara besar-besaran.

4. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*)

Dewan Perwalian terdiri negara yang dipercaya untuk menguasai daerah-daerah yang dulu dipercayakan kepada negara tersebut. ditambah anggota yang jumlahnya sama dengan negara pemegang perwalian tersebut. Tugas DP adalah mengawasi dan menyelidiki daerah perwalian dan menjalin kerja sama dengan DES. Selain itu dewan perwalian mempunyai wewenang : memutuskan bahwa PBB dapat meneruskan menjabat kepercayaan untuk mengawasi daerah perwalian tersebut.

5. Sekretariat (*Secretariate*)

Sekretariat melayani badan-badan PBB dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam menjalankan tugasnya, dipimpin oleh seorang Sekjen yang dipilih MU atas saran DK selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali. Seorang calon harus didukung minimal 7 suara (5 suara dari anggota tetap DK). Sekjen PBB yang pertama adalah Trygve Lie (Norwegia) 1945-1953, Dag Hammarskjold (Swedia) 1953-1961, U Thant (Birma) 1961-1971, Kurt Waldheim

(Austria) 1971-1982, Javier Perez De Cuellar (Peru) 1982-1992, Boutros Boutros Ghali(Mesir) 1992-1997 sebagai Sekjen ke-6, dan sejak 1997 sampai 2001 adalah Koffi Anan dari Ghana sebagai Sekjen yang ke-7. Pada 2002 dia terpilih lagi untuk jabatan kedua, dan berhasil memperoleh hadiah nobel perdamaian. Berikutnya Ban Ki Moon dari Korea Selatan (Januari 2007- Desember 2016), sejak 1 Januari 2017 adalah Antonio Guterres dari Portugal.

Sekjen memegang pimpinan atas seluruh administrasi PBB dan menjalankan putusan-putusan yang diambil PBB serta bertanggung jawab agar mesin administrasi dapat berjalan dengan baik dan benar. Anggaran belanja biasa PBB diajukan oleh Sekjen untuk direkomendasikan MU. PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai, dan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Biasanya berasal dari sumbangan negara anggota yang ditentukan oleh jumlah pendapatan nasional negara tersebut. MU telah menetapkan minim 0,01% dan maksimal 25% dari anggaran belanja PBB.

Berikut daftar 10 besar donatur di PBB tahun 2011 yang menyumbang lebih dari 1 %.

AS : 22 %
Jepang : 12,53 %
Jerman : 8,018 %
Britaniaraya : 6,604 %
Prancis : 6,123 %
Italia : 4,999 5
Kanada : 3,027 %
Spanyol : 2,968 %
Tiongkok : 3, 189 %
Meksiko : 2, 356 %
Negara lainnya 27, 797 %.

6. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Majelis Internasional merupakan badan kelengkapan kehakiman utama dari organisasi PBB di Den Haag (Belanda). Setiap negara yang bersengketa tidak selalu lapor MI, tetapi boleh lewat jalur :

a. Penyelesaian lewat saluran diplomasi.
b. *Good offices* (jasa baik).
c. *Mediation* (perantara).
d. *Consiliation* (lebih dari 1 negara).

Negara bukan anggota juga boleh minta pertolongan MI, atas usul DK. Tugas dan pedoman MI : Dalam memeriksa/menimbang suatu perkara/persengketaan MI menurut pada kehendak 2 pihak yang bersengketa dengan " Apa yang patut dan yang adil (*ex aequo et bono*) ". Adapun pedomannya sebagai berikut

a. Perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat umum/khusus.
b. Kebiasaan Internasional yang sudah diakui umum.
c. Asas-asas hukum yang berlaku diantara semua bangsa yang beradab.
d. Yurisprudensi dan pendapat-pendapat para ahli hukum kenamaan (*juristic woeks*).

Syarat-syarat sebagai Hakim MI

1. Hakim MI tidak diperbolehkan menjabat jabatan politik/administratif/ pekerjaan tetap yang lainnya.
2. Seorang hakim tidak dapat diberhentikan siapa pun, kecuali hakim-hakim lainnya dengan suara bulat.
3. Selama menjabat mereka memperoleh kekebalan diplomatik.
4. Berasal dari ahli-ahli hukum internasional dinegaranya.
5. Golongan orang terhormat dan bereputasi Internasional.
6. Berhak menjabat pekerjaan hakim tertinggi.

Jumlah hakim MI adalah lima belas orang dari lima belas negara dengan masa jabatan sembilan tahun. Tiap tiga tahun ada lima orang yang diganti dengan diundi, sehingga ada masa jabatan hakim

yang tiga tahun, enam tahun dan sembilan tahun. Putusan MI merupakan yang pertama sekaligus terakhir, yang berhak menetapkan adalah Ketua dan Panitera MI. Dalam sidangnya perlu dihadiri oleh 9 hakim. Dan MI dibagi atas beberapa majelis yang terdiri 3 hakim. Bahasa resmi yang digunakan adalah Inggris dan Prancis.

Demikian secara garis besar tentang organisasi Internasional yang ada di dunia. Selain itu ada juga beberapa organisasi Internasional yang berperan serta dalam PBB yaitu :

E. Organisasi -Organisasi Antarpemerintahan di bawah PBB

Merupakan badan-badan khusus yang didirikan berdasarkan perjanjian antara pemerintah satu dengan yang lain. Badan-badan ini tidak didirikan atas nama PBB, tapi terdapat hubungan operasional yang erat untuk kerja sama di lapangan internasional.

a. Di bidang komunikasi Internasional

- Persatuan pos sedunia (UPU).
- Uni telekomunikasi Internasional (ITU).
- Organisasi penerbangan sipil Internasional (ICAO).
- Organisasi metereologi sedunia (WMO).
- Organisasi konsultan antar negara tentang perhubungan laut (IMCO).

b. Di bidang sosial

- **Organisasi perburuhan Internasional (ILO).**
  Organisasi buruh internasional *(International Labour Organization)* adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. ILO didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian perjanjian Versailles setelah PD I.Organisasi ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir PD II. Tujuan ILO memperbaiki kondisi pekerja sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial di seluruh dunia.
- **Organisasi kesehatan sedunia (WHO).**
  World Health Organization adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan

bermarkas di Jenewa, Swis pada 7 April 1948. Tujuan WHO adalah agar semua orang mencapai tingkat kesehatan tertinggi yang paling memungkinkan. Tugas utama WHO adalah membasmi penyakit, khususnya penyakit menular yang sudah menyebar luas.

c. Di bidang ekonomi/keuangan

- **Organisasi bahan makanan dan pertanian (FAO).**

  Food and Agriculture Organization (FAO) adalah sebuah organisasi dunia yang menangani masalah makanan dan pertanian (pangan). Organisasi ini bergerak dibawah kepemimpinan PBB. Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 di kota Quebec, Kanada. Kemudian pada tahun 1951 kantor pusat FAO dipindahkan dari Washington DC ke, AS ke Roma, Italia.

  Tujuan FAO

  1. Menaikkan tingkat nutrisi dan taraf hidup
  2. Meningkatkan produkai, proses, pemasaran dan penyalularan produk pangan dan pertanian
  3. Mempromosikan pembangunan di pedesaan
  4. Melenyapkan kelaparan.

  Sejak tahun 2005 anggota FAO 189 anggota (188 negara dan 1 Komunitas Eropa).

- **Dana Moneter Internasional (IMF).**

  International Monetary Fund adalah organisasi internasional yang beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional,memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. IMF bermarkas di Washington dan dibentuk pada tahun 1944 dalam konferensi Bretton Woods kemudian diresmikan tahun 1945 dengan anggota 29 negara.

- **Bank Internasional untuk pembangunan dan pengembangan (IBRD).**

  IBRD adalah bank internasional untuk pembangunan dan pengembangan. Sering disebut dengan nama Bank Dunia *(World Bank).* Didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 dan berkedudukan di Washington. Tujuannya memberikan bantuan kepada negara-negara yang mengalami kerusakan akibat PD II dan memberikan bantuan kepada negara yang membangun (kredit jangka panjang).
- Koorporasi keuangan Internasional (IFC).
- Perhimpunan Pembangunan Internasional (IDA).

d. Di bidang kebudayaan dan iptek

- Badan energi atom Internasional (IAEA).
- **Badan yang bergerak dalam pendidikan dan kebudayaan (UNESCO).**

  Didirikan pada tanggal 16 November 1945 melalui konstitusi UNESCO bekerja untuk menjaga perdamaian dan pembangunan manusia melalui perannya sebagai lembaga utama internasional untuk pendidikian, ilmu pengetahuan, budaya dan komunikasi. UNESCO berfungsi sebagai laboratorium ide mengantisipasi dan mendefinisikan tantangan yang muncul dalam lingkup yang dimandatkan pendidikan, ilmun pengetahuan, budaya, informasi dan komunikasi.Sekarang anggotanya 195 anggota tetap.

F. Organisasi -Organisasi Nonpemerintah

1. Berkepentingan sangat di dalam kebanyakan usaha Dewan Ekonomi dan Sosial dan sangat erat pula hubungannya dengan kehidupan ekonomi dan sosial dari daerah -daerah yang mereka wakili masing-masing. Misalnya kamar dagang dan industri Internasional, federasi dunia uni perdagangan, uni antar parlemen.
2. Bertujuan khusus dan berkepentingan dalam beberapa hal saja dari usahanya DES : Biro Kepanduan Internasional, organisasi

wartawan internasional dan perhimpunan ahli-ahli hukum demokratis internasional.

G. Organisasi - Organisasi Kawasan

- **ASEAN**

  ASEAN adalah *Association of South East Asia Nations* disebut juga dengan Perbara merupakan singkatan dari Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Filipina. Tujuan Utama ASEAN diantaranya :

  a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
  b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum
  c. Meningkatkan kerja sama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi
  d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarama latihan dan penelitian
  e. Meningkatkan penggunaan pertanian, industri, perdagangan, jasa dan meningkatkan taraf hidup.
  f. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional.

  Sekarang anggota ASEAN menjadi 10 selain lima anggota pendiri ditamnbah Brunei Darussalam (7 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos (23 Juli 1997), Myanmar (23 Juli 1997) dan Kamboja (16 Desemebr 1998). Sampai saat ini peran ASEAN sangat besar bagi negara anggotanya.

- **OKI**

  OKI adalah Organisasi Konferensi Islam merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid Al Aqsha. Saat itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia

Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds. OKI lahir melalui KTT 22-25 September 1969 negara-negara Islam di Rabat Maroko. Keanggotaan OKI adalah negara-negara Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Tujuan OKI:

1. Mengumpulkan bersama sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengkonsolidasikan segenap upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama guna memajukan perdamaian dan keamanan dunia muslim
2. Memperkokoh solidaritas Islam diantara negara anggotanya
3. Memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek.

Prinsip-prinsip OKI

1. Persamaan mutlak antara negara-negara anggota
2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri lain
3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara
4. Penyelesaian setiap sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi atau arbitrasi.
5. Abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdfekaan politik sesuatu negara.

- **AFTA**

  Organisasi ini dibentuk pada waktu KTT ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASWAN dengan

menjadikan ASWAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993 – 2008), kemudian dipercepat tahun 2003 dan terakhir dipercepat tahun 2002.

- **Uni Eropa**
  Semula bernama Masyarakat Ekonomi Eropa didirikan sebagai sarana pemersatu di bidang ekonomi. Merupakan organisasi internasional yang diciptakan oleh Perjanjian Roma 25 Maret tahun 1957 untuk mewujudkan integrasi ekonomi. Awalnya hanya beranggotakan enam negara yaitu Belgia, Jerman Barat, Perancis, Italia, Luxemburg dan Belanda. Sejak tahun 1992 berganti nama menjadi Uni Eropa karena adanya peningkatan kerjasama yang semula hanya dalam bidang ekonomi kemudian berkembang menjadi kerjasama dalam bidang politik dan sosial.

- **APEC**
  Asian Pasific Economic Coorporation dilatarbelakangi oleh perubahan Uni Soviet dan Eropa Timur, muncul kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Negara-negar APEC adalah Australia, Brunei Darusalam, Canada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, AS, China, Hongkong, Mexico, Chili, Peru, Papua New Guinea, Rusia, Vietnam dan Mongol.

  Tujuan APEC

  1. Mengupayakan terciptanya liberalisasi perdagangan dunia melalui pembentukan sistem perdagangan multilateral yang sesuai dengan kerangka GATT dalam rangka memajukan proses kerjasama ekonomi Asia Pasific dan perampunagn atas perundingan Putaran Uruguay.
  2. Membangun kerjasama praktis dalam program-program kerja yang difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan kajian-kajian ekonomi leberalisasi perdagangan, investasi, alih teknologi dan pengembangan SDM.

Sesuai kepentingannya APEC telah mengembangakan menjadi masyarakat Asia Pasific dengan petumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata melalui kerjasama perdagangan dan ekonomi. Dengan visinya yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan, usaha kerjasama untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dari perubaha-perubaha, pertukaran barang, jasa, investasi secara bebas, perumbuhan ekonomi dan standar hidup serta pendidikan yang lebih baik, serta pertumbuhan yang berkelanjutan dan berwaasan lingkungan.

- **OPEC**

Organization of The Petroleuum Exporting Countries diprakarsai oleh Venezuela dengan mendekati Iran, Arab Saudi,Gabon, Libya, Kuwait, Irak tanggal 14 September 1960. Didirikan untuk menggabungkan dan mengkkordinasi kebijakan-kebijakan dari negara-negara anggota sebagai kelanjutan dari yang telah dilakukan. Negara anggotanya Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Venezuela, Nigeria, Aljazair, Qatar, Libya, UEA dan Indonesia.

Tujuan OPEC

Setelah lebih dari 40 tahun berdiri OPEC telah menerapkan berbagai strategi dalam mencapai tujuannya yaitu melalui :

1. Koordinasi dan unifikasi kebijakan perminyakan antar negara anggota
2. Menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota
3. Menerapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga
4. Menjamin income yang tetap bagi negar-negara produesn minyak
5. Menjamin suplai minyak bagi konsumen
6. Menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil

Status keanggotaan Indonesia di OPEC sejak tahun 1962 telah ikut berperan aktif dalam penentuan arah dan kebijakan OPEC, khususnya dalam rangka menstabilkan jumlah produksi dan harga minyak di pasar internasional. Namun akhir-akhir ini keanggotaan Indonesia menjadi perdebatan karena sat ini telah menjadi negara pengimpor minyak. Dalam kaitan ini Indonesia telah mengkajinya, meski OPEC sendiri belum ada tuntutan untk mengkaji keanggotaan Indonesia karena peran Indonesia dan sebagai satu-satunya anggota OPEC di Asia.

- **NATO**

  North Atlantic Treaty Organization merupakan organisasi internasional yang menekankan dalam bidang pertahanan (militer) di negara-negara Atlantik Utara. Ini dibentuk dengan tujuan untuk membendung gerakan komunis yang merajalela di negara-negara Eropa Barat setelah selesainya PD II. Yang bergabung adalah AS, Inggris, Belanda, Belgia, Canada, Perancis, Italia, Luxemburg, Norwegia, Denmark, Portugal dan Eslandia. Dibentuk 4 April 1949 di Belgia. Tujuan lain NATO adalah

  1. Menyelesaikan sengketa secara damai
  2. Menghapuskn sengketa politik ekonomi internasional
  3. Menghindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional
  4. Saling membantu dan membela negara yang tergabung dalam anggota NATO yang memperoleh serangan dari negara lain karena menyerang satu negara NATO adalah seolah-olah menyerang seluruh anggota NATO.

H. Rangkuman

Organisasi Internasional terbentuk sebagai konsekuensi dari terjadinya asosiasi dalam hubungan antar bangsa. Organisasi itu dapat merupakan hubungan antar pemerintahan maupun antar non pemerintahan. Diantara berbagai organisasi internasional, sampai saat ini, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap menjadi sarana dan barometer utama bagi negara-negara di dunia dalam mengembangkan

kepentingan-kepentingan global. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam siding-sidang PBB menjadi pedoman dalam pengaturan Sistem Internasional.

I. Latihan dan Tugas :

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas !

1. Apakah pengertian lembaga/organisasi internasional ?
2. Bagaimana caranya supaya PBB tidak bernasib sama dengan LBB ?
3. Apakah yang dimaksud dengan organisasi antarpemerintahan ?
4. Diskusikan dengan rekan Anda keberadaan PBB dewasa ini, hasilnya diserahkan untuk dibahas bersama dalam kelas.

Carilah organisasi yang ada di sekitar kawasan Indonesia dan dunia. Tulis secara garis besar dalam bentuk laporan singkat, peran organisasi terbut bagi Indonesia.

BAB IV
INTERAKSI INTERNASIONAL DALAM POLITIK INTERNASIONAL

Kompetensi Dasar

Menjelaskan mekanisme interaksi dalam politik internasional

Indikator Pencapaian

1. Mendeskripsikan mekanisme politik internasional.
2. Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi interaksi politik internasional

MATERI

A. Politik Internasional sebagai Kajian Utama Hubungan Internasional

Kajian Hubungan Internasional (HI) berangkat dari realitas bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama, negara-negara (nation-state) tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global. Negara-negara di dunia tersebut adalah merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum memiliki kedaulatan atas wilayah tertentu. Dalam hal ini, Hubungan Internasional adalah interaksi antarnegara yang sangat dipengaruhi oleh konsep, nilai, kepentingan nasional, dan ideologi nasional, bukan oleh suatu ketentuan hukum universal dan aneka peraturan yang berlaku untuk semua aktor. Penekanan pada analisis perseptual ini didasarkan pada keyakinan bahwa perbedaan dalam tujuan dan persepsi nasional adalah pangkal tolak dari berbagai pertentangan dan konflik internasional, seperti pertentangan antara Timur dan Barat, atau konflik Utara dan Selatan.

Berangkat dari asumsi di atas maka analisis yang disampaikan, mendudukkan negara-bangsa sebagai aktor utama dalam hubungan

internasional, setting dalam interaksi internasional, politik luar negeri dan pola determinannya, dan proses pembuatan kebijakan luar negeri. Konsep-konsep kuncinya adalah politik luar negeri, kebijakan luar negeri, dan politik intenasional.

Secara makna bahasa, istilah hubungan internasional mengandung definisi yang sangat luas dan terkadang sangat tidak definitif dan abstrak. Memahami HI berdasarkan makna bahasa sering mengaburkan kajian akademik HI. Sebagai contoh saja, HI dimaknai sebagai interaksi yang terjadi antarbangsa (inter-nation), maka implikasi dari definisi tersebut dapat diintepretasikan sangat luas. HI bisa saja dua negara yang bertikai seperti Israel dan Libanon, hubungan dagang antareksportir, kompetisi olah raga internasional, konggres dunia bidang pendidikan, kontes Miss Univers, atau bahkan interaksi yang terjadi antara penduduk lokal dan turis asing. Jika kita memahaminya seperti tersebut di atas maka kita akan mengalami kebingungan sebagai akibat dari bias intepretasi dari definisi HI itu sendiri. Untuk itu, perlu batasan akademik yang jelas untuk mempertegas apa yang menjadi inti dan ruang lingkup HI.

Dr. E. Raymon Platig menjelaskan bahwa kajian akademik HI muncul dan berkembang seiring meningkatnya tekanan di antara negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sebagai akibat terjadinya : (1) revolusi senjata perang dari meriam hingga senjata nuklir, (2) multifase dari revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga meningkatkan saling ketergantungan antarumat manusia, (3) meningkatnya kekuatan komunis, dan (4) munculnya revolusi anti kolonialisme yang melahirkan negara-negara baru di Asia dan Afrika. Prakondisi tersebut mengarahkan studi HI pada distribusi kekuasaan di antara negara-negara power centers, sehingga inti HI adalah interaksi antarpemerintahan dari negara-negara yang berdaulat. Bentuknya dapat berupa hubungan diplomatik, militer dan ekonomi. Ruang lingkup HI meliputi semua aksi dan interaksi pemerintah dalam sistem politik multinasional (politik internasional) termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan.

HI menjadi politik internasional apabila hubungan-hubungan yang kompleks itu berkaitan dengan tujuan-tujuan resmi pemerintah, dan atau hubungan-hubungan itu diterapkan oleh pemerintah sebagai alat dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan militer. Artinya, kompetisi olah raga internasional, konggres dunia bidang pendidikan, konser kesenian dunia, dan sebagainya, akan menjadi bagian dari politik internasional jika digunakan untuk kepentingan negara (kepentingan nasional). Politik internasional memusatkan perhatian pada deskripsi kepentingangan (national interest) dan unsur-unsur kekuatan (capability) suatu negara, mencakup proses kebijakan luar negeri dan politik luar negeri sehingga terjadi interaksi.

Menurut Morgenthau, politik internasional merupakan *struggle for power*, suatu perjuangan dan persaingan untuk memperoleh kekuasaan. Untuk memenangkan pertarungan itu perlu teknik dan strategi yang tepat melalui politik luar negeri. Politik luar negeri (*foreign politics*) merupakan teknik dan strategi utama yang digunakan dalam pembuatan kebijakan luar negeri, seperti politik pembendungan yang dijalankan Amerika Serikat, politik bebas-aktif yang dijalankan Indonesia, dan sebagainya. Politik luar negeri merefleksikan persepsi nasional (persepsi ancaman yang menentukan siapa lawan dan kawan) suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya.

Politik pembendungan yang dijalankan AS adalah untuk membendung gerakan komunis Uni Soviet dan Cina yang dianggap sebagai ancaman/musuh bagi AS. Politik bebas-aktif dijalankan Indonesia karena konsep ancaman bagi Indonesia adalah berasal dari Utara, tetapi tidak dijelaskan negara atau kelompok ideologi mana yang menjadi lawan, sehingga pola hubungan lebih ditentukan interaksi aktif, selama negara di Utara tidak secara langsung merugikan/menyakiti, maka hubungan luar negeri dapat tetap dilakukan.

Roger Hilsman, seorang ilmuan politik dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS, seperti dikutip Choplin menerangkan sifat politik luar negeri sebagai berikut :

> Politik sering merupakan penjumlahan dari sekumpulan tindakan yang terpisah-pisah atau yang secara samar terkait. Di lain pihak tidak mudah menjumlahkannya bahkan kompromi di antara berbagai tujuan yang berbeda yang secara internal tidak konsisten atau campuran dari berbagai alat alternatif yang saling bertentangan dalam mencapai tujuan ... pemerintah tidak membuat keputusan untuk melahirkan zaman nuklir, tetapi membuat bom atom sebelum musuh mendahuluinya ... Perubahan-perubahan kebijakan tampaknya muncul melalui serangkaian modifikasi sederhana dari kebijakan-kebijakan yang telah ada, secara perlahan dan tersendat-sendat melalui tahapan sederhana yang biasanya bersifat tentatif, proses trial and error, bergerak menuju serangkaian tahapan yang lebih tinggi, bukan melalui keputusan-keputusan besar yang didasarkan pada alternatif yang luas.

Politik luar negeri diaktualisasikan dalam bentuk tujuan dan tindakan yang ditentukan oleh masing-masing negara. Secara umum, objek yang menjadi kajian politik internasional juga merupakan kajian politik luar negeri, dimana keduanya menitikberatkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur power. Suatu analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan merupakan kajian politik luar negeri, dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain. Hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

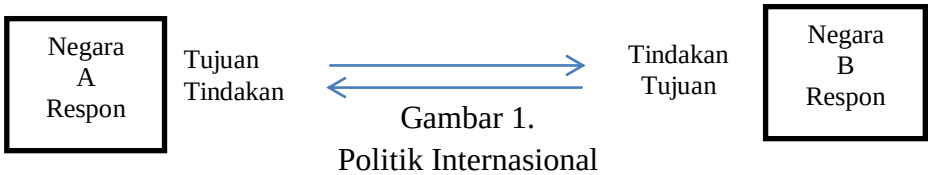

Gambar 1.
Politik Internasional

B. Negara Sebagai Aktor Utama Dalam Politik Internasional

Secara umum kita mengenal dua aktor kunci dalam HI, yaitu *governmental organization* (GO) dan *non-gevernmental organization* (NGO). *Governmental Organization* disebut juga sebagai *state actor* (aktor negara) menunjuk pada negara sebagai wilayah komunitas politik seperti AS, Inggris, Malaysia, Vietnam dan sebagainya. *State actor* menekankan pada peran negara-bangsa sebagai aktor dominan dalam interaksi antarnegara, dengan berbagai alasan, yaitu:

1. Negara merupakan representasi bentuk modern dari negara-bangsa sebagai unit analisis dalam HI. Studi tentang HI adalah studi tentang interaksi antar unit tersebut.
2. Negara dipandang sebagai kesatuan aktor (*unitary actor*), artinya pemerintah suatu Negara berbicara dalam satu suara untuk Negara secara keseluruhan.
3. Negara sesungguhnya merupakan actor rasional, bahwa setiap kebijakan luar negeri yang diputuskan oleh pemerintah telah dipertimbangkan keuntungan dan kekurangannnya melalui proses pembuatan kebijakan pemerintah.
4. Isu-isu utama HI adalah keamanan nasional (*national security*). Fokus utamanya pada aktual dan potensial konflik diantara negara-negara di dunia. Tiap-tiapnegarasenantiasa berusaha mengatur dan mencegah kemungkinan terjadinya kekerasan di wilayah teritorialnya yang disebabkan infiltrasi asing.

Non governmental organization menunjuk pada aktor non negara (*non state actors*) yang ikut terlibat dalam HI. Aktor non Negara tersebut meliputi :

- Organisasi Administrasi Internasional (seperti : PBB dan badan-badannya).
- Organisasi Supranasional (seperti : Uni Eropa).
- *Transnasional Corporations*/TNC (seperti: Newmont, General Motor, WBC, Freeport Corp, dansebagainya).
- Organisasi swa daya internasional (seperti : International Red Cross, WWF, Greenpeace, dan sebagainya).

Muncul dan berkembangnya aktor non negara banyak dipengaruhi dan tidak terlepas dari perubahan demografi dan sumberdaya, *post industrial order*, danrevolusi elektronik mikro. Perubahan demografi dan sumberdaya ditandai dengan terjadinya ledakan tingkat kelahiran yang mengakibatkan ledakan jumlah penduduk sehingga terjadi eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran melalui proses industrialisasi yang menekankan pada produksi barang-barang primer dalam skala masal. Selain itu, munculnya tatanan baru Hitler dan lingkaran persemakmuran Jepang, meningkatkan ketegangan diantara Negara maju. Kengerian perang menciptakan idealism mengenai rencana-rencanabagi adanya dunia pasca perang yang lebih baik sehingga menggerakkan Liga Bangsa-Bangsa untuk menciptakan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia untuk memajukan standar hidup yang lebih tinggi, kesempatan kerja penuh, dan kondisi-kondisi kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial bagi seluruh kawasan Asia, Polynesia, Afrika dan Amerika Selatan.

Satu hal penting dari adanya industrialisasi adalah munculnya tatanan post industrial (fokus utamanya pada dinamika teknologi) yang berasosiasi dengan revolusi elektronik mikro (perkembangan media komunikasi mikro yang kekuatannyamelampaui batas-batas teritorial negara).Realitas tersebut membawa HI dalam kompleksitas hubungan yang hampir tidak mungkin untuk diurai, dan terkadang memperlemah peran negara. Namun demikian, aktornegaratetaptidak dapat diabaikan dalam percaturan internasional sebab belum tentu pula aktor-aktor non negaraitutidakmembawaaspirasidan kepentingan negara. Sebagai contoh, donasi baik berupa bantuan maupun investasi yang dilakukan TNC bias saja membawamuatan aspirasidan kepentingan negara tertentu tempat TNC itu berasal.

Gambaran di atas menunjukkan perubahan dan perkembangan struktur global dalam Hubungan Internasional yang diwarnai pergeseran-peran Negara dalam sistem internasional, tetapi bagaimana pun tidak menghapus keberadaan Negara sebagai aktor utama dalam HI.

Negara sebagai aktor HI menyangkut cara negara tertentu berperilaku sebagai aktor dalam politik internasional. Perilaku negara

dimanifestasikan dalam bentuk tindakan-tindakan kebijakan luar negeri. Tindakan tersebut meliputi sikap-sikap atau pernyataan yang ditunjukkan oleh para pembuat kebijakan/keputusan (*decision maker*), melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pembuat kebijakan melalui proses pembuatan keputusan suatu negara, dan ataupun reaksi "spontan" yang ditunjukkan atau dilakukan oleh pembuat kebijakan dan/atau unsur kemasyarakatan lain dalam suatu negara dalam upaya merespon berbagai kejadian atau perubahan yang terjadi di lingkungan internasional.

Hal itu menunjukkan bahwa tindakan negara mewakili tiga peringkat analisis yang berbeda dalam politik internasional. Masing-masing komponen bisa jadi tumpang tindih dan belum tentu mampu memberikan basis analisis yang luas karena dihadapkan pada dua karakter aktor yang berbeda, yaitu antara negara dan organisasi antarpemerintah. Dibutuhkan kecermatan yang tinggi dalam menilai tindakan mana yang merupakan representasi sikap negara dan mana yang bukan, karena sulit untuk membuat garis batas yang jelas. Inti sebuah negara adalah organisasi pemerintahannya dan pemerintah menjalankan fungsi integrasi suatu negara, tetapi ada kalanya keduanya memberikan representasi yang berbeda terkait masalah internasional, misalnya saja ketika pemerintah Inggris mendukung serangan AS ke Afganistan meskipun mayoritas rakyatnya tidak mendukung.

Hal yang harus ditekankan di sini, bahwa politik dihasilkan oleh manusia, walaupun orang-orang tersebut mungkin memegang peran politik yang luar biasa. Pusat perhatian utamanya adalah orang-orang yang memegang peran dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, yaitu orang-orang yang memiliki tanggung jawab resmi dan pengaruh aktual dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut keterlibatan negaranya dalam pergaulan dunia. Apabila kita mempertanyakan mengapa negara berperilaku seperti itu, maka kita harus mempertanyakan mengapa para pemimpin negara tersebut membuat keputusan seperti itu. Namun demikian para pengambil keputusan luar negeri tidak bertindak sembarangan sebab bagaimanapun juga para pengambil keputusan dihadapkan pada

tanggung jawab kepada orang lain, ditekan oleh beragam kondisi, dan dipaksa untuk membuat keputusan.

C. *Setting* Interaksi Internasional

Dalam interaksi antarnegara tersebut terdapat setidaknya lima faktor kondisi yang melatarbelakangi atau biasa disebut *setting for international interaction*, meliputi :

1. Letak geografis
2. Keterkaitan sosial, ekonomi, danpolitik
3. Keterkaitan teknologi dan keberadaan sumber daya alam.
4. Ada tidaknya kesepakatan atau persetujuan aliansi.
5. Keterkaitan dengan masalah-masalah yang muncul dalam isu-isu internasional.

D. Pola Hubungan dalam Interaksi Politik Internasional

Politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Studi politik luar negeri kerapkali beranggapan bahwa faktor-faktor domestik sama kuatnya mempengaruhi *out put* politik luar negeri. Semua itu merupakan wujud upaya negara dalam meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) di kancah politik internasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa relasi-relasi politik internasional menekankan pada posisi ekonomi politik aktor dalam stratifikasi sistem global. Galtung menggambarkan sistem politik internasional mirip dengan sistem feodal yang terdiri dari negara besar alias "*top dog*", negara menengah, dan regional, serta negara berkembang atau negara "*underdog*" yang lebih kecil. Dalam konteks klasifikasi ekonomi dikenal negara maju (*developed country*), negara berkembang (*developing country*), dan negara tertinggal (*under developing country*). Walaupun sering dikritik bahwa istilah-istilah tersebut dianggap sangat tendensius dan diskriminatif, namun secara substantif tidak terhindarkan dalam hubungan internasional. Masing-masing negara senantiasa terdorong untuk mengabsorbsi kekuatan-kekuatan

internal dan eksternal sebagai bagian dari strategi bertahan (*survival*) dan mempengaruhi (*influence*) guna mempertegas eksistensi dirinya di kancah perpolitikan regional maupun global.

Power (kekuasaan) adalah tujuansemua tindakan-tindakan negara dalam politik internasional. Negara-negara di dunia berlomba-lomba mengembangkan kapasitas kekuasaan tidak dalam arti agar menjadi yang paling berkuasa, tetapi lebih untuk meminimalkan pengaruh negara lain terhadap negaranya. Kalaupun tindakan-tindakan negara itu pada akhirnya bermuara pada kesempatan-kesempatan mengembangkan pengaruh negaranya terhadap negara lain, itu lebih merupakan konsekuensi dari adanya pelembagaan sosial. Dengan kata lain, *power* (kekuasaan) dapat diartikan setidaknya dalam tiga konteks, yaitu :

1. Independensi (kemandiriaan)
   Negara yang memiliki power adalahnegara yang mandiri. Dalam arti negara yang memiliki kapabilitas nasional yang cukup besar untuk melakukan tindakan-tindakan politik luar negeri tanpa adanya penetrasi kekuatan lain yang mendorong atau pun yang menghalanginya. Kemampuan atau kapabilitas nasional yang kokoh merupakan tumpuan utama negara-negara yang independen.
2. Dependensi (ketergantungan)
   Negara yang memiliki *power* adalah negara yang dapat mempengaruhi negara lain. Artinya, dengan kapabilitas nasional yang dimiliki dan kapasitas politik yang memadai mampu memaksa negara lain untukmelakukanatautidak melakukan politik luar negerinya. Pengaruh itu mendorong negara-negara lain untuk tidak dapat melepaskan diri karena tidak memiliki kapabilitas nasional yang cukup besar untuk dapat mengimbangi kapasitas politik yang ada.negara-negara dengan kapabilitas nasional yang kecil (lemah) cenderung menjadi bergantung pada negara-negara dengan kapabilitas yang besar (kuat).
3. Interdependensi (saling ketergantungan)
   Negara yang memiliki *power* adalah negara yang memiliki kontribus itawar yang seimbang. Artinya, kapabilitas nasional

yang dimiliki dapat diagregasikan/disatukan dengan kepentingan-kepentingan politik luar negeri tertentu sehingga menghasilkan kapasitas politik yang saling menguntungkan. Asas pertukaran menjadi dasar utama.Pada prinsipnya setiap Negara berpotensi mempengaruhi negara lain, hanya derajat pengaruhnya yang berbeda-beda sehingga kapabilitas nasional yang tidak besar tidak berarti tidak dapat mempengaruhi negara lain. Justru proses tawar-menawar yang terjadi membawa pada posisi yang seimbang (*equilibrium*) dan saling bergantung.

Tindakan masing-masing Negara dalam mengaktualisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan perjuangan kekuasaan (*struggle for power*). Masing-masing bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan moral politiknya untuk mencapai konteks kekuasaan yang diharapkan. Memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan merupakan inti dari perebutan kekuasaan, sehingga semua tindakan-tindakan negara yang mengarah pada usaha pencapaian tujuan tertentu disebut sebagai *struggle of power*. Tindakan Malaysia yang baru mengajukan masalah sengketa kepulauan Sipadan-Ligitan ke Mahkamah Internasional pada 2002-padahal sengketa telah terjadi sejak tahun 60-an-merupakan bagian dari upaya Malaysia untukmewujudkan tujuan menjadikan kepulauan tersebut diakui menjadi bagian Malaysia.

E. Rangkuman

Politik internasional merupakan pola interaksi antar unsur (pemerintahan) suatu negara yang melibatkan unsur-unsur intelektualitas, psikologis, dan organisasional suatu negara. Unit analisisnya adalah negara.Tinjauan utama dalam politik internasional adalah adalah perilaku dan tindakan negara. Perilaku dan tindakan Negara diwujudkan dalam bentuk kebijakan luar negeri atau keputusan politik luar negeri. Orientasi kebijakan luar negeri adalah pada proses dan keputusan.

F. Latihan dan Tugas

1. Coba jelaskan kaitan antara hubungan internasional dan politik internasional. Keduanya merupakan unsur yang sama, berbeda, ataubagaimana ?
2. Bagaimanakah Anda membedakan antara politik luar negeri, kebijakan luar negeri, dan politik internasional ?
3. Tuliskan sebanyak-banyaknya konsep-konsep dalam politik internasional dan kemudian definisikan.
4. Analisislah contoh kasus keputusan politik luar negeri Anda dengan menentukan jenis kebijakannya, faktor apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, siapakah yang menjadi penentu kebijakan, peluangdan kendalanya, dan sebagainya. Semakin mendetil akan semakin menarik.

BAB V
TINJAUAN TENTANG POLITIK DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Kompetensi Dasar

Menganalisis hubungan politik luar negeri dan kebijakan luar negeri.

Indikator Pencapaian

1. Menjelaskan pola determinan kebijakan luar negeri.
2. Menjelaskan proses kebijakan luar negeri.
3. Memberi contoh kasus tentang politik dan kebijakan luar negeri.

MATERI

A. Pola Determinan Politik Luar Negeri

Dalam studi politik internasional dua aliran/mahzab yang dominan adalah aliran behavioralis dan tradisionalis. Kaum behavioralis berorientasi pada masalah (*problem oriented*) dan menjadikan perilaku sebagai subjek atau inti studi. Bagaimana negara berperilaku ? merupakan fokus utama, sehingga analisisnya berpusat pada masalah kepentingan, kekuatan (*forces*), motivasi, dan pola aksi. Aliran tradisionalis berlandaskan pada sejarah, karenanya analisisnya bersifat realis berupa pengumpulan fakta. Keduanya berperan dalam memberikan pemahaman tentang perilaku negara ditinjau dari aksi/tindakan maupun setting atau hal-hal yang melatarbelakangi munculnya suatu tindakan.

Dalam penentuan tindakan politik luar negeri ada empat faktor yang terlibat (*determinan factors*), yaitu : perilaku pembuat keputusan (*decision maker behavior*), politik dalam negeri (*domestic politics*), kondisi ekonomi-militer (*economic-military factors*), dan konteks internasional (*international circumtances*). Pelaku politik luar negeri adalah para pembuat keputusan, tetapi tindakan politik luar negeri adalah hasil konsiderasi ketiga faktor lainnya yang mempengaruhi para pengambil keputusan politik luar negeri.

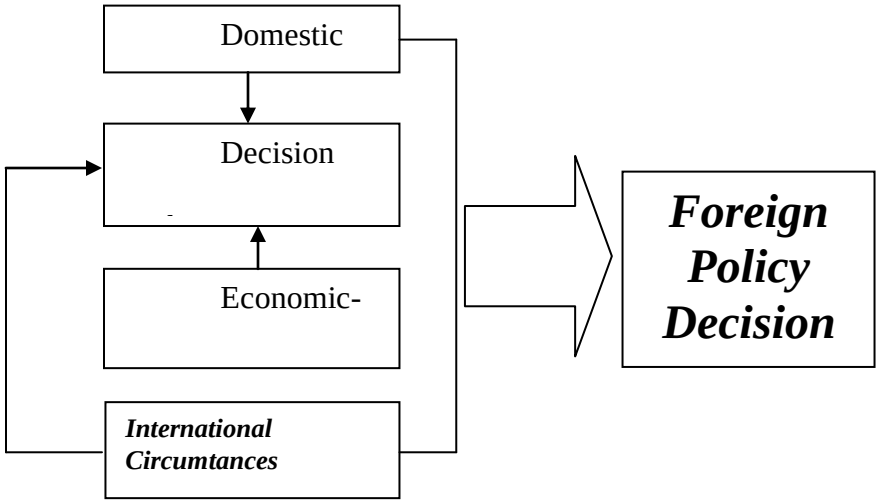

1. Perilaku Pembuat Keputusan

Keputusan politik luar negeri itu tidak terlepas dari faktor-faktor intelektual, psikologis, dan organisasional yang membentuk perilaku para pembuat kebijakan luar negeri. Ketiganya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri pembuat kebijakan luar negeri. Para pembuat kebijakan memiliki tiga ruang dalam membuat keputusan. **Pertama**, para pembuat keputusan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan intelektual yang menekankan aspek-aspek rasionalnya dengan cara mengeksplorasi berbagai kemungkinan rasional dalam memecahkan masalah berdasarkan kalkulasi dan perhitungan, dengan tujuan untuk memaksimalkan pemenuhan kepentingan nasional dan meminimalkan resiko terjadinya konflik ataupun pengeluaran biaya ekonomi dan militer (*ecomomic-military cost*)yang besar. **Kedua**, para pembuat keputusan adalah pribadi-pribadi yang tunduk pada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah mengembangkan konsep citra (*image*), kebanggaan (*self esteem*), sistem nilai dan ideologi, baik terhadap dirinya ataupun lingkungannya, termasuk dalam wujud gaya kepemimpinan. Kebijakan-kebijakan masa Presiden Soeharto berbeda dengan Presiden Soekarno, kebijakan masa Presiden Bush

berbeda dengan mantan Presiden Clinton, kebijakan masa Reza Shah berbeda dengan masa Ayatollah Khomeini, dan sebagainya. **Ketiga**, para pengambil keputusan sesungguhnya beroperasi menurut serangkaian peran yang terorganisasi. Seorang presiden, perdana menteri, menteri, atau siapapun tetap dipengaruhi oleh struktur organisaional umum tempat dia bekerja, yaitu melalui arus komunikasi dan interaksi sosial dalam organisasi tersebut. Karena jabatan presiden adalah jabatan politik maka sedikit banyak *platform* partai politik tempat dia berasal akan membentuk perilaku. Inggris, Australia, dan AS misalnya, orientasi kebijakan luar negerinya sangat dipengaruhi oleh *platform* partai politik kepala negaranya. Kepala negara yang berasal dari kaum ulama atau pemimpin agama, militer, atau didasarkan pada adat, maka perilakunya juga akan berbeda.

2. Politik Domestik

Politik domestik disebut juga politik dalam negeri merujuk pada fungsi integrasi negara dan penentuan tujuan negara sebagai tema sentral dalam politik luar negeri. Menurut Gabriel Almon, sistem adalah satu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya. Sistem politik merupakan organisasi tepat masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Dalam kaitannya dengan sumber-daya dan kebutuhan, sistem politik dapat mendorong perdamaian atau justru menyebabkan perang, meningkatkan perdagangan internasional atau membatasinya, membuka diri demi pertukaran gagasan atau menutup diri, menarik pajak secara adil atau tidak adil, mengatur perilaku masyarakat dengan ketat atau kurang ketat, pengalokasian sumber daya untuk kesejahteraan atau tidak, menciptakan rasa aman atau tidak, dan sebagainya.

Untuk melakukan berbagai kegiatan itu sistem politik memiliki lembaga-lembaga atau struktur-struktur yaitu kelompok kepentingan, partai politik, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan

birokrasi yang masing-masing memiliki fungsi normatif yang melekat.

1. Kelompok kepentingan, berfungsi sebagai artikulasi kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Sarana bagi masyarakat untuk menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, termasuk tentang apa yang ingin didapatkan dari politik.
2. Partai Politik, berfungsi sebagai agregasi atau penggabungan kepentingan dari berbagai macam kelompok kepentingan dalam masyarakat. Idealnya partai politik mampu menjembatani dan mereduksi konflik.
3. Legislatif, berfungsi sebagai salah satu penentu kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat (fungsi advokasi bagi rakyat terhadap berbagai kebijakan eksekutif yang mereduksi kebebasan warga negaranya).
4. Eksekutif, sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan demi tetap eksisnya suatu negara dan bangsa.
5. Birokrasi, berfungsi sebagai pelaksana dalam penerapan kebijakan.
6. Yudikatif, berfungsi sebagai *adjudication* (penghakiman) terhadap berbagai penyelewengan terhadap berbagai kebijakan yang telah diputuskan.

Oleh karenanya, dalam suatu sistem politik, individu dan kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi negara dan kemudian menerjemahkan kepentingan mereka itu kedalam keputusan politik yang otoritatif.Salah satu syarat yang sangat diperlukan agar sistem politik berfungsi efisien adalah penerimaan yang luas terhadap pengambilan keputusan (yang kemudian dinamakan konsensus).Jika konsensus semacam ini ada maka negara menjadi sah (*legitimate*). Legitimasi dan konsensus merupakan indikator kunci tentang efektivitas dan prestasi sistem, dan sebaliknya menunjuk adanya ketidakstabilan pokok yang dapat merusak. Pada akhirnya fenomena politik adalah masalah

kehendak dan kekuatan yaitu hubungan politik seperti apa yang dikehendaki.

Dalam menentukan kebijakan luar negeri, mekanisme sistem politik domestik merupakan sistem pengaruh kebijakan (*policy influence system*) karena sistem tersebut mempengaruhi para pengambil keputusan. Sistem politik domestik akan menentukan tujuan-tujuan formal negara yang menjadi referensi para pengambil kebijakan, agar kebijakan politik luar negeri tidak menimbulkan gejolak dalam negeri tetapi justru memperkuat fungsi integratif negara. Oleh karena itu setiap perjanjian internasional harus diratifikasi dalam politik nasional sebelum diimplementasikan atau dijalankan.

3. Kondisi Ekonomi-Militer

Dimensi ekonomi dan militer merupakan indikator dari kapabilitas atau kemampuan negara dalam mengembangkan kekuatan-kekuatannya di kancah pertarungan politik internasional. Secara historis, hubungan antara ekonomi dan militer terjadi sejak periode merkantilisme hingga periode modern sekarang. Pada periode merkantilisme hingga pascafeodal, sumber ekonomi pertanian memunculkan kelas-kelas borjuis yang bebas untuk menyediakan kekuatan militer. Pada periode klasik, emas mernjadi sumber kemakmuran dan sumber kemampuan militer, sedangkan periode modern, industrialisasi telah mengubah basik kemakmuran dan kemampuan militer pada pembangunan ekonomi. Kolerasi positif antara kemakmuran ekonomi dan kemampuan militer menentukan status negara tersebut sebagai negara kuat atau negara lemah. Pada negara-negara maju yang ditandai dengan tingkat kemakmuran yang tinggi memungkinkan pengembangan teknologi persenjataan baru untuk memperkuat militer negaranya.

Dua dimensi ekonomi yang relevan dengan penyusunan politik luar negeri adalah kapasitas produksi ekonomi yang didapat melalui pembangunan ekonomi dan kebergantungan ekonomi nasional pada perdagangan dan finansial internasional.

Perkembangan konstelasi politik internasional, mendorong semakin kuatnya tuntutan pembangunan ekonomi. Tujuan akhir pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan nasional keseluruhan penduduk, dan pada hakekatnya masalah pembangunan ekonomi adalah masalah meningkatkan taraf pendapatan nasional melalui peningkatan *out put* per kapita sehingga setiap individu mampu mengkonsumsi lebih banyak. Degan demikian pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu perbaikan sekular yang berkelanjutan dalam kesejahteraan material yang tercermin dalam arus barang dan jasa yang meningkat.

Rostow menunjukkan bahwa masyarakat pra-modern tidaklah statis. Manusia dan peradaban telah berevolusi dalam kurun waktu yang panjang maupun pendek. Oleh karenanya, pembangunan ekonomi merupakan tujuan kebijakan selama tahap benih dan masa tumbuhnya kapitalisme. Konsep politik masyarakatpun berubah dari *city states* menjadi *modern states* dengan memunculkan negara kebangsaan. Motif-motif feodalisme yang terjadi pada masyarakat pra modern terefleksi pada upaya perluasan produksi untuk tujuan-tujuan militer dan negara. Gagasan tentang kesejahteraan dan produksi ditujukan sebagai tujuan bagi kebijakan negara yang sah untuk diformulasikan dan disebarkan secara bertahap kedalam kehidupan politik dan kebijakan. Oleh karena itu, modernisasi menyebar dari Inggris ke negara-negara Eropa Barat lainnya, hingga ke seluruh dunia. Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi di setiap negara di dunia diprakarsai oleh campur tangan luar negeri dan dimotori nasionalisme reaktif. Rostow menggambarkan tahapan masyarakat negara dalam pembangunan ekonomi dalam lima tahap yaitu : masyarakat primitif tradisional, peradaban tradisional, masyarakat transisional, masyarakat revolusi industri, masyarakat konsumsi tinggi.

Kebergantungan pada perdagangan dan finansial internasional sering dipandang dari segi neraca pembayaran.

Banyak negara mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Hal itu disebabkan oleh rendahnya kapasitas produksi barang dan jasa yang dinilai secara internasional, tingginya standar hidup yang bergantung pada impor tanpa hasil ekspor yang memadai untuk menutupi biaya impor, dan keterlibatan swasta (investasi) dan negara (bantuan luar negeri) yang menyebabkan arus baru modal keluar. Kebergantungan kapital ini menghalangi negara sedang berkembang (didominasi negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan) mewujudkan penerimaan ekspor yang meningkat sebagai hasil lonjakan harga komoditi menjadi kekayaan materiil yang nyata. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, karena ketimpangan struktur produksi yang hanya memproduksi satu hingga tiga jenis komoditi. Kedua, perbedaan taraf hidup yang menonjol antara negara maju dan sedang berkembang, dalam jangka panjang akan melanggengkan ketimpangan. Ketiga, keharusan mempertahankan cadangan devisa dalam dolar dan sterling adalah pencerminan watak imperialisme sistem kapitalisme dunia. Keempat, sebagian komoditi ekspor negara berkembang, khususnya barang mineral, diproduksi oleh MNC atau investor asing.

Kekuatan ekonomi negara mendorong kekuatan militernya. Kapasitas militer dapat diukur melalui kriteria-kriteria berikut .

1. Jumlah personel, secara kuantitas menunjuk pada besarnya dan konsentrasi penyebaran anggota personel militer.
2. Tingkat pelatihan, menyangkut kemampuan masing-masing personel militer dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
3. Sifat perlengkapan militer, meliputi teknologi dan strategi militer.
4. Tingkat kebergantungan pada dukungan luar negeri, meliputi sumber kemampuan militer tersebut berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri. Beberapa negara menggunakan tentara asing dalam pertahanan negaranya (seperti : Timor Leste yang banyak menggunakan tentara dari Australia). Bisa juga mengenai pasokan senjata militer, dan sebagainya.

5. Kemampuan militer dalam memelihara stabilitas dalam negeri. Hal ini sesungguhnya merupakan tugas utama militer suatau negara, namun tidak sesederhana itu sebab kapasitas militer dalam menjaga stabilitas internal terkait pula dengan kapasitas ekonomi. Negara-negara dengan kapasitas ekonomi besar cenderung lebih mampu memelihara stabilitas dan integrasi nasionalnya, dibandingkan negara-negara dengan kapasitas ekonomi kecil. Kapasitas militer dalam politik internasional terkait pula pada ada tidaknya ancaman instabilitas internal.

Konsiderasi ekonomi dan militer merupakan alat politik luar negeri yang digunakan oleh penentu kebijakan dalam menjalankan politik luar negerinya. Implikasinya, kuat-lemah negara memberikan pengaruh pada strategi-strategi yang dijalankan para penentu kebijakan politik luar negeri.

4. Konteks Lingkungan Internasional

Fenomena yang terjadi di dunia internasional juga menentukan arah kebijakan negara. Keterkaitan negara dengan keadaan internasional adalah tentang upaya untuk mempertahankan diri, dan tuntutan untuk merespon masalah-masalah yang muncul melalui kebijakan luar negeri.

Dalam konteks geopolitik, setiap negara dibatasi oleh batas fisik berupa letak geografis dan batas wilayah. Meskipun tidak menduduki peran terpenting, aspek geografis memainkan peran politik luar negeri yang penting sebab hampir tidak mungkin suatu negara tidak mengindahkan atau tidak memperhatikan negara-negara disekitarnya (negara tetangga). Kondisi tersebut, menurut *Kautilya*, akan banyak mempunyai titik gesek yang dianggap sebagai musuh alami. Dengan asumsi bahwa negara-negara akan berusaha memperluas wilayahnya, Kautilya berargumentasi bahwa negara yang bertetangga selalu menjadi musuh, dan tetangganya tetangga akan merupakan sahabat, sehingga konsep citra (*image*) yang dibangun menentukan pola interaksi negara. Seperti hubungan antara Indonesia-Malaysia senantiasa mengalami

pergesekan dan krisis, sebab meskipun karakter sosial dan budayanya tidak jauh berbeda tetapi letak geografis yang berhimpitan akan senantiasa memunculkan konflik perbatasan. Meskipun politik internasional lebih kompleks dari itu, tetapi konsep tentang sahabat dan musuh akan tetap menjadi bagian dari interaksi antarnegara, mungkin tidak dalam konteks perluasan wilayah namun lebih pada perluasan pengaruh.

Masalah keterkaitan sosial, terkait mobilitas horisontal penduduk yang terjadi baik secara alamiah atau tidak, yang menembus batas-batas wilayah negara, seperti masalah TKI ilegal yang meresahkan beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura, muncul akibat masalah ketenagakerjaan yang tidak mampu diatasi oleh pemerintah Indonesia. Keterkaitan ekonomi dibangun oleh adanya arus perdagangan, baik perdagangan konvensional, perdagangan modal, atau pedagangan uang. Jaringan perdagangan tersebut secara tidak langsung membawa pada konsekuensi pergerakan ekonomi secara global. Sebagai contoh, krisis ekonomi yang terjadi di AS di pertengahan tahun 90-an telah berdambak pada perekonomian dunia. Demikian juga ketika nilai Dollar menguat atau melemah maka perekonomian negara-negara di dunia juga ikut terpengaruh. Keterkaitan politik, terkait kondisi dan kecenderungan agresivitas pemerintah yang berkuasa di negara sekitar. Negara Irak pada masa Presiden Saddam Husein dianggap sebagai pemerintahan yang agresif sehingga negara-negara disekitarnya seperti Kuwait mencari perlindungan secara politik dan militer pada negara-negara besar seperti AS.

Keterkaitan teknologi dan sumber daya alam terkait sumber-sumber daya alam primer yang pemanfaatannya tidak dapat dimonopoli dan penggunaan teknologi yang dianggap berdampak secara luas, misalnya tentang pemanfaatan aliran sungai yang melintasi beberapa negara seperti sungai Nil memerlukan campur tangan negara-negara di sekitar sungai dan perlu ada aliansi yang mengaturnya guna menghindari terjadinya konflik. Keterkaitan masalah dan isu internasional muncul terkait

isu-isu dominan dalam interaksi antarnegara, seperti isu tentang kemiskinan, terorisme, kerusakan lingkungan, pemanasan global dan sebagainya.

B. Proses Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Pada tingkat pembuatan keputusan sehingga menjadi suatu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah hasil dari pengambilan keputusan politik luar negeri. Terdapat tiga jenis keputusan politik luar negeri (kebijakan luar negeri), yaitu :

a. Kebijakan yang bersifat umum
   Kebijakan ini terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung. Kebijakan umum merefleksikan politik luar negeri yang dijalankan suatu negara. Sebagai contoh, keterlibatan AS dalam perang Vietnam, pembangunan pangkalan militer di Jepang, Filipina, dan dinegara lain, sebagai upaya membendung pengaruh komunisme.
b. Kebijakan yang bersifat administratif.
   Keputusan yang dibuat oleh anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya, diantaranya adalah Departemen Luar Negeri, dinas militer, dinas intelejen, Departemen Perdagangan, dan sebagainya. Kebijakan administratif dibatasi ruang, lingkup dan waktu, yaitu dalam hubungan dengan negara, masalah, dan jangka waktu tertentu, misalnya pemberian visa/ijin tinggal, kerjasama perdagangan, dan sebagainya.
c. Kebijakan yang bersifat krisis.
   Suatu kondisi paling sedikit satu negara merasa bahwa situasi merupakan titik balik dalam hubungannya dengan satu negara atau lebih.Ada perasaan mendesak dalam situasi tersebut yaitu mengakui adanya kebutuhan untuk membuat suatu keputusan dalam waktu singkat. Keputusan ini merupakan kombinasi dari keputusan yang bersifat umum dan administratif serta dapat muncul pada segala aktivitas, tetapi yang paling utama adalah

dalam bidang politik dan keamanan, misalnya, ketegangan perbatasan antara Malaysia dan Indonesia yang akhirnya menghasilkan kebijakan yang bersifat krisis.

Namun, kebijakan luar negeri merupakan campuran dari ketiga jenis kebijakan tersebut.Kebijakan umum digunakan sebagai pedoman bagi pengambilan keputusan yang besifat rutin dan krisis. Keputusan administratif juga bisa digunakan sebagai jalur yang menuju keputusan yang bersifat krisis, baik mencegah atau menciptakan kondisi krisis. Keputusan krisis sering juga bisa mengubah seluruh rancangan dalam kebijakan luar negeri secara umum. Itulah sebabnya kebijakan luar negeri sering berubah-ubah, tentatif, dan tidak konsisten, karena sesungguhnya setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensi-konsekuensi tersendiri. Jika konsekuensi yang dihadapi setelah proses keputusan berdampak lebih buruk maka mungkin saja keputusan tersebut diubah berdasarkan alternatif lain.

Kebijakan luar negeri berorientasi pada proses dan keputusan. Proses pembuatan keputusan relatif menggunakan mekanisme yang sama dan berulang, yang berbeda adalah keputusan yang dihasilkan. Hasil keputusan politik luar negeri lebih banyak dipengaruhi oleh aktor yang membuat keputusan dan situasi serta kondisi yang terjadi pada saat itu. Berikut model proses pembuatan politik luar negeri.

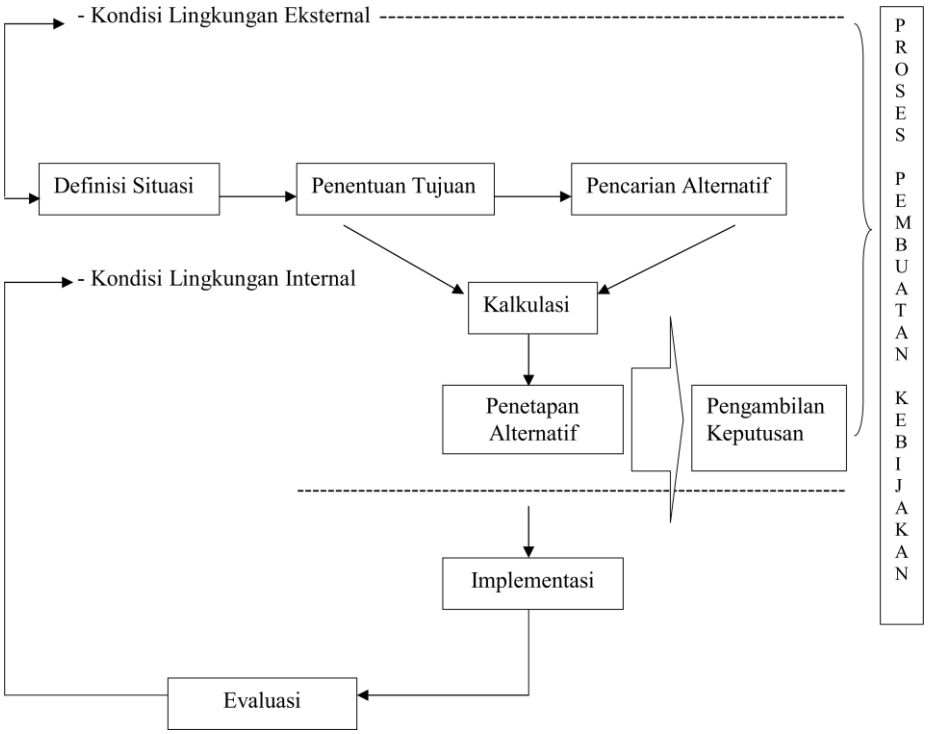

Kebijakan luar negeri pada dasarnya dapat dipicu oleh salah satu atau kedua kondisi, yaitu eksternal dan internal. Kondisi eksternal meliputi tiga faktor penentu yang pertama yaitu perilaku penentu keputusan, politik domestik, dan kondisi ekonomi-militer. Faktor eksternal mencakup faktor lingkungan internasional yang terjadi. Dari situasi dan kondisi yang ada, para pembuat keputusan mendefinisikan situasi dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional dan mengorganisasikan semua sumber informasi guna mendapatkan dukungan secara akademik dan politik dalam melakukan penentuan tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai.

Hans. J. Morgenthau berargumentasi bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya dalam seperangkat kepentingan internasional yang objektif. Kepentingan nasional dianggap penting dalam menentukan politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional mengacu pada sebuah perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional suatu bangsa yang

harus ditemukan sebagai dasar dari pelaksanaan hubungan luar negeri. Secara deskriptif, tujuan nasional suatu bangsa adalah sejumlah tujuan yang akan diraih dalam waktu tertentu. Konsep tentang kepentingan nasional dan sasaran strategik adalah dinamis, artinya kepentingan nasional dapat ditafsirkan dan di reevaluasi sesuai dengan situasi sosial ekonomi yang terus berubah.

Thomas W. Robinson membedakan kepentingan nasional menjadi enam macam, yang masing-masing saling terkait dan menunjang, yaitu :

1. Kepentingan primer.
   Terkait dengan upaya-upaya melindungi wilayah negara dari gangguan luar.Menjaga kedaulatan negara adalah tujuan utama.
2. Kepentingan sekunder
   Kegiatan-kegiatan di luar negara yang mendukung tujuan kepentingan primer, seperti perlindungan terhadap warga negara di luar negeri.
3. Kepentingan permanen.
   Kepentingan yang relatif konstan dalam jangka panjang dan perubahan yang terjadi relatif kecil, seperti kemerdekaan.
4. Kepentingan variabel.
   Merupakan kepentingan yang mengacu pada fungsi atribut-atribut nasional, seperti : personalitas, opini publik, moral masyarakat, dan kepentingan-kepentingan lokal.
5. Kepentingan umum.
   Merupakan aplikasi kepentingan dari hampir semua negara berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik, dan sebagainya
6. Kepentingan khusus.
   Kepentingan ini didasarkan pada kepentingan-kepentingan umum yang didefinisikan sesuai dengan ruang dan waktu.

Tahapan selanjutnya setelah menentukan tujuan adalah mencari alternatif-alternatif keputusan melalui kalkulasi rasional tentang keuntungan dan kerugian dari masing-masing alternatif

tersebut.Idealnya alternatif tersebut tidak hanya merepresentasikan kepentingan nasional tetapi juga memperhatikan etika dan hukum internasional yang menekankanpada perdamaian dan keadilan.Namun kenyataan membuktikan bahwa alternatif pilihan keputusan politik luar negeri cenderung memihak pada kepentingan nasional, kalaupun mempertimbangkan aspek etika dan hukum hanya pada tingkatan permukaan sebagai bagian dari strategi guna mencapai tujuan yang lebih besar. Kalkulasi dan pertimbangan politik dilakukan guna menentukan/menetapkan alternatif kebijakan yang dipilih dan siap terhadap resiko yang mungkin akan terjadi. Setelah keputusan ditetapkan, maka kebijakan diimplementasikan dan dievaluasi. Hasilnya dapat menjadi masukan untuk strategi kebijakan selanjutnya, apakah strategi yang sama akan tetap dijalankan, dihentikan, ataukah dimodifikasi.

C. Contoh Kasus : Normalisasi hubungan RI dan RRC

Setelah peristiwa Gerakan 30 September PKI, hubungan diplomatik antara RI dan RRC terputus. Pada 70-an muncul wacana tentang normalisasi hubungan RI-RRC. Ide ini muncul dari pihak RI dan RRC untuk pejabat kementerian tingkat rendah setelah mereka banyak bertemu dalam pertemuan ataupun perjamuan internasional.Pada saat itu, di Indonesia terdapat dua kelompok yang pro (mendukung normalisasi) dan yang kontra (menolak normalisasi).

1. Pro normalisasi :
   a. Departen Luar Negeri
      Alasannya :
      - Hambatan-hambatan diplomatik sudah dapat dihilangkan.
      - RRC telah menghentikan propaganda anti Indonesia.
      - RRC berjanji tidak mendukung subversi di Indonesia.
      - RRC berjanji tidak mendukung pelarian politik Indonesia.

   b. Kadin
      Alasannya : Trobosan untuk membuka hubungan dagang dengan Cina oleh kadin.

Adapun kelompok yang kontra normalisasi adalah ABRI/TNI dan Politisi Partai Islam. Dua isu utama yang mengedepan adalah kekhawatiran terhadap ancaman bahaya laten komunis dan masalah etnis Cina di Indonesia, yaitu kemungkinan dimanfaatkannya golongan etnis Cina untuk kepentingan RRC. Jenderal TNI Pangabean menyatakan bahwa untuk mengadakan normalisasi stabilitas regional harus dicapai terlebih dahulu, sedangkan komunis di Asia Tenggara masih disponsori oleh RRC.Selain itu status penduduk keturunan Cina harus diselesaikan sampai tuntas. Ali Murtopo menyatakan bahwa masih banyak yang harus diselesaikan oleh Indonesia, selain itu RRC belum menghentikan permusuhan dan tetap melindungi pelarian anggota PKI.

2. Menolak Normalisasi

Radius Prawiro (Menteri Perdagangan) ketika itu termasuk yang mendukung keputusan bahwa pemerintah RI tidak membuka hubungan dagang langsung dengan RRC karena belum tentu menguntungkan Indonesia. Keputusan ini ditegaskan oleh Ali Murtopo (Menteri Penerangan) dan Menlu Mochtar Kusuma Atmaja. Keputusan tiga menteri tersebut merupakan keputusan resmi pemerintah yang menolak normalisasi dengan alasan : (1). Masih ada masalah etnis Cina yang belum diselesaikan. (2.) RRC belum menerima syarat-syarat yang diajukan RI sehubungan dengan komunisme di Indonesia dan Asia Tenggara.

Pada 80-an, kelompok pro normalisasi dari Kadin menyatakan normalisasi memberikan keuntungan bagi Indonesia karena membuka peluang ekspor. Hal ini didukung kondisi pembangunan ekonomi yang berorientasi ekspor sedang digalakkan pemerintah. Deplu juga mendorong normalisasi dengan alasan dapat meningkatkan citra Indonesia di dunia Internasional sebagai Negara Non Blok (Non Blok menjadi isu hangat saat itu), dan mempermudah dialog langsung dengan RRC dalam menangani masalah Asia Tenggara. Namun kelompok kontra tetap menolak dengan alasan normalisasi mengandung resiko yang cukup rawan bagi keamanan Indonesia sehubungan dukungan RRC terhadap komunis.

Pada saat itu peranan langsung presiden dalam penetapan hubungan RI-RRC semakin transparan. Presiden menunjukkan dukungannya terhadap normalisasi, terbukti dari dukungan presiden terhadap pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Deplu dan Kadin. Tanggal 23 Juli 1985 dikeluarkan Instruksi Presiden no. 9 tahun 1985 tentang pedoman penyelenggaraan hubungan dagang langsung RI-RRC, setelah penandatanganan MOU antara Kadin – CCPIT (Kadin Cina). Hal ini membuktikan adanya dukungan pemerintah khususnya presiden terhadap prakarsa Kadin untuk membuka hubungan dagang (namun bukan hubungan resmi). Pada saat itu Menlu Mochtar Kusuma Atmaja berkata : " Tidak ada salahnya hubungan RI-RRC dipusatkan pada hubungan dagang terlebih dahulu. Hubungan dagang ini tidak otomatis berarti semakin dekatnya pencairan hubungan diplomatik RI-RRC".

Dalam Sidang Umum MPR 1988, Presiden Soeharto menyampaikan : " Posisi Indonesia terhadap masalah normalisasi adalah tidak akan ada normalisasi sebelum RRC berjanji untuk menghentikan bantuan terhadap semua gerakan komunis di Asia Tenggara terutama Indonesia". Namun pada 1989 setelah pertemuan Presiden Soeharto dan Menlu RRC di Tokyo, RI dan RRC sepakat mengarah pada langkah-langkah kongkret dalam normalisasi hubungan RI-RRC karena RRC telah menepati janji. Secara resmi pencairan hubungan diplomatik RI-RRC terjadi 1990.

Dalam proses pembuatan keputusan politik luar negeri Indonesia terkait masalah normalisasi hubungan RI-RRC terjadi dalam dua tingkatan, yaitu :

1. Tingkat birokrasi organisasional.
   Perlu tidaknya tindakan normalisasi melibatkan unsur Deplu, DPR, Militer, Organisasi Politik, dan kelompok kepentingan (Kadin).
2. Tingkat pembuat kebijakan puncak (*Top Decision Making*)
   Presiden atau pemimpin puncak negara mempengaruhi tingkat keputusan dari tingkat birokrat hingga tingkat puncak. Proses pada tingkat kedua sulit untuk diketahui oleh khalayak umum. Satu-satunya petunjuk dalam proses normalisasi yang dapat dijadikan asumsi bahwa Presiden Soeharto adalah aktor kunci dalam

penetapan kebijakan normalisasi dapat diambil dengan melihat dan mempelajari alternatif yang ada dan berlaku pada tingkat pertama, yaitu dengan adanya inpres tentang hubungan dagang.

D. Rangkuman

Orientasi kebijakan luar negeri adalah pada proses dan keputusan. Dalam pembuatan keputusan ada empat faktor determinan yaitu perilaku pembuat/penentu keputusan, politik domestik, kondisi ekonomi-militer, dan konteks lingkungan internasional. Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, mekanisme prosesnya berjalan tetap melalui tahapan definisi situasi, menentukan tujuan, menentukan alternatif pilihan kebijakan, dan menetapkan kebijakan. Namun dalam masalah yang sama keputusan yang diambil dapat berbeda karena bergantung pada definisi situasi dan kondisi yang ditetapkan oleh para aktor pembuat kebijakan. Setiap pembuat kebijakan dapat memiliki konsep citra (*image*) dan persepsi yang berbeda tentang persepsi ancaman, kepentingan nasional, idiologi, dan unsur-unsur psikologikal lainnya, karenanya keputusan yang dihasilkan dapat merefleksikan hasil kebijakan puncak dan juga birokratik. Oleh sebab itulah maka politik luar negeri cenderung dianggap tentatif, tidak konsisten, dan diskontinuitas, karena para pembuat keputusannya juga berbeda-beda.

E. Latihan dan Tugas

1. Diantara keempat faktor determinan, faktor manakah yang Anda anggap paling menentukan kebijakan luar negeri suatu negara? Berikan argumentasi Anda.
2. Model proses pembuatan kebijakan luar negeri tersebut diatas hanya sebatas garis besarnya saja. Buatlah bagan tentang model proses pembuat kebijakan secara detil dengan meletakkan faktor-faktor lain yang penting dari konsep-konsep yang Anda ketahui, seperti faktor determinannya, kepentingan nasional dan lain-lain.
3. Carilah tiga contoh kasus lain yang merupakan keputusan politik luar negeri suatu negara.

4. Lakukanlah studi pustaka, dengan mencari, mengumpulkan, dan menyeleksi informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai media informasi tentang salah satu contoh kasus yang Anda sukai.
5. Analisislah contoh kasus keputusan politik luar negeri Anda dengan menentukan jenis kebijakannya, faktor apa saja yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, siapakah yang menjadi penentu kebijakan, peluang dan kendalanya, dan sebagainya. Semakin mendetil akan semakin menarik.

BAB VI
KEKUATAN NEGARA DAN POLARISASI KEKUATAN DUNIA

Kompetensi Dasar
Menjelaskan kekuatan negara dan polarisasi kekuatan dunia.

Indikator Pencapaian :
1. Menjelaskan unsur kekuatan negara.
2. Menjelaskan polarisasi kekuatan dunia.

MATERI

A. Kekuatan Nasional

Untuk dapat berhasil dalam perebutan kekuasaan diperlukan kekuatan/ kapabilitas nasional (*National Capability*) yaitu istilah kapabilitas digunakan untuk membedakan antara aktual power (kekuasaan) dan potential power (kekuatan). yang memadai. Kekuatan nasional adalah kemampuan dalam membina dan mengembangkan potensi dan unsur-unsur negara. Menurut Hans. J. Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations, menyebutkan bahwa kekuatan negara terdiri atas sembilan elemen-elemen kekuatan :

1. Faktor Geografi

Faktor ini menekankan pada letak dan struktur geografis suatu negara. Hal ini terkait seberapa besar pengaruh yang didapatkan dari posisi dan struktur geografis terhadap kekuatan ke dalam maupun keluar. Posisi dapat diukur dari letak geografis yang strategis atau tidak, bertipe kepulauan ataukah daratan, pegunungan atau sabana. Luas wilayah dan iklim juga merupakan unsur geografis yang memberikan pengaruh politik yang besar. Singapura misalnya, meskipun kecil luasnya tetapi letaknya berada di ujung Semenanjung Malaka yang merupakan jalur penghubung terdekat diantara Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, sehingga

menjadikan Singapura sebagai bandar alih muatan kapal terbesar di dunia.

2. Sumber Daya Alam

Meliputi sumber pendapatan alami yang berupa bahan makanan, bahan mineral, sumber energi, sumber daya air, sumber daya tanah, flora, fauna, dan sebagainya. Sumber pendapatan alami meskipun belum dimanfaatkan secara maksimal merupakan kekuatan yang mendukung keberlangsungan negara. Kemampuan mengelola sumber daya alam sehingga menopang pemenuhan kebutuhan negara yang diukur dari Gross National Product (GNP) menjadi indikator utama kesejahteraan suatu negara.

3. Industri

Kemampuan industri adalah kemampuan negara untuk memproduksi suatu barang yang berguna. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan industri diantaranya adalah kemajuan teknologi, ketersediaan bahan baku, dan kemampuan pelaku-pelaku industrinya.

4. Militer

Kekuatan militer sering menjadi kekuatan yang paling menonjol setelah tidak ada masalah dalam segi ekonomi, karena kekuatan militer dapat berkembang jika ada pembiayaan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Kekuatan militer dapat diukur dari teknologi, kepemimpinan, kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata. Untuk mengetahui keefektifan kekuatan militer dapat dilihat dari keterampilan dan pendidikan militer, kesetiaan, motivasi, pengalaman, sistem logistik, strategi dan taktik, dan sebagainya.

5. Demografi

Demografi berkait dengan jumlah dan komposisi penduduk. Potensi penduduk merupakan faktor esensial bagi suatu negara karena manusia adalah aktor yang menggerakkan kekuatan-kekuatan yang lain. Kekuatan manusia adalah penentu bagi

terwujudnya kekuasaan yang diharapkan. Tolok ukurnya adalah *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia). HDI diolah berdasarkan tiga dimensi yaitu panjang usia, pengetahuan, dan standar hidup yang didasarkan pada indikator kesehatan penduduk, ekonomi, dan pendidikan.

6. Karakter Nasional

Karakter diartikan sebagai sifat-sifat mendasar dan kuat yang dimiliki mayoritas warga negara. Karakter memberikan kekuatan yang mengarahkan dan mengagregasikan seluruh warga negara sebagai kesatuan, misalnya bangsa Jepang memiliki karakter hemat dan bekerja keras. Hal ini tampak pada kebiasaan dan simbol konstruksi bangunan.

7. Moral Nasional

Moral berkaitan dengan pandangan atau nilai-nilai yang dianggap baik dan benar oleh warga negara. Dapat dikaitkan dengan idiologi negara, hanya tidak selamanya ideologi terrefleksi dalam moral kehidupan masyarakatnya. Pancasila merupakan ideologi negara dengan nilai-nilai yang ideal memang benar refleksi pada perilaku warga negara, atau Amerika Serikat dengan ideologi liberal, masyarakatnya penuh kebebasan tanpa keteraturan.

8. Kualitas Diplomasi

Diplomasi merupakan pengetahuan dan kecakapan urusan penyelenggaraan hubungan antarnegara. Seberapa jauh kualitas diplomasi adalah sejauh mana diplomasi tersebut mendapati kesepakatan yang menguntungkan bagi negara, atau setidaknya negara tidak mengalami kerugian dari kesepakatan yang dicapai.

9. Kualitas Pemerintahan

Pemerintah adalah aktor yang mengurus dan mengendalikan negara. Keputusan-keputusan yang diambil pemerintah merupakan representasi tindakan negara maka individu-individu yang duduk di pemerintahan adalah yang terpilih. Kualitas pemerintahan diukur dari sistem pemerintahan, kepemimpinan, kualitas

individunya, regulasi dan birokrasinya, termasuk kemampuan mengendalikan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan negara.

Kekuatan nasional setiap negara berbeda-beda dan berubah-ubah. Hal itu disebabkan oleh berbedanya potensi dan unsur kekuatan yang dimiliki di masing-masing negara, dan unsur kekuatan sendiri yang bersifat dinamis dan senantiasa terjadi perubahan seiring dengan perjalanan waktu. Dengan demikian kekuatan negara harus lebih dipahamai secara kontekstual. Negara adalah agregasi sosial yang rumpil, sehingga eksistensi negara harus terus menerus diupayakan dan diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata. Realitas menunjukkan bagaimana kekuatan negara yang besar seperti Uni Soviet dapat saja menjadi hancur dan terpisah-pisah menjadi beberapa negara karena gagal mengembangkan kapasitas kekuatan nasionalnya.

Beberapa ahli berpendapat bahwa kekuatan nasional dapat diukur melalui perhitungan matematis dengan berdasarkan indikator unsur-unsur kekuatan nasional yang ada. Perhitungan tersebut dapat memberikan informasi tentang gambaran matematis tentang kekuatan nasional negara-negara di dunia maupun kawasan regional. Bagi pembuat kebijakan dapat memberikan *in put* (masukan) tentang proyeksi dari kekuatan yang dimiliki negara sendiri maupun negara lain yang dianggap sebagai lawan atau musuh. Dalam ilmu hubungan internasional dapat membantu dalam memahami realitas HI sebagai perwujudan relasi-relasi rasional diantara aktor-aktornya.

Morgenthau membuat rumusan kekuatan nasional sebagai berikut :

K(n) = f ((unsur stabil) (unsur berubah))
= f ((G.A) (T,M,D,C,L,O,P))

K(n) = Kekuatan Nasional
F = Fungsi dalam pengertian matematik
G = Kemampuan geografis
A = Kemampuan sumber daya alam
T = Kemampuan industri

M = Kemampuan militer
D = Kemampuan demografi
C = Karakter nasional
L = Moral nasional
O = Kualitas diplomasi
P = Kemampuan pemerintah

Namun yang perlu diperhatikan adalah, bahwa perhitungan matematis hanyalah bentuk kuantifikasi logika-logika HI yang abstrak menjadi logika-logika numerik. Penyederhanaan ini tentu dapat menimbulkan bias, apalagi terkait dengan data yang bersifat kualitatif seperti karakter dan moral nasional. Selain itu, hampir tidak mungkin untuk mengukur dan mengklasifikasi negara dengan perhitungan-perhitungan yang objektif, karena dalam politik luar negeri setiap negara bertindak atas dasar kepentingan dan moralitasnya, sehingga perhitungan numerik tidak lain merupakan generalisasi/gambaran kasar dari realitas HI. Uraian yang terinci hanya dapat terungkap dalam studi-studi kasus.

B. Polarisasi Kekuatan Dunia

Kapabilitas nasional merupakan referensi bagi pembuat kebijakan dalam menentukan tindakan-tindakan politis dalam politik luar negeri. Dengan kata lain kapabilitas adalah modal dasar negara dalam melakukan relasi-relasi politik dengan negara lain. Penggunaan kekuatan-kekuatan negara dalam melakukan upaya-upaya pencapaian kekuasaan melalui politik luar negeri pada akhirnya akan menciptakan polarisasi kekuatan dalam politik internasiol. Polarisasi terjadi setelah berkembangnya pelembagaan dalam sistem internasional yang mengukuhkan munculnya stratifikasi dalam sistem internasional. Polarisasi adalah pengkutuban kekuatan-kekuatan negara yang tercipta dari adanya perimbangan kekuatan antarnegara di dunia. Karena kekuatan itu sifatnya dinamis, maka polarisasi juga bersifat dinamis. Setidaknya ada tiga model dalam polarisasi kekuatan dunia, yaitu hegemoni, bipolar, dan multipolar.

1. **Uni-polar (Hegemoni)**

Hegemoni terjadi ketika perimbangan kekuatan dunia mengutub pada satu kekuatan dominan. Ada satu negara yang memiliki kekuasaan dominan dan memiliki pengaruh politik yang besar terhadap negara-negara di dunia. Biasanya negara yang mampu memiliki *hegemonic power* adalah negara yang memiliki kekuatan nasional yang merata di setiap unsurnya. Orientasi kekuasaannya tidak lagi pada independensi tetapi meningkat pada pengembangan kekuasaan dan pengaruhnya terhadap negara-negara lain. Fenomena hegemoni terjadi di era kolonialisme Asia, saat negara-negara Eropa mengutub pada kekuatan yang didominasi Inggris. Hal yang sama juga terjadi di era pascaperang dingin, di saat pengaruh Amerika Serikat mendominasi perpolitikan internasional. Kekuatan hegemoni sejatinya bukan merupakan kekuasaan secara ansich, karena keberadaan *hegemonic state* itu tentu ditopang pula oleh kekuatan-kekuatan lain yang mendukung. Kekuatan hegemoni Amerika Serikat banyak ditopang kekuatan ekonomi Jepang dan Jerman. Walaupun demikian, kemampuan melakukan penetrasi pengaruh terhadap negara lain tetap menjadikannya sebagai negara paling diperhitungkan di ruang politik global.

Sentralisasi kekuasaan dunia pada satu kekuatan dominan mendorong terjadinya peralihan tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas internasional, yang semula merupakan tanggung jawab bersama menjadi sebagian diantaranya merupakan tanggung jawab moral (*moral obligation*) dari negara pemangku kekuatan hegemoni. Hal ini dapat menjelaskan tindakan-tindakan AS yang memposisikan diri sebagai ”polisi dunia”. Selain merupakan bagian dari rencana besar kepentingan nasionalnya, tindakan-tindakan AS merupakan dorongan *moral obligation* yang dituntutkan negara-negara lain yang berada didalam pengaruhnya. Keterlibatan AS di Afganistan dan Irak menunjukkan sikap AS yang memposisikan sebagai ”polisi dunia”, walaupun tindakan itu memiliki konsekuensi yang cukup besar bagi perekonomian AS,

yang pada akhirnya membawanya dalam krisis keuangan yang serius. Oleh karenanya, menjadi negara dengan *hegemonic power* tidaklah memiliki beban yang sedikit, tanpa didukung adanya mekanisme internasional yang kuat dan mapan, polarisasi hegemoni sulit untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama.

Sistem hegemoni relatif efektif dalam menciptakan keteraturan internasional. Robert Gilpin mengungkapkan bahwa adanya negara hegemoni memiliki beberapa fungsi penting yaitu keunggulan teknologi yang menopang ekonomi, bantuan ekonomi, perlindungan militer, menyerap pasar, dan jaminan likuiditas mata uang internasional. Hampir semua negara di kawasan Asia Pasifik, secara langsung maupun tidak langsung, pernah menikmati keuntungan tertentu dari Amerika Serikat dalam fungsi dan kapasitasnya sebagai negara hegemoni. Akan tetapi, jika negara hegemoni itu melemah maka yang akan terjadi adalah sebaliknya yaitu negara dalam sistem internasional sedikit banyak akan terkena ”getahnya”. Ini terbukti ketika kekuatan AS melemah.

Kemerosotan sistem hegemoni biasanya ditandai oleh tidak adanya kepemimpinan internasional yang menonjol. Hal ini bisa mengakibatkan meningkatnya kompetisi bahkan konflik di berbagai sektor kegiatan dan kawasan. Perlu ada diplomasi politik yang kuat dan terorganisasi untuk dapat menyatukan dan mengaktualisasikan komitmen menjaga ketertiban dunia diantara negara-negara di dunia. Hal itu akan terlaksana jika ada pemimpin internasional yang menonjol. Ini menjelaskan mengapa dunia internasional sangat memperhatikan dan berkepentingan dengan kandidat presiden AS. Kepentingannya adalah bahwa yang menjadi presiden AS haruslah merupakan figur pemimpin yang menonjol guna melanggengkan sistem hegemoni Amerika Serikat.

2. Bipolar

Bipolar terjadi ketika perimbangan kekuatan dunia mengutub pada dua kekuatan dominan, biasanya berada dalam posisi yang bertentangan. Fenomena ini terjadi pada fase

berakhirnya Perang Dunia II yang ditandai adanya perang dingin antara US dan AS. Pada masa itu kekuatan negara-negara di dunia terpolarisasi pada dua kekuatan besar Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kekuatan dua negara adidaya itu seolah-olah telah membelah dunia menjadi dua bagian dan masing-masing kekuatan berinteraksi dalam ”wilayahnya” sendiri-sendiri. Ada juga negara-negara yang memposisikan diri secara netral, walaupun netralitasnya masih condong berorientasi pada satu kekuatan tertentu. Dua kekuatan (AS-US) dominan terhadap politik luar negeri negara-negara yang menjadi sekutunya, dan sistem dunia didominasi oleh hubungan dua negara *super power* tersebut yang sarat dengan kompetisi dan konflik.

Adanya dua kekuatan dipercaya justru meningkatkan stabilitas internasional. Perimbangan kekuasaan yang ditunjukan dalam pola bipolar merupakan gambaran posisi yang ekuilibrium sehingga memiliki ketahanan yang kuat. Hal ini dapat dijelaskan karena: 1. Tanggung jawab moral menjaga keamanan dan ketertiban dunia sebagian menjadi tanggung jawab kedua kekuatan dominan, sehingga tidak hanya pada satu kekuatan dominan. Dengan begitu*sustainability* dalam menciptakan perdamaian dapat terlaksana dalam jangka waktu yang lebih lama. 2. Tajamnya persaingan diantara dua kekuatan justru menguatkan pilihan-pilihan politik dalam posisi bertahan (*detante*). Posisi ini justru mengurangi terjadinya konflik ataupun perang terbuka yang sangat berpotensi menimbulkan jatuhnya korban dalam jumlah besar. 3. Beban konsekuensi politik, ekonomi, dan sosial menjadi terbagi sehingga seolah-olah memiliki bagian sendiri-sendiri.

Berakhirnya sistem bipolar ditandai dengan kegagalan salah satu atau kedua kutub dalam mengelola dan meningkatkan kekuatan dalam iklim kompetisi yang tinggi. Hubungan kompetisi memiliki implikasi pada tingginya pengeluaran ekonomi (*high cost economic*) yang dapat membebani keuangan internal negara. Runtuhnya kekuatan politik dan ekonomi Uni Soviet menandai berakhirnya sistem bipolar. Keruntuhan itupun setelah hampir

empat dekade sistem bipolar itu bertahan, sehingga model bipolar dianggap memberikan kepastian diantara sistem internasional yang cenderung mengarah pada ketidakpastian.

3. Multipolar

Multipolar terjadi ketika perimbangan kekuatan dunia mengutub pada lebih dari dua kekuatan atau menyebar pada berbagai kekuatan, biasanya mengarah pada kekuatan kawasan. Model multipolar ditandai dengan menguatnya organisasi-organisasi kawasan. Berbeda dengan unipolar dan bipolar yang cenderung *state centric* (terpusat pada negara), multipolar justru mengarah pada *multistate centric* (terpusat pada banyak negara). Oleh karenanya yang muncul bukan kekuatan negara, melainkan kekuatan kawasan yang diwujudkan dengan organisasi kawasan seperti Uni Eropa, NAFTA, AFTA, APEC, dan sebagainya. Munculnya organisasi regional tersebut merupakan refleksi dari negara-negara di dunia akibat berakhirnya sistem bipolar atau unipolar yang menciptakan iklim ketidakpastian di lingkungan internasional. Tidak adanya kekuatan dominan dalam sistem internasional semakin mempertajam sistem internasional yang pada dasarnya bersifat anarki. Hal itu mendorong negara-negara dengan posisi berdekatan melakukan koalisi untuk menyatukan kekuatan guna menghadapi kondisi yang tidak pasti dan mengarah pada anarkisme. Dalam kondisi ketidakpastian akan lebih sulit dalam melakukan prediksi dan proyeksi arah hubungan yang berjalan, sehingga konteks lokal atau regional menjadi pilihan tindakan karena dianggap lebih memberikan kepastian dan adanya ikatan emosional.

Fenomena multipolar menguat menjelang abad ke-21, pada saat konfigurasi tatanan global yang di satu pihak condong ke lingkungan Trans-Atlantik (Amerika Utara dan Eropa) sepanjang menyangkut aspek politik-militer, dan di lain pihak condong ke kawasan Asia Pasifik sepanjang menyangkut aspek ekonomi-perdagangan. Sejalan dengan perkembangan ini, terlihat pula

pemusatan kegiatan dan kekuatan ekonomi di tiga kawasan dunia, yaitu kawasan Amerika Utara yang mencakup Kanada dan Meksiko dan yang dimotori oleh Amerika Serikat, kawasan Eropa, yang dimotori Uni Eropa dan kawasan Asia Timur, yang dimotori oleh Jepang, RRC, Republik Korea dan ASEAN. Di antara ketiga kawasan tersebut kemudian terjalin suatu kerangka hubungan segitiga atau *trilateral*, yaitu Amerika Utara dengan Eropa melalui NATO dan berbagai lembaga kerjasama trans-atlantik lainnya, Amerika Utara dengan Asia Timur (termasuk Asia Tenggara) melalui APEC (sejak 1989) dan Eropa Barat dengan Asia Timur (termasuk Asia Tenggara) melalui ASEM (sejak 1996).

Konsekuensi dari multipolar power mengarah pada : Pertama, menguatnya gejala saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antarmasalah global di berbagai bidang. Seiring dengan itu, semakin menguatnya arus serta dampak globalisasi dengan segala implikasinya, baik yang positif maupun yang negatif. Kedua, meningkatnya peranan aktor-aktor non-pemerintah dalam tata-hubungan antarnegara. Ketiga, munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional, seperti masalah hak asasi manusia, intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, "*good governance*", lingkungan hidup dan lain lain.

Dengan demikian, Sistem Internasional sarat dengan perubahan-perubahan dalam konstelasi politik maupun orientasi dalam hubungan internasional. Perubahan tersebut yang menjadi kajian-kajian politik luar negeri suatu negara yang mendasari kebijakan luar negeri suatu negara. Masing-masing negara berupaya untuk dapat beradaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Demikian juga dengan Indonesia yang merespon setiap perubahan yang terjadi melalui garis besar kebijakan luar negeri RI. Berikut ini contoh Garis Besar Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI yang disampaikan pejabat pemerintah pada saat itu.

JAKARTA, 22 NOVEMBER 2000

GARIS BESAR KEBIJAKSANAAN LUAR NEGERI DAN DIPLOMASI RI MEMASUKI ABAD KE-21

Disampaikan oleh Dr. Alwi Shihab

1. Pendahuluan

Politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudera; potensi sumber daya alam dan manusia berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara kita memposisikan diri di forum internasional.

Di lingkup internasional, perubahan-perubahan mendasar dalam dinamika internasional dan globalisasi saat ini dicirikan antara lain perubahan sistem politik global dari bipolar ke multipolar; menguatnya *interlinkages* antara forum global, interregional, regional, subregional dan bilateral; meningkatnya peranan aktor-aktor non-negara dalam hubungan internasional; dan munculnya isu-isu baru di dalam agenda internasional seperti HAM, demokratisasi, lingkungan hidup dan sebagainya yang dampak utamanya adalah semakin kaburnya batas dan kedaulatan negara dalam pergaulan antarbangsa.

Oleh karena itu, pelaksanaan politik luar negeri pun dengan sendirinya diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintahan baru untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.

Dalam kaitan ini yang perlu diwaspadai adalah munculnya pertentangan persepsi di antara komponen-komponen bangsa mengenai berbagai isu nasional yang bukan hanya memperburuk citra Indonesia di mata dunia, bahkan dapat mengancam keutuhan bangsa.

2. Dasar-dasar Politik Luar Negeri RI

Pada dasarnya politik luar negeri RI tidak mengalami perubahan, yaitu tetap politik luar negeri bebas aktif yang berdasarkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN antara lain menegaskan arah politik Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama intenasional bagi kesejahteraan rakyat. Di samping itu, dengan telah disahkannya Undang--undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada 14 September 1999, maka Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri RI selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan termaksud dalam UU tersebut.

3. Perubahan Penting di Lingkungan Strategis

Dalam pelaksanaanya, kebijakan luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi. Dinamika kondisi internal di Indonesia yang berpengaruh besar terhadap arah pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia antara lain ditandai dengan krisis moneter/ekonomi yang parah hingga mengharuskan adanya keterlibatan yang lebih intensif dari negara-negara donor guna membantu pemulihan ekonomi Indonesia. Krisis ini dengan segera menjadi pemicu berbagai aksi unjuk rasa masyarakat, kerusuhan sosial, krisis kepercayaan, serta maraknya gerakan-gerakan separatis di Indonesia. Dampak langsung dari berbagai krisis tersebut adalah jatuhnya citra Indonesia di mata

internasional yang kian mempersulit upaya pemulihan kondisi politik, ekonomi dan sosial budaya.

Bagi Departemen Luar Negeri sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia di fora intemasional, sikap pemerintah yang lebih aspiratif terhadap tuntutan rakyat membuka peluang untuk digulirkannya berbagai prakarsa serta terobosan baru guna mengupayakan penyelesaian berbagai masalah yang menjadi pusat perhatian di dalam hubungan luar negeri. Untuk menyikapi tuntutan rakyat tersebut, maka perlu juga dicermati perubahan penting lingkungan strategis eksternal Indonesia.

Perubahan-perubahan dalam tata hubungan intemasional yang kini dihadapi politik luar negeri Indonesia diwarnai oleh sejumlah kecenderungan global yang fundamental, yaitu:

1. Tampilnya Amerika Serikat (AS) sebagai adidaya politik-militer satu-satunya di dunia yang bersumbu pada kekuatan-kekuatan politik-ekonomi di Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur;
2. Arus globalisasi dan interdependensi semakin menguat, serta adanya saling keterkaitan antara berbagai masalah global, baik dalam bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, keamanan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya;
3. Semakin menguatnya peranan aktor non-pemerintah dalam percaturan internasional atau *multi-track diplomacy* dalam hubungan internasional;
4. Semakin menonjolnya masalah-masalah transnasional, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, *good governance*, dan lingkungan hidup dalam agenda internasional.

Runtuhnya Blok Timur telah menempatkan pihak Barat pada posisi sebagai satu-satunya kekuatan yang dapat mendominasi berbagai organisasi dan forum internasional. Doktrin politik luar negeri negara-negara Barat, seperti: *democratic peace* (AS), *ethical foreign policy* (Inggris), *humanitarian intervention*, mencerminkan gejala intervensionis yang kuat dan cenderung meremehkan faktor kedaulatan

nasional. Indonesia sendiri dewasa ini sering bersenggolan dengan gejala internasionalisme baru ini dalam segala bentuk dan berbagai gradasi tekanan, terutama dalam praktik demokrasi dan HAM di Indonesia. Pengaruh Internasionalisme baru ini tidak hanya dijelmakan oleh negara-negara Barat di forum-forum multilateral, namun juga dalam menghadapi masalah-masalah khusus dalam negeri suatu negara seperti Myanmar, Timor-Timur, Irak dan sebagainya.

Dominasi pihak Barat atas masyarakat dunia kini dipertahankan melalui dua cara utama. Pertama, melalui upaya penentuan topik pembahasan agenda (*agenda setting*) dalam seluruh organisasi/forum internasional yang masih dapat dipengaruhinya. Kedua, melalui kekuatan ekonomi-perdagangan dan pengaruh dalam sistem moneter dunia, pihak Barat mampu mengupayakan agar negara-negara lain yang bergantung kepada kekuatan ekonomi-perdagangan tersebut dapat dipengaruhi agar bersikap sesuai yang diinginkan pihak Barat, baik dalam memenuhi agenda internasional yang ditentukan sendiri oleh pihak Barat maupun dalam kaitan bilateral dengan negara donor.

Bagi Indonesia, kawasan Asia-Pasifik, khususnya Asia Tenggara tetap merupakan teater utama bagi politik luar negeri Indonesia. Percaturan regional berkembang dengan *fluid*, namun kondisi keamanan kawasan Asia-Pasifik pada umumnya cukup stabil, walaupun kadang terganggu oleh gejolak-gejolak yang insidentil. Terdapat empat negara yang menentukan dinamika perkembangan keamanan (*security*) kawasan ini, yaitu AS, Cina, Jepang dan Rusia. Meskipun pada waktu ini Rusia belum dapat memainkan peranannya, keempat negara ini mempunyai kepentingan strategis di kawasan ini. *Equilibrium* di antara keempat kekuatan ini akan dapat menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan.

4. Prioritas dalam Hubungan Luar Negeri RI

Berdasarkan beberapa perubahan yang terjadi, maka Departemen Luar Ncgeri telah menetapkan Kebijakan Politik dan Hubungan Luar Negeri yang disebut ***Ecumenical Diplomacy*** yaitu merangkul semua negara

untuk memperluas persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan:

1. Pemulihan Citra Indonesia di mata masyarakat internasional
2. Pemulihan ekonomi nasional dan kesejahteraan umum
3. Pemeliharaan keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional, serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.
4. Peningkatan hubungan bilateral dengan prioritas negara-negara yang dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata.
5. Memajukan kerjasama internasional dalam rangka pemeliharaan perdamaian dunia.

Bila kita memperhatikan realitas tersebut, maka upaya Indonesia untuk mencapai berbagai kepentingan nasionalnya di fora internasional perlu ditopang melalui pengerahan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan diplomasi di fora global, inter-regional, regional, sub-regional, dan bilateral. Hal tersebut harus diantisipasi oleh Indonesia melalui kebijakan dan strategi politik luar negeri yang tepat sehingga Indonesia dapat menarik manfaat maksimal dari dinamika hubungan internasional tersebut pada milenium ketiga mendatang.

Sejalan dengan krisis ekonomi yang menimpa Indonesia, maka dari segi ekonomi upaya-upaya diplomasi Indonesia diarahkan pada usaha memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan yang timbul dari arus globalisasi untuk kepentingan pembangunan nasional; mengembangkan perluasan akses pasar untuk meningkatkan ekspor non-migas; mengupayakan meningkatnya arus investasi asing dan kerjasama keuangan; serta mengembangkan kerjasama teknik dan jasa ekonomi dalam mendukung upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaannya telah dilakukan secara sinergis melalui pendekatan global, regional, intra-regional, dan bilateral.

Dari segi politik, Indonesia tetap perlu menjalankan politik Iuar negeri yang rasional dan moderat dengan mengandalkan prinsip-prinsip kerjasama internasional, saling menghormati kedaulatan nasional, dan *non-interference*. Diplomasi Indonesia dilaksanakan dengan menjauhi sikap konfrontatif dan melaksanakan peranan aktif dalam diplomasi preventif serta penyelesaian konflik, dalam hal ini citra Indonesia di mata masyarakat internasional perlu segera dipulihkan kembali karena berkaitan erat dengan kapasitas Indonesia untuk berperan aktif dalam percaturan internasional serta menjamin arus investasi ke Indonesia.

Selain itu, Indonesia perlu mewaspadai kiprah negara-negara Barat yang makin cenderung untuk memaksakan agenda politiknya terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dengan menggunakan tekanan-tekanan ekonomi dan politik dan berbagai bentuk sanksi. Dengan berbagai dalih mereka nampak mengembangkan konsep intervensionisme, khususnya melalui isu-isu kemanusiaan, demokrasi dan lingkungan hidup. Demi kepentingan nasional, perlu diupayakan agar sejauh mungkin tekanan-tekanan tersebut dapat dihindarkan dengan menggalang solidaritas Asia. Sambil terus meningkatkan kerjasama regional Asia Timur, seperti negara--negara ASEAN, RRC, Jepang, dan Korea Selatan sebagai komponen utamanya, lndonesia hendaknya tetap menciptakan teman sebanyak-banyaknya dan menghindari munculnya lawan.

Dalam konteks nasional, politik luar negeri Indonesia tetap ditujukan untuk menjaga keutuhan wilayah nasional, persatuan bangsa serta stabilitas nasional dalam menghadapi permasalahan di dalam negeri. Politik luar negeri lndonesia juga perlu terus diabdikan untuk menunjang kesejahteraan umum dan pemulihan total ekonomi nasional, sedangkan modal dasar bagi pembangunan citra positif lndonesia masih perlu ditopang dengan berbagai pekerjaan rumah yang tidak sedikit namun mendesak sifatnya, seperti: penegakan dan kepastian hukum, pembangunan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, pemajuan dan perlindungan HAM, serta penanganan

berbagai isu yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Hal lain yang kiranya perlu disikapi adalah munculnya gejala "euphoria" di dalam proses demokratisasi kehidupan politik nasional, yang sering menimbulkan sikap atau pendapat yang kontroversial di dalam masyarakat bahkan antarlembaga negara sendiri (khususnya eksekutif dan legislatif) mengenai berbagai isu srtategis akhir-akhir ini. Apabila isu-isu ini dapat ditangani dengan baik maka kinerja diplomasi untuk memperjuangkan berbagai kepentingan nasional yang mendesak sifatnya akan sangat terfasilitasi.

Dalam konteks *bilateral*, Indonesia berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat, dengan terus mempelajari kemungkinan pembinaan hubungan bilateral dengan negara-negara yang dinilai berpotensi membantu upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Indonesia juga akan terus mengupayakan kehidupan politik bertetangga baik dengan negara-negara yang secara geografis berbatasan langsung, namun tentunya dengan tetap didasarkan pada prinsip kesejahteraan dan saling menghormati.

Dalam kaitan dengan *good neighbour policy* ini, Indonesia berusaha membina hubungan bilateral dengan Timor Loro Sae yang ditujukan pada penyelesaian masalah pengungsi, penghindaran kesalahpahaman antara TNI dengan UNTAET, peningkatan peran proaktif RI di "UNTAET-World Bank Donors' Meeting on East Timor", mengupayakan agar Bahasa Indonesia tetap digunakan sebagai media komunikasi, pemberian beasiswa yang seluas-luasnya bagi mahasiswa Timor Loro Sae, dan peningkatan ekspor Indonesia dengan cara mempermudah mobilitas modal, barang dan jasa di perbatasan NTT dan Timor Loro Sae.

Dalam konteks regional, Indonesia sangat mendukung pemulihan perekonomian Asia Tenggara dan akan berpartisipasi aktif dalam berbagai langkah inovatif ASEAN dan tetap memainkan *leadership role* di ASEAN serta menjaga kekompakan (*cohesion*) sesama

ASEAN. Dalam 33 tahun terakhir, Indonesia telah memainkan peranan sentral dalam membangun ASEAN dan membina tatanan kawasan, adalah merupakan kepentingan nasional dan kawasan agar usaha-usaha ini terus berlanjut. Negara-negara ASEAN sendiri tetap mengharapkan peran aktif Indonesia ini, terlepas dari permasalahan dalam negeri yang dihadapi Indonesia. Indonesia perlu mencegah kesan seolah-olah telah menjadi negara yang *inward-looking*.

Dalam konteks global, Indonesia tetap menaruh harapan besar pada PBB dan tetap meyakini keabsahan institusi ini sebagai satu-satunya lembaga multilateral yang paling kompeten dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang bersifat mendunia, dengan catatan terus dilaksanakannya program-program restrukturisasi PBB hingga tercapainya suatu kondisi yang benar-benar dapat menampung aspirasi seluruh negara anggotanya.

5. Sasaran Politik Luar Negeri RI

Sasaran penyelenggaraan hubungan luar negeri dengan merujuk GBHN 1999 adalah *"Pewujudan politik luar negeri yang berdaulat,bermartabat, bebas dan pro-aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global"*. Namun sebagaimana dituntut dari setiap kebijakan dasar, dalam hal sasaran-sasaran operasionalnya politik Iuar negeri tersebut harus senantiasa bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri pada berbagai perkembangan serta perubahan yang terjadi saat ini. Penyesuaian atau adaptasi ini tentu bukan dalam arti sebatas mengikuti ke mana arah angin bertiup (*bend with the wind*), tetapi penyesuaian dalam arti berperan aktif dalam mengusahakan agar perubahan-perubahan tersebut mengarah pada terwujudnya dunia yang lebih damai, adil dan sejahtera; mengarah pada kondisi yang dapat menguntungkan bagi pencapaian sasaran-sasaran kepentingan nasional. Jelas pula, bahwa tidak semua aspek kebijakan politik luar negeri itu perlu disesuaikan; kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti baik perlu diteruskan, dimantapkan dan lebih ditingkatkan lagi, sambil tetap mengembangkan prakarsa-

prakarsa baru yang diperlukan dalam rangka mengamankan pencapaian kepentingan nasional di fora internasional.

Sesuai dengan perkembangan ekonomi dan politik di dalam negeri, penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik Iuar negeri akan memberikan penekanan pada kepentingan ekonomi. Dalam mengintensifkan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri di bidang ekonomi, perwakilan-perwakilan RI di luar negeri diminta untuk menjalin hubungan baik dengan para investor yang potensial. Perwakilan juga harus berfungsi sebagai *public relations* dalam upaya untuk memulihkan kepercayaan dunia kepada Indonesia. Sudah saatnya politik luar negeri Indonesia lebih mendorong keterlibatan lembaga-lembaga non-pemerintah (*second track diplomacy*) di bidang ekonomi, lingkungan hidup, HAM dan demokratisasi serta perlunya pemberdayaan masyarakat asli di wilayah sedang bergejolak.

Dalam upaya untuk meningkatkan hubungan ekonomi luar negeri, maka perlu dilakukan peningkatan diplomasi ekonomi dengan melakukan pendekatan politis bilateral dan multilateral. Pendekatan tersebut bertujuan untuk melakukan terobosan guna meningkatkan hubungan ekonomi pada umumnya dengan memberi perhatian khusus terhadap negara-negara yang memiliki potensi besar, khususnya seperti negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, Jepang, dan RRC. Tekad ini akan diwujudkan dalam keikutsertaan dalam berbagai forum kerjasama ekonomi, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Dalam kaitan ini, dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, kesepakatan dalam rangka APEC dan ketentuan-ketentuan WTO, keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum ini dilandaskan pada politik luar negeri yang menitikberatkan pada solidaritas antarnegara berkembang, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat. Diplomat Indonesia diarahkan untuk berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan dan pembahasan isu-isu global termaksud di berbagai forum kerjasama.

Partisipasi aktif juga perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan suatu instrumen internasional yang mengatur perdagangan mata uang secara adil, terbuka, seimbang, dan *'based on rule system'*.

Selanjutnya, upaya pemulihan citra positif Indonesia merupakan prioritas utama dalam misi diplomasi. Masalah-masalah internasional seperti penegakan hukum, stabilitas keamanan, pelanggaran HAM, kolusi, korupsi dan nepotisme masih menjadi pokok-pokok permasalahan yang dapat menghambat upaya pemulihan citra. Kebergantungan Indonesia pada institusi ekonomi internasional seperti IMF dan World Bank juga menyebabkan *bargaining position* yang dimiliki masih kurang kuat. Karenanya, dibutuhkan komitmen dan upaya yang sangat tinggi agar citra positif dapat diraih kembali walaupun tidak dapat dalam waktu sekejap.

Di samping itu, bahaya disintegrasi bangsa dan negara yang berhadapan dengan kecenderungan baru di kalangan negara-negara Barat -- baik melalui PBB maupun melalui bentuk kerjasama lainnya -- melakukan "intervensi kemanusiaan", kalau perlu dengan kekuatan militer. Jika Pemerintah Indonesia tidak dapat mencapai penyelesaian politik atas masalah-masalah di Aceh, Ambon, dan Irian Jaya misalnya, maka hal ini akan membuka peluang bagi negara-negara Barat, LSM-LSM Barat, maupun elemen-elemen separatis di dalam negeri untuk mendesak masyarakat internasional agar melakukan "intervensi kemanusiaan" yang akan melanggar kedaulatan Indonesia. Dalam upaya menyikapi tantangan disintegrasi tersebut, Pemerintah akan melaksanakan secara sungguh-sungguh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Di samping itu yang perlu juga diupayakan adalah keharmonisan sikap di antara elite politik termasuk pejabat negara dalam menyikapi proses penyelesaian masalah-masalah penting tersebut.

Walaupun pelaksanaan UU tersebut di atas belum dapat mengatasi **masalah Aceh**, karena tuntutan mereka telah demikian besar, maka

pendekatan integral dan multidimensional sangat diperlukan. Proses dialog Pemerintah RI dengan faksi-faksi GAM yang disponsori oleh *Henry Dunant Center for Humanitarian Dialogue (HDC)* telah berlangsung sejak Januari 2000. Pada 12 Mei 2000 proses tersebut telah menghasilkan *Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh* (Kesepahaman Bersama mengenai Jusuf Kalla Kemanusiaan untuk Aceh) di Swiss. Kesepahaman Bersama ini meliputi upaya bersama, baik untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan maupun pengurangan ketegangan dan penghentian kekerasan di Aceh. Kedua pihak setuju untuk membentuk Komite Bersama Langkah Kemanusiaan dan Komite Bersama Modalitas Keamanan, serta Forum Bersama yang berkedudukan di Swiss.

Untuk **masalah Irian Jaya** upaya lain yang dilakukan pihak Pemerintah adalah dengan menginstruksikan kepada seluruh perwakilan RI di luar negeri untuk menyampaikan penjelasan posisi RI terhadap Kongres Rakyat Papua. Demikian pula kepada para Kepala Perwakilan negara asing di Jakarta dan meminta untuk mengeluarkan pernyataan atas dukungan penuh terhadap integritas teritorial terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perjainjian New York 1962 dan Resolusi SMU PBB No. 2504 (XXIV) Tahun 1969. Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang terlibat dalam terlaksananya Perjanjian New York tahun 1962 telah menyetujui usul tersebut. Selain itu, perlu juga dipikirkan peningkatan peran RI di kawasan Pasifik Selatan, terutama hubungan bilateral RI-PNG dan RI-Australia, serta membuka perwakilan RI di Fiji dan menjadi negara mitra dalam Forum Kepulauan Pasifik.

Penuntasan berbagai residu permasalahan lepasnya Timor Timur, terutama penanganan pengungsi dan tuduhan pelanggaran HAM secara proporsional dan "elegan" tidak pula kalah pentingnya dalam menghadapi sikap sementara masyarakat internasional yang cenderung semakin intrusif.

Untuk mengantisipasi berbagai faktor yang menimbulkan gejala disintegrasi di masa depan, perlu adanya persamaan persepsi dan mengembangkan rekonsiliasi nasional. Forum Regional ASEAN (ARF) dan pertemuan besar resmi pertama "ASEAN + 3" di Bangkok pada Juli 2000 menegaskan kembali dukungan kepada keutuhan wilayah Indonesia serta cara penyelesaian damai yang dilakukan pemerintah RI dalam menghadapi masalah-masalah Aceh dan Papua. Dalam perspektif yang lebih luas, upaya pembentukan "*code of conduct*" antara ASEAN dan China serta mekanisme penyelesaian konflik melalui "Troika ASEAN" akan dapat menciptakan situasi kondusif stabilitas dan keamanan kawasan.

6. Penutup

Hubungan internasional di masa-masa mendatang akan semakin kompleks. Permasalahan-permasalahan internasional baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi domestik suatu negara. Masalah-masalah dalam negeri saat ini, seperti krisis perekonomian nasional, citra yang telah terpuruk, dan timbulnya separatisme merupakan contoh dari saling berkaitnya antara masalah eksternal dan internal tersebut. Pada tataran nasional, tugas utama yang harus dijalankan politik luar negeri RI adalah mempercepat upaya pemulihan perekonomian nasional, memperbaiki citra yang telah terpuruk karena berbagai pelanggaran HAM, serta mengatasi masalah-masalah separatisme. Dengan memadukan upaya di tingkat nasional dengan peningkatan kerjasama di tingkat internasional dengan berbagai negara merupakan langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

Perlu diingat pula bahwa sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah serta perkembangan ke arah semakin besarnya tuntutan otonomi daerah di bawah bayang-bayang disintegrasi, terjadi secara paralel dengan semakin meningkatnya peranan pemerintah-pemerintah daerah dalam

hubungan antarbangsa. Kerjasama di antara propinsi di perbatasan yang melibatkan dua negara atau lebih (*growth triangle*), ataupun meningkatnya bentuk-bentuk kerjasama seperti *sister cities* dan *sister provinces* merupakan perwujudan meningkatnya peranan pemerintah daerah tersebut. Gejala desentralisasi ini juga akan membawa dampak dalam kebijakan kerjasama pembangunan, terutama yang menyangkut pengaturan wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain yang menyangkut perencanaan, pengelolaan dan akuntabilitas bantuan pinjaman luar negeri. Oleh karena itu, perlu diciptakan mekanisme yang lebih sistematis untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang relevan dengan peranan mereka.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengesahan UU No. 37 mengenai Hubungan Luar Negeri telah memberikan dasar hukum yang lebih baik bagi koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan hubungan luar negeri. Sementara pada tataran internasional, dengan menerapkan strategi regional yang memadukan aspek kerjasama ekonomi dan kerjasama politik-keamanan, Indonesia bersama-sama dengan negara lain akan mampu meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi sekaligus menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan terdekat dan kawasan-kawasan lain.

Dalam mengambil kebijakan politik luar negeri, belajar dari pemisahan Timor Timur, maka perlu ditingkatkan koordinasi antara Deplu dan instansi-instansi terkait. Di samping itu perlu kiranya ditingkatkan kerjasama dengan berbagai komponen masyarakat, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat. Indonesia juga perlu mempertimbangkan kembali secara kongkret mekanisme *enhanced interaction* atau *flexible engagement* di ASEAN, sebagai pengganti prinsip *non-interference* yang kaku. Selain itu, perlu dipikirkan pembuatan Buku Putih Politik Luar Negeri yang sejalan dengan Buku Putih Pertahanan RI (*White Defence Paper*).

Dengan berbagai persiapan yang matang tersebut, prospek hubungan luar negeri Indonesia akan semakin cerah dan bangsa Indonesia semakin siap dalam memasuki abad ke-21 ini. Dengan persiapan-persiapan yang matang tersebut Indonesia akan mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya dari abad yang penuh dengan dinamika, peluang, dan tantangan tersebut bagi kesejahteraan seluruh rakyat dan masa depan generasi yang akan datang.

C. Rangkuman

Kekuasaan (*power*) merupakan tujuan utama dari relasi politik internasional. Power dapat diartikan sebagai kemandirian, kemampuan mempengaruhi, atau relasi yang saling mempengaruhi. Perbedaan orientasi kekuasaan ditentukan oleh kekuatan nasional yang dimiliki negara. Masing-masing negara memiliki kekuatan yang berbeda dan berubah-ubah. Besar atau kecil kekuatan negara itu ditentukan oleh unsur-unsur kekuatan yang dimiliki. Kekuatan nasional dapat diukur untuk mengetahui proyeksi awal tentang kekuatan nasional yang dimiliki satu negara dan kekuatan negara lain yang menjadi lawan politiknya. Hasil perimbangan kekuasan yang terdapat dalam sistem internasional dapat menciptakan polarisasi dalam sistem internasional. Model polarisasi itu meliputi unipolar, bipolar dan multipolar. Kondisi-kondisi lingkungan internasional yang senantiasa berubah tersebut direspon dalam bentuk kebijakan-kebijakan umum pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah RI.

D. Latihan dan Tugas

1. Jelaskan bagaimana suatu negara dapat disebut sebagai negara yang memiliki power? Berikan contoh.
2. Jelaskan bagaimana suatu negara dapat disebut sebagai negara yang memiliki power yang besar atau *power* yang kecil? Berikan contoh.

3. Hitunglah kekuatan nasional negara-negara ASEAN dan rankinglah dari negara dengan kekuatan terbesar. Jangan lupa sertakan argumentasi Anda.
4. Jelaskan perubahan-perubahan dalam polarisasi sistem politik internasional sejak awal abad ke-19 hingga sekarang. Buatlah dalam bentuk *analisis paper*.
5. Menurut Anda perubahan dunia selanjutnya akan mengarah pada polarisasi yang bagaimana? Jelaskan argumentasi Anda.
6. Berdasarkan garis besar kebijakan RI di atas, analisislah unsur-unsur kekuatan nasional mana saja yang menjadi fokus kekuatan RI dan mengenai cara pandang RI terhadap perubahan internasional yang terjadi.

BAB VII
EKONOMI INTERNASIONAL

Kompetensi Dasar
Mendeskripsikan konsep ekonomi internasional

Indikator Pencapaian
1. Mengidentifikasi konsep-konsep ekonomi internasional
2. Mendeskripsikan batasan ekonomi internasional
3. Mendeskripsikan sistem moneter internasional
4. Menganalisis peran institusi ekonomi internasional

MATERI

Sebagaimana diketahui, semua negara modern saling bergantung secara politis dan teknologis. Demikian juga mereka saling menyandarkan diri untuk mendapatkan sumber daya dan komoditi yang memungkinkan membangun dan menunjang kelangsungan hidup perekonomian mereka. Beberapa sistem perekonomian suatu negara biasanya bergantung pasar dan sumber penyediaan barang kebutuhan dari luar negeri serta tidak akan dapat berfungsi lebih dari beberapa minggu jika hubungan mereka terputus dari bagian lain dunia ini.

Kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara nasional akan membantu menciptakan kebergantungan pada negara lain. Seperti telah diketahui, tingkat kebutuhan merupakan elemen variabel untuk menggunakan pengaruh secara berhasil dalam politik internasional. Walaupun sumber daya ekonomi sering langka-tapi diperlukan untuk memenuhi nilai-nilai dan aspirasi nasional-kebutuhan di dunia modern sering bersifat ekonomis. Pemilikan sumber daya ini dapat ditransformasikan dengan mudah menjadi pengaruh politik. Sumber daya ekonomi merupakan salah satu kemampuan besar yang dapat dimobilisasikan untuk tujuan politik.

A. Interdependensi Ekonomi Global.

Selalu ada persoalan dalam belajar Ekonomi Internasional, karena tidak hanya menyangkut masalah teknis tetapi juga masalah ideologi, sebagai contoh dalam produksi barang tidak cuma masalah efisiensi saja tapi dikaitkan dengan masalah ideologi. Kepentingan dalam HI yang pertama adalah eksistensi suatu negara baru diikuti ekonomi dan lain-lain. Jika *survival*-nya terancam, maka kepentingan lainnya akan dipinggirkan sehingga sering negara berperang. Dalam ekonomi internasional ketika muncul teori-teori perdagangan dan pertanyaan, penalaran apa yang mendasarinya. Dalam hal politik tidak ada satu negarapun yang secara sukarela berkorban demi negara lain. Untuk itu sebenarnya kalau kita berbicara ekonomi internasional (EI) tentu tidak lepas dari Ekonomi Politik Internasional (EPI)

1. Sejarah Ekonomi Politik Internasional

Ekonomi Politik Internasional adalah studi tentang pengaruh-memengaruhi antara politik dan ekonomi dalam tingkat dunia, yang menekankan ekonomi pada sistem produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan. Politik merupakan hal yang menekankan pada sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur di berbagai interaksi sosial dan ekonomi. Kaitan antara keduanya adalah fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dengan pasar antara lingkungan domestik dengan internasional serta antara pemerintah dengan masyarakat.

Sebelum 1920-an, hubungan antara ekonomi dan politik sudah menyatu (merkantilis-abad XVII, marxis-tahun 1920-an). Selanjutnya, tahun 1920-an sampai 1960-an : ilmu ekonomi yang posivistik dan empirik (lebih teoretis dan berorientasi kebijakan) terpisah dari analisis politik, dengan alasan bila fenomena ekonomi ditangani secara politik maka akan terjadi kekacauan dan konflik. Setelah PD II, politik lebih memusatkan pada keamanan, sedangkan ekonomi dengan *Bretton Woods*-nya. Awal 1970-an keduanya bersatu lagi, bahkan sampai sekarang setiap negara kalau

berhubungan dengan ekonomi selalu ada politik didalamnya baik disengaja maupun tidak.

Berikut ini merupakan perbedaan dari empat model EI

	Merkantilis	**Liberal**	**Radikal**	**Reformis**
Aktor	Negara bangsa, secara rasional memaksimalkan kekuasaan	Individu yang secara rasional memaksakan keuntungan	Kelas-kelas sosial yang saling bersaing	Negara bangsa dan trans nasional
Tujuan EPI	Memaksimalkan kepentingan nasional	Memaksimalkan kesejahteraan global	Memaksi-malkan kepenting-an kelas	Memaksimalkan kesejahtera-an global
Sifat Hubung-an dan sistem EPI	Konfliktual, menguntung-kan yang kuat	Harmonis dan saling menguntung-kan	Konfliktual dan mengun-tungkan yang kuat	Konfliktual tapi bisa di ubah.
-Peranan Negara	Primer, sebagai penjamin kepentingan nasional	Sekunder, sebagai penjamin pasar bebas	Primer, sebagai penjamin kepentingan kelas	Primer, sebagai-wakil kelompok lemah
Hubung-an ekonomi dan politik	Politik mementing-kan ekonomi	Ekonomi mementing-kan politik	Ekonomi mementingkan politik	Timbal balik
Kemung-kinan Perubah-	Perubahan karena perubahan	Equilibirium Dinamik	Disequilibirium	Diarahkan ke reformasi

an	distribusi kekuasaan			struktural secara damai
Preskripsi	Negara lemah → harus intervensi pasar untuk melindungi ekonomi domestik	Negara boleh memanfaat-kan sistim internasional tapi jangan intervensi karena tidak enfisien	Negara lemah hindarkan diri dari kapitalisme internasio-nal	Organisasi internasio-nal untuk *collective self reliance and collective bargaining.*

Keterangan:
Radikal → berbasis Marxisme
Reformis→ reformasi dari perubahan radikal-revolusioner
Merkantilisme → Nasionalisme ekonomi
Liberal → menentang pengendalian ekonomi domestik secara berlebihan, adanya keselarasan kepentingan.

B. Sistem Moneter Internasional (SMI)

1. Sejarah sebelum PD II

a. Periode Kolonialisasi.

Perdagangan Internasional dilakukan dengan tujuan mencari pasar dan mencari sumber bahan baku. Perdagangan internasional dilakukan dengan cara-cara *Privillege Leverage* (pasar bebas terbatas) tapi hanya terbatas pada negara-negara yang tergabung dalam satu koloni.

b. Periode Pasca PD II

1) Amerika Serikat adalah negara paling menentang bentuk-bentuk kolonialisme, karena negara tersebut mempunyai *self interest* yaitu satu-satunya negara kuat yang mempunyai koloni, bukan karena alasan moral, sehingga AS sangat mendukung gerakan liberalisasi, menentang bentuk perdagangan *previlege* (sekalipun pada akhirnya, terjadi

pembatasan juga ketika negara tersebut muncul sebagai kekuatan ekonomi).

2) *Free trade* dipandang sebagai prinsip yang harus dipertahankan dari kolonialisme (*free trade* adalah sisi positif dari kolonialisme)

3) *Positive sum game* dalam *free trade* sama artinya dengan ketika salah satu pihak menang bukan berarti yang lain kalah.

4) Konsep yang berlaku adalah *opportunity cost* dan *comparative advantage.*

5) Perdagangan mata uang nasional menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem moneter kapitalis. Tinggi rendahnya nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh perubahan tingkat inflasi dan tingkat bunga bank.

2. Tipe Pokok SMI

a. Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) → yang nilai tukar antarmata uang sangat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, misalnya standar emas dan Bretton Woods.

b. sistem nilai tukar mengambang (*flexible atau floating exchange rate*) → ditentukan pasar devisa

c. sistem terkelola (*managed atau coordinated exchange rate*) → negara dan pasar sama-sama menentukan tingkat nilai tukar mata uang.

Nilai tukar umumnya ditentukan oleh kekuatan pasar dan karena itu berubah setiap hari, karena kecenderungan dan kejadian dalam Ekonomi Politik Internasional cenderung mengubah permintaan dan penawaran terhadap satu mata uang relatif terhadap yang lain.

Nilai Tukar Tetap (*Fixed* atau "*pegged" exchange rate*)
Sistem standar emas (akhir abad ke-19) argumen

1) Kalau nilai mata uang ditetapkan atas dasar harga emas, sedangkan emas diperdagangkan secara bebas internasional, maka mekanisme *supply & demand* di pasar dengan sendirinya akan menentukan secara tepat harga equilibirium emas, sekaligus menyeimbangkan pembayaran internasional di antara bangsa-bangsa.
2) Berhasil berkat hegemoni Inggris yang bersedia menanggung beban menjamin kestabilan sistem moneter internasional. Namun, akhirnya Inggris mengalami kelemahan dalam sistem finansial dalam negeri sendiri.

3. Sejarah SMI Sistem Ekonomi Internasional Pasca PD II

a. Sistem *Bretton Woods* (Pasca Perang Dunia II) →1946-1973

Pada 1944 pemimpin ekonomi negeri sekutu berkumpul di *Bretton Woods* untuk menciptakan suatu tata ekonomi internasional yang stabil dan fleksibel. Sistem imi merupakan dominasi AS dengan tiga komponen yaitu : Bank Dunia (*International Bank for Reconstruction and Development* - IBRD), IMF dan GATT.

Hasilnya diuraikan berikut ini.

a) IMF,GATT, dan sistem nilai tukar *Bretton Woods*. Sistem tersebut adalah sistim moneter internasional yang multilateral (bertumpu pada lembaga-lembaga internasional yang pluralistik.)
b) Merupakan standar emas–dollar. AS kesulitan membendung arus dollar keluar negaranya karena ini merupakan cara efektif mengelola sistem ekonomi domestik yang masih kompleks (dengan membeli barang luar negeri dan investasi luar negeri). Pada 1971 Nixon membatalkan kaitan antara nilai dollar dan emas.

b. Runtuhnya sistem Pasca PD II (Pasca *Bretton Woods*)

Akibat runtuhnya sistem oasca PD II adalah berikut ini.

a) Hilangnya hegemoni AS → kebijakan ekonomi AS defisit.
b) Runtuhnya sistem pertukaran yang tetap: lebih banyak dollar di luar AS daripada di AS, cadangan emas tidak mencukupi.
c) Nilai tukar mengambang.
d) Kekuatan ekonomi kolektif (G7 dan G77).
e) Terbentuknya WTO → institusionalisasi sistem perdagangan :
   Hasilnya :
f) Perluasan cakupan perdagangan: jasa, pertanian dan hak milik intelektual (hak cipta)
g) Mekanisme penyelesaian konflik perdagangan.
h) SMI (Sistem Monoter Internatsional): sistem yang mengatur hubungan finansial di antara negara-negara, sistem yang mengorganisasikan devisa.

c. Sistem Moneter Internasional (SMI)

Struktur hubungan yang menentukan bagaimana pembayaran internasional dilakukan dan bagaimana pembayaran internasional diselesaikan, karena pembayaran internasional umumnya melibatkan transaksi devisa (misalnya mengkonversi *rupiah* ke *yen* untuk bayar impor barang dari Jepang). Lebih mudah lagi untuk membayangkan SMI sebagai sistem yang mengorganisasikan devisa.

d. Tujuan Pokok SMI

Stabilitas, sehingga muncul komitmen jangka panjang antara bangsa-bangsa yang terlibat dan fleksibilitas.

EPI terdiri atas berbagai negara bangsa dan pasar yang saling dikaitkan oleh suatu kerangka hubungan/struktur yang mengatur perilaku dan interaksi negara dan pasar itu. Struktur finansial terdiri atas sekumpulan hubungan moneter atau finansial

yang mewadahi kegiatan negara dan pasar. Hubungan finansial mempengaruhi semua jenis interaksi negara dan pasar.

Struktur finansial berfungsi dalam sesuatu yang disebut SMI, salah satu bagian EPI yang paling abstrak dan misterius. Cara paling mudah untuk memahaminya adalah dengan membayangkannya sebagai sekumpulan aturan dan praktik yang mengatur agar hutang di antara negara-negara yang terlibat diakui dan dibayar. Berikut ini akan dibahas ekonomi politik nilai tukar mata uang dan sistem moneter dengan memusatkan perhatian pada sejarah sesudah PD II dan beberapa masalah serta isu yang mendominasi dunia keuangan internasional masa kini.

Mata uang berfungsi sebagai alat tukar yang bisa dipertukarkan dengan barang dan jasa di negara yang menerbitkannya. Dalam praktik terdapat dua macam mata uang, yaitu mata uang kuat (*hard currency*) dan mata uang lemah (*soft currency*)

e. Mata Uang Kuat

Diterbitkan oleh negara-negar besar, sistem ekonomi yang kekuatannya bisa diandalkan. Perilakunya bisa diramalkan dengan politik dalam negeri dan hubungan internasional yang stabil misalnya AS, Jepang, Swiss dan Inggris.

f. Mata Uang Lemah

Hanya dipakai di dalam negaranya saja, karena nilainya tidak pasti atau karena volume transaksinya tidak cukup banyak untuk mendukung, misalnya negara-negara berkembang dan Blok Timur.

Walaupun pada dasarnya banyak faktor ekonomi yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya nilai tukar mata uang, terdapat dua faktor yang paling penting, yatu :

1. perubahan tingkat laju inflasi dan
2. tingkat bunga bank.

C. Institusi Ekonomi Internasional

1. *General Agreement on Tariffs and Trade (*GATT*)*

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau perjanjian umum tentang tarif-tarif dan perdagangan didirikan pada 1948 di Genewa, Swiss. Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara, tetapi pada saat sidang terakhir di Marakesh pada 5 April 1994 jumlah negara penandatangan sebanyak 115 negara. Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam tiga prinsip berikut.

- Prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya harus juga diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut.
- Prinsip *most favored nation*, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu atau sekelompok negara tertentu.
- Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.

Sesuai dengan perkembangannya, masing-masing negara anggota GATT menghendaki adanya perdagangan bebas. Pada pertemuan di Marakesh, Maroko 5 April 1994 GATT diubah menjadi World Trade Organization (WTO) mulai tanggal 1 Januari 1995.

Lahirnya membawa dua hal perubahan mendasar, yaitu :

a. WTO mengambilalih peran GATT dan menjadikannya sebagai salah satu lampiran aturan WTO dan
b. prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO. Misalnya GATS, TRIMS, TRIPS.

Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta juga untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim

perdagangan yang seha. Pada dasarnya ada empat tujuan penting yang hendak dicapai GATT, yaitu:

1) meningkatkan taraf hidup umat manusia;
2) meningkatkan kesempatan kerja;
3) meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan
4) meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.

Adapun fungsi adanya institusi GATT sebagai berikut. Pertama, suatu perangkat ketentuan [aturan] multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara- negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan. Kedua, sebagai suatu forum [wadah] perundingan perdagangan dan diupayakan agar praktek perdagangan dapat dibebaskan dari rintangan-rintangan yang mengganggu [liberalisasi perdagangan]. Ketiga, GATT mengupayakan agar aturan atau praktik perdagangan demikian itu menjadi jelas baik melalui pembukaan pasar nasional atau melalui penegakan dan juga penyebarluasan pemberlakuan peraturannya.

Keuntungan adanya GATT sebagai berikut. *Pertama*, perundingan perdagangan memungkinkan para pihak secara bersama-sama dapat memecahkan masalah-masalah perdagangan yang cukup luas. *Kedua*, para pihak akan lebih mudah membahas komitmen-komitmen perdagangan di suatu putaran perundingan daripada membahasnya dalam lingkup bilateral. *Ketiga*, negara-negara sedang berkembang dan negara-negara kurang maju akan lebih memiliki kesempatan yang lebih luas dalam membahas sistem perdagangan multilateral dalam lingkup suatu perundingan dan akan lebih menguntungkan negara-negara sedang berkembang dibandingkan apabila mereka berunding langsung dengan negara-negara maju; dan *Keempat*, dalam merundingkan sektor perdagangan dunia yang sensitif, pembahasan atau perundingan akan relatif dapat lebih mudah dalam konteks suatu forum yang sifatnya global. Misalnya, adalah pembahasan isu pertanian dalam Perundingan Uruguay.

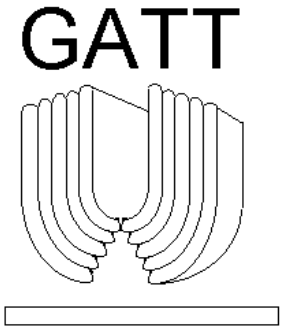

Garis-garis Besar Ketentuan GATT

GATT memiliki 38 pasal. Secara garis besarnya, dari pasal-pasal dibagi ke dalam 4 bagian:

Bagian Pertama : Pasal 1, Pasal Utama menetapkan prinsip utama GATT, MFN Treatment pada anggota. Pasal 2 Penurunan Tarif yang disepakati berdasarkan GATT.

Bagian Kedua : Memuat 30 Pasal (Ps III-Ps XXII).

Bagian Ketiga : Berisi 11 Pasal.

Bagian Keempat : Terdiri dari empat pasal yang ditambahkan pada tahun 1965. Bagian ini berisi kebutuhan-kebutuhan khusus darai negara-negara sedang berkembang.

2. *World Trade Organization (*WTO*)*

World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia ini merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan PBB. Pengertian W.T.O adalah organisasi internasional yang mengawasi berbagai persetujuan yang memiliki definisi aturan perdagangan diantara negara-negara yang sudah menjadi anggota dari W.T.O ini. W.T.O ini sudah memiliki banyak anggota yang tergabung di dalamnya salah satunya adalah Indonesia.

Pengertian W.T.O yang dimana memiliki tujuan untuk mengawasi dan menjadikan organisasi internasional ini sebagai salah satu organisasi dunia yang memiliki pengaruh yang cukup tinggi pula untuk menjadikan perdagangan dunia ini lebih teratur karena salah satu tujuan dari W.T.O juga mengatur perdagangan dunia jika terjadi perselisihan antarnegara anggotanya. Peranan W.T.O ini juga terkadang memiliki pro dan kontra karena jika sudah bergabung dengan W.T.O, maka kebijakan negara tentang perdagangan juga akan disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah disepakati ketika melakukan penandatanganan bergabung dengan W.T.O.

WTO memiliki fungsi-fungsi serta peran yang sudah disepakati oleh para anggota dan pendiri dari organisasi internasional ini. Beberapa fungsi dan perannya tentu sudah ditentukan pada awal organisasi ini berdiri. Peran dan fungsi ini terkadang masih menimbulkan pro dan kontra karena terkadang masih menguntungkan banyak negara yang dapat dikatakan memiliki prioritas yang cukup besar. Negara anggotanya masih mengikuti aturan lama yang dibuat oleh negara-negara yang berkuasa yang lebih dulu bergabung dengan World Trade Organization ini.

World Trade Organization ini memiliki beberapa fungsi seperti mendukung pengaturan, pelaksanaan serta penyelenggaraan persetujuan yang sudah dicapai untuk mewujudkan sasaran dari kerjasama tersebut. W.T.O sebagai tempat perundingan negara-negara anggota tentang perjanjian yang sudah dicapai, mengatur pelaksanaan perjanjian ketika mengalami perselisihan sengketa perdagangan dan yang terakhir adalah menciptakan kerangka kebijakan ekonomi global bersama dengan IMF dan World Bank.

World Trade Organization atau organisasi perdagangan dunia adalah organisasi internasioanal yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan paer dagangan antar Negara. *World Trade Organization* dibentuk pada tahun 1995 sebagai penganti dari dari *General Agreetment on Tarrif and Trade* (GATT). GATT merupakan persetujuan umum tentang tariff dan perdagangan yang dibentuk pada tahun 1947.

Tujuan didirikan GATT ialah untuk mengurangi hambatan perdagangan antar Negara dengan memerhatikan kepentingan Negara yang melakukan transaksi perdagangan. *General Agreetment on Tarrif and Trade* dibubarkan di Jenewa, Swiss pada 12 Desember 1995. Pembubaran GATT dilakukan setelah organisasi ini berjalan berdampingan dengan WTO.

World Trade Organization didirikan untuk melaksanakan tugas – tugas berikut ini.

a. Memantau pelaksanaan perjanjian dagang
b. Mengevaluasi kebijakan perdagangan nasional negara anggota.
c. Sebagai forum negosiasi perdagangan dan aktif menangani setiap konflik perdagangan yang terjadi.
d. Memberikan bantuan teknik dan pelatihan untuk negara–negara berkembang.
e. Melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainya.

3. Prinsip Perdagangan yang sama dalam GATT dan WTO

a. **Perdagangan nondiskriminasi,** diartikan ketika suatu barang masuk ke suatu negara maka akan ada perlakuan yang sama terhadap barang yang sama dari negara lain. Bila satu negara diberi peluang maka negara lain juga demikian. Barang yang ada di dalam suatu negara harus diperlakukan sama dengan barang dari luar (tidak boleh *dumping*).
b. **Konsep *reciproxity* /berbalasan,** diartikan bila suatu negara melaksanakan suatu kebijaksanaan maka negara-negara lain harus melakukan hal serupa misalnya mengurangi tarif masuk.
c. **Prinsip multilateralisme,** diartikan kebijakan harus dilaksanakan tidak hanya dengan dengan satu negara, tetapi melibatkan banyak negara. Ini merupakan prinsip yang bisa dijalankan dalam konteks perdagangan nondiskriminasi.

D. Rangkuman

Aktivitas ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, secara tidak langsung telah membuat batas negara menjadi kabur. Tarik menarik antara mekanisme ekonomi dan politik internasional telah mendorong berkembangnya mekanisme EI. Hal ini ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga EI yang mendorong pencapaian-pencapaian ekonomi terukur secara global. Berawal dari Sistem Bretton Woods hingga WTO, menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi sangat mewarnai pergerakan politik internasional.

GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*)

1) Merupakan bentuk dari rezim perdagangan internasional AS yang lebih bersifat kesepakatan tentang tarif saja, bukan aturan/struktur organisasi
2) Bertujuan membebaskan perdagangan dari berbagai bentuk hambatan
3) Anggotannya disebut *"contracting party"*
4) Hanya mengatur perdagangan barang , tidak memiliki mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan, kecuali dalam bentuk kontrak.

WTO (*World Trade Organization*)

1) Berbentuk institusi untuk mengatur perdagangan internasional
2) Anggotanya disebut *"member"*
3) Mengatur perdagangan barang dan jasa
4) Memiliki mekanisme penyelesaian peselisihan
5) Masing-masing negara saling menjual kebijakan ekonomi
6) Berhasil menciptakan *code of conduct* yang punya *legal power*
7) Baru muncul 1995, selain berbeda dalam hal keanggotaan, WTO mengatur item perdagangan yang lebih luas daripada GATT.

E. Latihan dan Tugas

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan hubungan ekonomi dan politik secara internasional!
2. Sebutkan prinsip perdagangan yang sama dalam GATT dan WTO!
3. Diskusikan dengan teman pertanyaan berikut ini

   Apa dampak positif dan negatif perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia?

   Bagaimana cara untuk mengantisipasi adanya dampak negatif dari perdagangan internasional bagi perekonomian Indonesia?

   Faktor apa yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional?

   Faktor apa saja yang dapat menghambat perdagangan internasional?

   Apa tujuan suatu negara menerapkan kebijakan tarif dalam penjualan internasional?

BAB VIII
DINAMIKA DALAM SISTEM INTERNASIONAL

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan konsep dinamika dalam sistem internasional

Indikator Pencapaian

1. Mengidentifikasi konsep-konsep globalisme, regionalisme, dan konflik etnis
2. Mendeskripsikan batasan globalisme,regionalisme, dan konflik etnis

MATERI

A. Globalisme

Dewasa ini, globalisasi merupakan hal yang sering dibicarakan orang, baik orang awam maupun para akademisi. Dalam hubungan internasional kontemporer, globalisasi menjadi sebuah konsep yang mungkin paling banyak digunakan (Chandra, 2007: 89). Buktinya, perkembangan ilmu hubungan internasional selalu lekat dengan konsep globalisasi yang perannya saling memengaruhi satu sama lain. Kata globalisasi sendiri sering kali diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mendunia. Namun sebenarnya, globalisasi dapat diartikan berbeda-beda bagi banyak orang dalam penerapannya (Scholte, 2001:14). Para pakar atau akademisi memiliki perspektif mereka masing-masing dalam mendefinisikan globalisasi. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan diulas beberapa hal mengenai globalisasi, baik pengertian globalisasi dari para ahli, konsep-konsep globalisasi, hingga implikasi atau keterkaitan antara globalisasi dengan ilmu HI.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), globalisasi merupakan proses masuknya ke ruang lingkup dunia (Badudu & Zain, 2008). Pengertian globalisasi menurut KBBI yang luas tersebut sebanding pula dengan pengertian globalisasi milik Baylis dan Smith. Menurut mereka, globalisasi merupakan proses peningkatan interaksi

atau hubungan antarmasyarakat ke dalam satu bagian besar dunia global yang menimbulkan efek terhadap orang-orang yang jauh sekalipun (Smith & Baylis, 2001:7). Dunia global yang dimaksud tersebut memiliki cakupan yang begitu luas, seperti dalam bidang politik, ekonomi, budaya, sosial, militer yang semakin terhubung dan saling memiliki pengaruh satu sama lain. Dengan adanya globalisasi, maka akan terjadi lintas batas antarnegara yang cukup bebas (Hay, 2013:274). Hal tersebut dapat dilihat jelas khususnya di bidang teknologi dan komunikasi.

Pada masa sekarang, seseorang yang ingin mendapatkan informasi atau berkomunikasi dengan kerabatnya yang sedang berada di negara lain tidak perlu bersusah payah dengan menggunakan surat, telepon yang mahal, atau bahkan datang langsung ke sana. Dengan hadirnya internet yang merupakan wujud globalisasi, maka komunikasi dengan seseorang yang jauh sekalipun akan menjadi lebih mudah dan murah. Masih banyak pengertian globalisasi lainnya dari para akademisi HI. Seperti definisi yang dibuat oleh Emanuel Richter, seorang politikus dari Jerman. Globalisasi, dalam bahasa Jerman *die Globalisierung*, merupakan jaringan global yang terdiri atas masyarakat dunia yang pada awalnya terisolasi dan terpisahkan namun kemudian menjadi saling kebergantungan dan menyatu menjadi dunia global (Scholte, 2001:15). Definisi globalisasi dari Richter tersebut sangat bertentangan dengan definisi globalisasi menurut Martin Khor.

Martin Khor (1995) menyatakan bahwa globalisasi merupakan benih kolonialisme baru di negara-negara dunia ketiga. Hal tersebut jelas terlihat di negara-negara berkembang yang merupakan pasar perdagangan bebas dari negara-negara maju (Halliday, 1997: 441). Sebenarnya konsep perdagangan bebas lintas negara adalah salah satu wujud globalisasi dalam hubungan internasional. Dengan perdagangan bebas tersebut, negara-negara maju tidak perlu melakukan "penjajahan" secara fisik atau langsung terhadap negara-negara berkembang.

Scholte mengidentifikasi bahwa globalisasi dapat bermakna sebagai internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, dan

deteritorialisasi (Scholte, 2001:14). Pertama, makna internasionalisasi adalah meningkatnya intensitas interaksi lintas batas dan saling ketergantungan antarnegara. Kedua, liberalisasi dimaknai sebagai proses pembentukan ekonomi dunia yang lebih terintegrasi. Ketiga, universalisasi bermakna menyebarnya berbagai macam objek dan pengalaman dari masyarakat global di seluruh dunia. Keempat, westernisasi dimaknai sebagai proses peniruan budaya Barat atau bahkan proses untuk menekankan terhadap sistem budaya, sistem politik, dan sistem ekonomi negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, di dunia global (Smith & Baylis, 2001:10). Kelima, deteritorialisasi dimaknai sebagai hilangnya pengaruh batas wilayah negara. Terlepas dari pengertian atau definisi dari para ahli mengenai globalisasi, seorang pakar ilmu HI dari Inggris mengemukakan empat konsep dasar globalisasi (Held, 2000:15).

Konsep yang pertama adalah meluasnya hubungan sosial. Hal tersebut mengacu pada munculnya keterkaitan antara jaringan sosial dan budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat yang lintas negara. Konsep selanjutnya adalah meningkatnya intensitas komunikasi yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi jarak jauh secara mudah. Konsep ketiga adalah meningkatnya interpenetrasi yang mengakibatkan budaya dan masyarakat akan saling berhadapan dan bercampur pada level lokal menuju internasional (Chandra, 2007:133). Konsep terakhir adalah munculnya infrasrukur global dengan pengaturan kelembagaan melalui jaringan global.

Melihat implikasi globalisasi terhadap HI cukup besar, maka tentunya globalisasi memiliki pengaruh yang besar pula dalam HI. Globalisasi yang membuka peluang untuk lintas negara secara lebih bebas dianggap telah menciptakan sebuah masyarakat global atau biasa disebut sebagai *global society* (Barnett & Sikkink, 2008:63). Globalisasi mampu pula menciptakan perusahaan-perusahaan transnasional, seperti Samsung, Mc. Donald's yang mampu bersaing di dunia global. Perusahaan-perusahaan transnasional tersebut tidak hanya berdiri di satu atu dua negara saja, namun setiap orang dapat

menikmati produk-produk tersebut di negara mereka masing-masing. Selain itu, seperti yang sudah disinggung oleh penulis pada beberapa paragraf sebelumnya. Komunikasi yang termasuk dalam teknologi juga memiliki dampak yang begitu besar dalam hubungan internasional (Smith & Baylis, 2001: 9). Berkomunikasi melalui internet akan membuka jaringan dunia global secara luas dan mudah. Hal tersebut dapat dicontohkan melalui penggunaan aplikasi Skype yang dapat menguhubungkan seseorang dari Warsawa dengan seseorang di Indonesia secara cepat dan biaya yang murah.

Globalisasi merupakan segala sesuatu yang ada di masyarakat dan memiliki lingkup yang global. Segala sesuatu tersebut dapat ditemukan dalam kehidupan sekitar manusia, seperti saat mengonsumsi produk-produk luar negeri, menggunakan internet untuk mendapatkan informasi, dan sebagainya. Memang studi awal menunjukkan bahwa globalisasi dimulai pada akhir abad 19 ketika intensitas perdagangan antarnegara meluas dan migrasi serta investasi ekonomi mulai meningkat (Chandra, 2007:133). Namun, lambat laun globalisasi membawa dampak lebih kompleks, seperti di bidang teknologi, budaya, lingkungan, yang memaksa masyarakat dunia untuk menjadi global society yang membentuk tatanan baru.

Tatanan baru tersebut dapat diwujudkan dalam partisipasi masyarakat global di NGOs, INGOs, seperti *Greenpeace*, *Save the Children*, dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi yang memunculkan berbagai isu global tersebut, negara tentunya tidak akan mampu bekerja sendiri. Oleh karena itu, maysarakat global lintas negara juga hadir di era globalisasi kini dalam membantu peran negara untuk menyelesaikan isu-isu global yang ada.

B. Regionalisme

Akhir Perang Dingin dan meluasnya globalisasi membuat studi tentang regionalisme yang mencoba menempatkan *general theory* ke dalam kerangka regional menjadi kajian penting dalam studi HI. Teori HI klasik yang meletakkan fokusnya pada power dan konstelasi politik antarnegara kemudian memerlukan beberapa penyempurnaan karena

keadaan global telah diwarnai dengan berkurangnya kapasitas negara berkurang serta kaburnya batas-batas kedaulatan negara memunculkan pola politik baru yang mengasosiasikan kepentingan nasional ke dalam kepentingan regional.

Dalam mengaji regionalisme dan interaksi yang terjadi di dalamnya, diperlukan adanya teori-teori yang dapat menjelaskan proses yang terjadi secara keseluruhan. Menurut Hurrell, teori dapat di pahami sebagai kerangka berpikir untuk memperoleh penjelasan logis tentang suatu permasalahan serta menempatkan masalah itu ke dalam serangkaian penjelasan yang lebih luas. Teori memiliki arti penting dalam membuat berbagai proses dan perkembangan dalam regionalisme seperti proses regionalisasi ekonomi dan sosial, pertumbuhan identitas regional, formasi dari institusi antarregional dan kemunculan blok politik regional menjadi lebih mudah dimengerti sekaligus menggunakan teori tersebut dalam studi kasus.

Dalam menjelaskan regionalisme, ada beberapa teori yang dapat digunakan, yaitu Teori Sistem. Teori ini menggarisbawahi pentingnya struktur ekonomi dan politik yang lebih luas serta dampak yang dapat diberikan oleh pihak luar terhadap region itu sendiri. Teori ini memiliki dua pandangan utama. Pandangan pertama, neorealisme, menitikberatkan pada sistem internasional yang anarki serta pentingnya kompetisi power dan politik. Neorealisme juga berfokus terhadap ancaman dan pengaruh pihak eksternal terhadap suatu region. Aliran ini tidak terlalu memikirkan apakah regionalisme berjalan dalam ranah politik atau ekonomi karena para neorealis melihat politik dan kompetisi ekonomi merkantilis sebagai pembentuk *power* yang dibutuhkan dalam dunia tanpa pemerintahan (anarki). Karena dunia adalah anarki, maka neorealis menganggap pentingnya hegemoni yang dapat diwujudkan dalam institusi regional.

Hegemoni menguat dalam kerangka institusi. Hal ini diperkuat oleh *theory of hegemonic stability* yang pembentukan kerjasama institutionalnya bergantung pada ketidakmerataan *power* dalam keberadaan hegemoni. Bila negara dengan *power* lebih besar berusaha menjadikan institusi regional sebagai sarana hegemoni legal, maka

negara dengan *power* lebih kecil menggunakan institusi regional sebagai senjata perlawanan terhadap dominasi negara *superpower*.

Kelebihan aliran neorealisme ini terletak pada kemampuannya menjelaskan pentingnya kekuatan eksternal dan kuatnya hegemoni. Aliran ini juga menjelaskan dengan baik bagaimana logika tentang interaksi strategis para aktor dalam kerangka institusi regional. Namun kelemahannya aliran ini hanya berbicara sedikit tentang berbagai karakter kerjasama regional sebagai ciri khusus yang membedakan regionalisme dari komunitas lain seperti aliansi dan organisasi internasional.

Pandangan kedua, interdependensi struktural dan globalisasi, yang muncul sebagai kritik terhadap diabaikannya dinamika perubahan struktur oleh neorealis. Para penganut aliran interdependensi struktural dan globalisasi -Nye, Keohane dan Morse- mengemukakan pandangan mereka tentang perubahan mendasar yang terjadi dalam sistem internasional, yaitu meluasnya globalisasi sejak era 1990an. Para ahli memandang regionalisme sama kompleksnya dengan konstelasi global karena sifat multidimensi dalam regionalisme tidak hanya membahas negara tetapi juga semua unsur-unsur kekuatan di dalamnya seperti perusahaan dan kelompok sosial. Para ahli lain memandang regionalisme sebagai kritikan untuk globalisasi serta terhadap strategi yang dilakukan aktor untuk menghadapi globalisasi. Mereka juga menekankan pentingnya sistem politik yang mengatur *distribution of power* yang merupakan faktor penting untuk menjelaskan pola regionalisme antarwaktu.

Kaum realis menganggap ketidakmerataan *power* memunculkan pemikiran otonom yang tidak bisa diatasi oleh pasar kapitalis dan *civil society*. Globalisasi memunculkan perubahan di bidang regulasi *massive* dalam *supra-state* level dan memunculkan *administrative government.*

Globalisasi menempatkan batas region lebih berarti daripada batas negara. Dalam hubungannya dengan institusi regionalis ala kaum liberalis, ada kalanya globalisasi bertentangan dengan regionalisme dan ada kalanya keduanya saling mendukung. Regionalisme bertentangan

dengan globalisasi ketika globalisasi menyebabkan interdependensi antar negara meluas dan memunculkan masalah-masalah yang membutuhkan perhatian global seperti pengungsian dan kejahatan kemanusiaan. Dalam isu global ini, peranan organisasi internasional lebih diperlukan daripada organisasi regional. Selain itu penyebaran organisasi regional juga dirasa lebih 'kebarat-baratan' sehingga norma dan identitas organisasi regional menjadi kabur. Globalisasi dapat menjadi katalis regionalisme ketika kebutuhan untuk mengadakan integrasi dalam kawasan meningkat. Selain itu organisasi regional dibutuhkan untuk menangkal efek kapitalisme yang dibawa oleh globalisasi yang mengancam perekonomian.

Akhir Perang Dunia membuat dominasi *superpower* hilang sehingga kekuatan regional mulai mencoba mendominasi. Interdependensi antarregion memunculkan konflik keamanan dari dalam sekaligus ancaman intervensi dari luar. Keadaan ini memunculkan kebutuhan untuk keamanan politik walaupun usaha ini diselubungi dengan 'wajah' institusi ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, interdependensi adalah ciri khusus yang jelas terlihat dalam regionalisme. Teori ini menyertai tiga pandangan utama tentang interdependensi dan kerjasama.

Pandangan pertama, neofungsionalisme berpendapat bahwa peningkatan interdependensi akan memunculkan kerjasama yang pada akhirnya membuahkan integrasi politik. Pandangan lain, neoliberal-institusionalisme memandang keberadaan institusi sebagai jawaban atas kebutuhan *collective action*. Institusi ini penting mengingat banyaknya keuntungan yang dapat diberikan kepada negara-negara yang tergabung di dalamnya. Pandangan ini kemudian fokus pada pola interaksi strategis yang dilakukan para aktor untuk meningkatkan kerjasama. Pandangan terakhir menitikberatkan pada identitas regional sehingga lebih memandang regionalisme dari tatanan sosial daripada ekonomi. Aliran ini disebut kontruktivisme, membangun konstruksi sosial untuk meningkatkan integrasi dan kohesi regional.

Dalam teori Intra Regional ini memasukkan teori Heartland karya Mackinder yang pada awalnya bertujuan untuk menciptakan

pasar bersama dalam kepentingan ekonomi transnasional. Regionalisme Institusi regional dipandang sebagai solusi yang ditujukan untuk berbagai masalah *collective action* yang ditimbulkan oleh interdependensi karena institusi mempengaruhi pembuatan keputusan dalam perhitungan *cost and benefit*, mengurangi biaya transaksi, menyediakan informasi dan transparansi serta memfasilitasi pelaksanaan.

Sedangkan dalam level domestik, organisasi regional dilihat dari kesamaan internal yang dimiliki negara anggota seperti sejarah, tradisi, bahasa, etnis, dan sebagainya. Fokusnya adalah melihat regionalisme dari kacamata hubungan regionalisme dengan koherensi negara serta tipe rezim dan demokratisasi.

C. Konflik Etnis

Menurut Wese Becker, konflik merupakan proses sosial dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang di sertai dengan ancaman atau kekerasan. Dalam bukunya *International Politik*, K.J Holsti mengemukakan bahwa konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisir muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu (Holsti,1983). Bentuk konflik biasanya teridentifikasikan oleh suatu kondisi oleh sekelompok manusia, yang di dalamnya terdiri dari suku, etnis, budaya, agama, ekonomi, politik, sosial, yang berbeda beda.

Sumber konflik sendiri terletak pada hubungan antara sistem-sistem negara-negara kebangsaan yang dilandasi oleh konsep ”*egosentrisme*”, yaitu aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan serta kedudukan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Bila suatu negara terlalu berpegang teguh pada pengakuan universal atas kemerdekaan politiknya dan kebebasan memilih serta bertindak, negara tersebut akan menemui dilema karena harus menghormati kebebasan dan kemerdekaan yang sama dari setiap negara lain. Akan tetapi, sebenarnya tidak ada negara satu pun yang

bisa memercayai negara lain, artinya keselamatan negara bergantung kepada usaha-usaha sendiri, karena itu setiap negara harus bersikap hati-hati dalam memelihara hubungan dengan negara lain.

Studi konflik internal mengemuka dalam dekade terakhir ini, terutama bersamaan dengan makin maraknya konflik horisontal antarras, etnis dan agama di dalam wilayah suatu negara. Sangat ironis bahwa ketika konflik ideologi mewarnai era perang dingin telah mulai mereda, konflik-konflik internal di dalam batas wilayah suatu wilayah dalam bentuk gerakan separatis dan kerusuhan massal ternyata menelan korban manusia yang makin besar. Contoh, pada tahun 1994 di Rwanda dalam kurun waktu hanya tiga bulan sekitar 800 ribu sampai satu juta manusia terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah kelompok minoritas Tutsi (Yulius,2007).

Menurut Michel E. Brown, menyebutkan beberapa alasan mengapa konflik internal penting untuk dilakukan tidak hanya dalam studi ilmu politik tetapi juga dalam kurikulum HI berikut.

a. Pertama, konflik internal telah merebak ke banyak negara dan menimbulkan aksi-aksi kekerasan.
b. Kedua, konflik internal telah menyengsarakan masyarakat yang menjadi korban yang tidak berdaya akibat konflik, seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pengusiran.
c. Ketiga, konflik internal penting karena sering melibatkan negara-negara tetangga sehingga bisa menimbulkan konflik perbatasan. Pengungsi yang menyeberang ke negara tetangga atau pemberontakan yang mencari perlindungan ke negara tetangga dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat memicu konflik bersenjata antarnegara yang bertetangga.
d. Keempat, konflik internal penting karena sering mengundang perhatian dan campur tangan dari negara-negara besar yang terancam kepentingannya dan organisasi internasional (Yulius,2007).

Penyebab konflik internal menurut Edward Azar, menyebutkan ada empat pra-kondisi yang mengarah pada terjadinya atau pemicu konflik internal berikut.

a. Pertama, hubungan yang tidak harmonis antara kelompok identitas seperti suku, agama dan budaya dengan pemerintah. Pemerintah cenderung tidak mengakui eksistensi kelompok identitas tersebut dan bahkan berusaha mengeliminasinya demi kepentingan dan keutuhan negara. Akibatnya, terjadi pertentangan terhadap kelompok identitas tertentu dan mendorong para anggotanya untuk melakukan perlawanan terhadap negara. Contohnya, pemerintah Orde Baru telah mengancam eksistensi kelompok identitas Aceh dan Papua sehingga mereka bangkit dan melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah pusat.

b. Kedua, konflik juga dikaitkan dengan kenyataan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaan sehingga terjadi proses kemiskinan. Proses secara ekonomi telah menciptakan kemiskinan sementara kekuatan ekonomi dan politik dari pusat menikmati surplus ekonomi sebagai hasil eksploitasi SDA di daerah-daerah yang dilanda konflik. Contoh, bagi rakyat Aceh dan Papua bahwa di tengah kekayaan alam mereka yang berlimpah terdapat jumlah penduduk miskin yang tergolong tinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang tidak memiliki SDA.

c. Ketiga, sebab konflik internal berkaitan dengan karakteristik pemerintahan yang otoriter dan mengabaikan aspirasi politik dari masyarakat. Dalam hal ini pemerintah pusat menyakini asumsi bahwa kekuasaan yang terpusat (sentral) menjamin kontrol yang efektif atas masyarakat. Bahkan kekuatan militer digunakan terhadap setiap bentuk protes atau perlawanan terhadap pemerintahan yang otoriter. Pemerintah daerah juga tidak dapat berfungsi sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat daerah dikarenakan elit-elit daerah ikut menikmati eksploitasi SDA.

d. Keempat, konflik internal dikaitkan dengan *International Linkages*, yaitu sistem kebergantungan yang terjadi antara negara dengan sistem ekonomi global dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih memihak kekuatan modal asing daripada kepentingan penduduk lokal. Misalnya, dalam rangka melindungi kepentingan investor asing pemerintah rela menindas rakyatnya sendiri dan mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai manusia (Soekamto,1990).

Menurut Michel E. Brown, kompleksitas konflik internal tidak hanya dijelaskan hanya oleh satu faktor atau variabel pada kebijakan atau perilaku elit pemimipin sebagai pemicu terjadinya konflik di suatu daerah, bahwa faktor-faktor sruktural, politik, ekonomi, sosial, budaya menjadikan suatu daerah rentan terhadap terjadinya konflik. Untuk itu, Brown membedakan *underlying causes of conflict* dari *the proximate causes of conflict*, secara lebih lengkap lihat pada tabel.

Tabel 1.1. Sebab-sebab utama dan sebab-sebab pemicu konflik internal

Sebab utama (*underlying causes*)	**Sebab pemicu (*proximate causes*)**
Faktor Struktural : • Negara yang lemah • Kekhawatiran tentang keamanan internal • Geografis etnis	**Faktor Struktural :** • Negara yang sedang runtuh/gagal • Perubahan perimbangan kekuatan militer • Perubahan pola-pola demografis
Faktor Politik : • Lembaga politik yang diskriminatif • Ideologi nasional yang eksklusif • Politik antarkelompok • Politik elit	**Faktor Politik :** • Transisi politik • Ideologi eksklusif yang semakin berpengaruh • Persaingan antarkelompok yang semakin tajam • Pertarungan kepimpinan yang semakin tajam

Faktor Ekonomi/Sosial : • Masalah ekonomi • Sistem ekonomi yang diskriminatif • Pembangunan ekonomi dan modernisasi **Faktor Sosial Budaya :** • Pola diskriminasi budaya • Sejarah kelompok yang bermasalah	**Faktor Ekonomi/Sosial :** • Masalah ekonomi yang semakin parah • Ketimpangan ekonomi yang semakin lebar • Pembangunan ekonomi dan modernisasi yang cepat **Faktor Sosial Budaya :** • Pola diskriminasi budaya yang semakin kuat • Penghinaan etnis dan propaganda

Sumber : Yulius P. Hermawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007, hal. 91

D. Rangkuman

Globalisme merupakan proses peningkatan interaksi atau hubungan antarmasyarakat ke dalam satu bagian besar dunia global yang menimbulkan efek terhadap orang-orang yang jauh sekalipun konflik etnis merupakan proses sosial dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

E. Latihan dan Tugas

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan globalisasi?
2. Sebutkan pengaruh atau dampak apa saja yang terjadi dengan adanya globalisasi?
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan regionalisme?
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan konflik etnis?
5. Sebutkan sebab-sebab pemicu konflik!
6. Diskusikan pertanyaan berikut ini

Bagaimana keterkaitan HI jika dikaitkan dengan manusia sebagai makhluk sosial?
Apakah HI hanya menyangkut tentang interaksi internasional saja?
Jelaskan bagaiaman hubungan regional ASEAN bisa terjadi?

BAB IX
INDONESIA DALAM POLITIK DUNIA

Kompetensi Dasar

Menjelaskan politik luar negeri Republik Indonesia dalam perpolitikan dunia

Indikator Pencapaian

1. Menjelaskan proses lahirnya politik luar negeri Republik Indonesia
2. Menjelaskan konsepsi politik luar negeri Republik Indonesia

MATERI

Setiap negara memiliki orientasi politik luar negerinya masing-masing.Politik luar negeri yang dijalankan oleh setiap negara pada dasarnya merupakan suatu komitmen berupa strategi dasar dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya.Politik luar negeri juga menjadi cerminan keinginan dan aspirasi seluruh rakyat suatu negara yang harus diperjuangkan pemerintahnya di luar negeri, baik dalam konteks dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, politik luar negeri menjadi upaya dalam menentukan keterlibatan suatu negara di dalam konstelasi politik internasional maupun isu-isu intenasional dan lingkungannya.

Pada hakikatnya, politik luar negeri merupakan suatu bentuk upaya dalam mempertemukan kepentingan nasional, khususnya rencana pembangunan nasional dengan perkembangan dan perubahan lingkungan internasional.Sesungguhnya politik luar negeri suatu negara merupakan perpaduan antara kekuatan nasional, kepentingan nasional, dan tujuan nasional. Ketiga unsur ini memiliki posisi yang sederajat dalam perumusan politik luar negeri suatu negara. Dengan kata lain, semakin besar kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai, maka harus semakin besar pula kemampuan atau kekuatan untuk mencapainya.

Politik luar negeri adalah komponen dari kebijaksanaan politik nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi-kondisi real di dalam negeri.Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor domestik dan faktor internasional yang memiliki arti korelatif dan saling mempengaruhi. Beberapa faktor domestik yang memengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri diantaranya: sumber daya alam, sumber daya manusia, pemerintah, media massa, kelompok kepentingan, partai politik, dan ideologi bangsa.

Demikian halnya dengan Indonesia sebagai suatu negara memiliki dan melaksanakan politik luar negerinya sendiri dalam hubungannya dengan negara lain dan lingkungan internasional pada umumnya. Hal ini menjadi satu bukti eksistensi dan kedaulatan negara Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mencoba memadukan kemampuan atau kekuatan serta potensi yang ada dalam negeri tanpa menafikan kelemahan yang dimiliki untuk menghasilkan rumusan politik luar negerinya.

Secara wilayah, Indonesia memiliki arti strategis di kawasan karena berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera. Sebagai negara maritim, Indonesia kaya potensi sumber daya alamnya. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia, dengan susunan demografi dalam kemajemukan/ heterogenitas penduduknya yang disatukan oleh sebuah falsafah yang disebut Pancasila.Dewasa ini, Indonesia diakui sebagai negara yang melaksanakan sistem demokratis dalam pemerintahan.

Pelaksanaan politik luar negeri RI memiliki dua aspek utama, yaitu: (1) upaya untuk mendukungpencapaian kepentingan nasional dan (2) upaya untuk ikut berkontribusi terhadapkemaslahatan dunia internasional. Perkembangan dinamikasituasi global ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dankompleks. Di samping isu-isu yang bersifat tradisional, munculnya isu-isu nontradisional danfenomena perkembangan geopolitik serta geoekonomi, baik di tingkat global maupun regional,merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia.Berbagai

tindak prioritas bidang politik luar negeri RI dan juga program-program kerja lainnyadalam tataran bilateral, regional maupun multilateral. Berbagai aktivitas yang dilakukan ditujukanuntuk memperkukuh peranan Indonesia di forum internasional dengan tetap mengacu pada prinsippolitik luar negeri RI yang bebas dan aktif.

A. Lahirnya Politik Luar Negeri yang Bebas - Aktif

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negerinya.Akan tetapi, pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada tiga sasaran utama yaitu; 1) memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI, 2) mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia, 3) mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan, dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk *good offices*ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Sesuai dengan sasaran utama kebijakan politik luar negeri di atas, makaIndonesia harus berusaha memperkuat kekuatan diplomasinya dengan menarik simpati negara-negara lain.

Pada masa awal berdirinya negara Indonesia, dalam perang dingin yang sedang berkecamuk antara Blok Amerika (Barat) dengan Blok Uni Soviet (Timur), Indonesia memilih sikap tidak memihak kepada salah satu blok yang ada. Hal ini untuk kali pertama diuraikan Syahrir, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri di dalam pidatonya pada *Inter-Asian Relations Conference* di New Delhi pada 23 Maret–2 April 1947. Dalam pidatonya tersebut, Syahrir mengajak bangsa-bangsa Asia untuk bersatu atas dasar kepentingan bersama demi tercapainya perdamaian dunia, yang hanya bisa dicapai dengan cara hidup berdampingan secara damai antar bangsa serta menguatkan ikatan antara bangsa ataupun ras yang ada di dunia. Dengan demikian, di dalam perang dingin antara Amerika Serikat dan

Uni Soviet yang memecah-belah persatuan, sikap tidak memihak adalah sikap yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian dunia atau paling tidak meredakan perang dingin tersebut.

Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam perang dingin tersebut selain untuk meredakan ketegangan yang ada juga dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional Indonesia saat itu, yaitu mencari dukungan dunia Internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Oleh karena itu, keterikatan pada salah satu kubu (blok) yang ada belum tentu akan mendatangkan keuntungan bagi perjuangan kemerdekaannya. Hal ini disebabkan pada waktu itu negara-negara Blok Barat (Amerika) masih ragu-ragu untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia menghadapi Belanda yang juga termasuk salah satu dari Blok Barat. Di pihaklain, para pemimpin Indonesia saat itu juga masih ragu-ragu dan belum dapat memastikan apa tujuan sebenarnya dari dukungan-dukungan yang diberikan negara Blok Timur terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Selain itu, Indonesia pada saat itu disibukkan oleh usaha mendapatkan pengakuan atas kedaulatannya, sehingga Indonesia harus berkonsentrasi pada masalah tersebut.

Secara resmi, politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan keterangannya kepada BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) mengenai kedudukan politik Indonesia pada September 1948, pada saat itu Hatta mengatakan bahwa:

> ".....tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tidak ada pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Pemerintahan berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik Internasional, melainkan kita harus menjadi subyek yang berhak menentukan sikap kita

> sendiri, berhak memperjuangkantujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya."(Sumber: Sejarah Diplomasi RI dari Masa ke Masa, Deplu, 2004)

Dari pernyataan Mohammad Hatta tersebut jelas terlihat bahwa Indonesia berkeinginan untuk tidak berpihak pada salah satu blok yang ada pada saat itu. Bahkan bercita-cita untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi atau minimal meredakan perang dingin yang ada dengan cara bersahabat dengan semua negara baik di Blok Barat maupun di Blok Timur, karena hanya dengan cara demikian cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia dapat dicapai. Walaupun Indonesia memilih untuk tidak berpihak kepada salah satu blok yang ada, tidak berarti Indonesia berniat menciptakan blok baru. Oleh karena itu menurut Hatta, Indonesia juga tidak bersedia mengadakan atau ikut campur dengan suatu blok ketiga yang dimaksud untuk mengimbangi kedua blok raksasa itu.

Sikap yang demikian inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah Bebas Aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya Indonesia tidak hanya tidak berpihak pada salah satu blok, tetapi juga "aktif" dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara "bebas" mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar saling menghargai.Sejak Mohammad Hatta menyampaikan pidatonya berjudul "Mendayung Antara Dua Karang" di depan Sidang BP KNIP pada September 1948, Indonesia menganut politik luar negeri bebas-aktif yang dipahami sebagai sikap dasar Indonesia yang menolak masuk dalam salah satu Blok negara-negara *superpower*, menentang pembangunan pangkalan militer asing di dalam negeri, serta menolak terlibat dalam pakta pertahanan negara-negara besar. Namun, Indonesia tetap berusaha aktif terlibat dalam setiap upaya meredakan ketegangan di dunia internasional (Pembukaan UUD 1945).

Politik luar negeri RI yang bebas dan aktif itu dapat diartikan sebagai kebijaksanaan dan tindakan-tindakan yang diambil atau

sengaja tidak diambil oleh Pemerintah dalam hubungannya dengan negara-negara asing atau organisasi-organisasi internasional dan regional yang diarahakan untuk tercapainya tujuan nasional bangsa.Politik luar negeri bebas aktif inilah yang kemudian menjadi prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan selanjutnya.Tentunya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif ini juga disesuaikan dengan kepentingan dalam negeri serta konstelasi politik internasional pada saat itu.

B. Konsepsi Politik Luar Negeri RI

Politik luar negeri merupakan serangkaian kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional, dalam usaha untuk mencapai tujuan nasional. Kebijakan tersebut merupakan akumulasi dari kepentingan rakyat yang disebut sebagai kepentingan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memroyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antarbangsa. Dengan kata lain, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Hal ini sejalan dengan definisi yang disebutkan Goldstein, ”*Foreign policies are the strategies used by governments to guide their actions in the international arena”* (Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan pemerintah sebagai pedoman tindakan dalam kancah internasional).

Plano dan Olton menegaskan pula bahwa politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa politik luar negeri sengaja dibuat oleh suatu negara sebagai pedoman tindakan dalam forum internasional, yang pelaksanaannya bertujuan demi mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan nasional itu sendiri timbul untuk menutupi kekurangan sumber daya nasional, atau apa

yang dibahasakan sebagai kekuatan nasional, yang ternyata hanya bisa diperoleh di luar batas-batas teritorial negaranya.

Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di percaturan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri mencerminkan kepentingan nasional di bidang luar negeri.Politik luar negeri adalah suatu komitmen yang merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan, baik dalam konteks dalam negeri atau luar negeri sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitar.

Jika dilihat dari unsur-unsur fundamentalnya, politik luar negeri suatu negara terdiri atas dua elemen utama, yaitu tujuan nasional yang akan dicapai dan instrumen yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya. Tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan elit negara.Sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan tersebut tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan.Dengan demikian, politik luar negeri yang dijalankan suatu negara dapat dianggap berhasil jika memiliki suatu strategi diplomasi tertentu yang efektif dapat melindungi pencapaian kepentingan nasional negara tersebut. Sementara itu, James N Rossenau membedakan konsep politik luar negeri ke dalam tiga pengertian, yaitu:

1. politik luar negeri sebagai kumpulan orientasi;
2. politik luar negeri sebagai sejumlah komitmen terhadap suatu tindakan dan rencana bagi suatu tindakan; dan
3. politik luar negeri sebagai bentuk perilaku.

Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi berarti adanya sejumlah cita-cita suatu negara yang diarahkan atau yang berhubungan dengan negara lain. Sekumpulan orientasi yang terdiri atas sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik

internasional.Selain itu, politik luar negeri merupakan rencana dan komitmen kongkret yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan, untuk membina dan mempertahankan situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan kebijakan luar negeri.Pengertian politik luar negeri yang berikutnya mengarah pada aksi atau perilaku.Pada tingkat ini politik luar negeri berada pada tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan situasi di lingkungan eksternal.

Konsep lain tentang politik luar negeri seperti dinyatakan oleh Lovel (dalam Yusuf), bahwa politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geo-politiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai (*good values*) yang terdapat dalam sistemnya. Penjelasan dari konsep diatas dapat merujuk pada teori sistem politik yang dikemukakan oleh Almond dan Powell, "sebuah sistem secara tidak langsung merupakan ketergantungan antar bagian-bagian dan batas antara sistem dengan lingkungannya." Interdependensi ini mengandung makna bahwa perubahan dalam satu bagian sistem akan memengaruhi seluruh komponen dan keseluruhan sistem, dan juga akan berpengaruh pada sistem domestik dan kapabilitas internasional. Dilihat dari perspektif sistem, politik luar negeri juga tidak dapat dipisahkan dari politik dalam negeri karena keduanya merupakan subsistem dari sistem politik suatu negara.

Dalam pembahasan politik luar negeri, ada tiga determinan yang tak terpisahkan sebagai berikut.

1. Determinan pertama adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional, sekaligus merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Holsti berpandangan bahwa kepentingan nasional atau yang disebut sebagai kepentingan dan nilai inti digambarkannya sebagai jenis kepentingan yang untuk mencapainya banyak orang bersedia melakukan pengorbanan yang

sebesar-besarnya. Nilai dan kepentingan ini menurutnya lagi, biasanya dikemukakan dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri dan menjadi keyakinan yang diterima masyarakat tanpa *reserve* atau sikap kritis.

Para ahli hubungan internasional telah bersepakat bahwa politik luar negeri merupakan pencerminan kepentingan nasional suatu negara terhadap lingkungannya segala kegiatan dan langkah-langkah yang diambil dalam ranah kebijaksanaan luar negerinya tidak lepas dari kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu, kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan politik luar negerinya. Perumusan dan penentuan kepentingan nasional suatu negara harus berpatokan pada apa yang menjadi kebutuhan dalam negeri dengan berupaya memenuhi kebutuhan tersebut baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Donal E. Nuchterlin menyebutkan sedikitnya ada empat jenis kepentingan nasional, yaitu:

a) kepentingan pertahanan, diantaranya menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negara serta wilayahnya dan sistem politiknya dari ancaman negara lain; kepentingan ekonomi, yakni kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain;
b) kepentingan tata internasional, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya; dan
c) kepentingan ideologi, ialah kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain.

2. Determinan yang kedua adalah kekuatan nasional. Kekuatan nasional sering diartikan sebagai *power*,yang pendefinisiannya sering mengarah pada kekuasaan. Selain itu, kekuatan nasional juga dimaknai sebagai *capability*. Istilah ini sering digunakan oleh para

sarjanawan hubungan internasional. Dalam buku ini digunakan definisi kekuatan nasional dalam pengertian *national capability*, yaitu kemampuan yang dimiliki suatu negara yang nyata terlihat *(tangible)* dan yang tidak nyata terlihat *(intangible)* yang kedudukannya selaras dengan kepentingan serta tujuan nasional.Dijelaskan oleh Muhammad Musa bahwa, kekuatan nasional atau kekuatan negara merupakan jaminan bagi keberhasilan politik luar negerinya. Sedangkan kekuatan dalam pengertiannya yang menonjol adalah kemampuan untuk memengaruhi keputusan pihak lain. Kekuatan negara dalam hubungan internasional dan dalam pentas dunia berarti kepeduliannya terhadap pihak lain ketika mereka mengambil keputusan dalam beberapa masalah.

Secara konvensional, kekuatan nasional terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu instrumen ekonomi, politik (diplomasi), dan militer. Tiga komponen ini bermanfaat bagi tujuan analisis, sedangkan pada praktiknya ketiga bentuk kekuatan ini saling berhubungan. Instrumen kekuatan politik atau diplomatik meliputi segala aktivitas yang terukur dan terampil dari para diplomat suatu negara yang berusaha meyakinkan pihak lain akan garis kebijaksanaan negaranya. Keterbatasan kekuatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional secara internal mengharuskan negara tersebut mencari pemenuhan kepentingannya diluar batas-batas negaranya.Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri dapat dianggap sebagai penyeimbang kepentingan nasional dengan kekuatan nasional.\

Hans J. Morgenthau membagi kekuatan nasional atas unsur-unsur yang stabil (tidak mudah berubah), yaitu 1) geografi (letak, luas dan kondisi wilayah) dan 2) sumber daya alam. Sedangkan yang labil (mudah berubah), adalah : (1) karakter nasional, (2) moral nasional (3) kualitas diplomasi, (4) kualitas pemerintah, (5) kemampuan industri, (6) kesiagaan militer, (7) jumlah dan kualitas penduduk

Hal ini menunjukkan bahwa negara dalam menghimpun kekuatannya tidak saja bergantung pada alat pemaksa kekuasaan

berupa peralatan militer, melainkan juga segenap potensi kemampuan pendukung dari negaranya. Unsur-unsur ini yang menjadikan negara tersebut kuat dan mampu mengubah konflik kepentingan menjadi sesuatu yang menguntungkan baginya.

3. Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor domestik saja namun juga dipengaruhi oleh faktor internasional. Dengan kondisi internasional yang senantiasa dinamis mengharuskan suatu negara membuat penyesuaian-penyesuaian untuk mengejar kepentingan nasional di luar batas teritorialnya. Dalam hal ini keberhasilan suatu politik luar negeri akan sangat bergantung pada bagaimana suatu negara melihat dan membaca kondisi internasional, kemudian menyesuaikannya dengan kebijakan politik luar negerinya.

   Tatanan internasional terus berubah seiring dengan terjadinya pergeseran geopolitik dan geoekonomi termasuk perubahan lingkungan geostrategis pascakrisis global.Pada gilirannya, berbagai perubahan internasional yang terjadi mendorong terjadinya perubahan dalam pola-pola hubungan antarbangsa dan negara.Perubahan global juga mengharuskan adanya revitalisasi mekanisme kerjasama global agar mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang semakin besar dan berat.Dari pola ini, dapat dilihat bahwa kondisi internasional yang begitu dinamis, selain memberikan tantangan-tantangan juga memberikan peluang-peluang.Dalam hal ini tugas setiap negara untuk meningkatkan kapasitasnya masing-masing, serta merumuskan politik luar negeri yang mampu mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang bermuara pada pencapaiaan kepentingan nasional masing-masing.Oleh karena itu, kebijakan politik luar negeri sangat ditentukan oleh kondisi objektif politik dalam negeri. Segala yang dirumuskan dari pertimbangan politik dalam negeri, akan menjadi acuan perumusan politik luar negeri yang ditujukan pada kancah internasional.

Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri RI dapat diintepretasi oleh masing-masing rezim pemerintah sesuai konteks ruang dan waktu. Oleh karenanya, implementasi politik luar negeri RI dapat ditinjau berdasarkan rezim pemerintahan.

1. Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde lama

Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pascakemerdekaan hingga tahun 1950an lebih ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.Indonesia dituntut untuk cerdas dalam menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak sia-sia.

Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai kepentingannya. Betapa pada masa itu, kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan.Sejak pertengahan 1950-an, Indonesia telah memrakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti, Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955.Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu terwujudnya perdamaian dunia.Salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum Gerakan Non-Blok (GNB) atau (Non-Aligned Movement/ NAM).

Forum ini merupakan refleksi atas terbaginya dunia menjadi dua kekuatan besar, yakni Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), politik luar negeri Indonesia bersifat *high profile*, flamboyan dan heroik, yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme serta bersifat konfrontatif. Politik luar negeri Indonesia pada era ini, diabadikan pada tujuan nasional Indonesia.Pada saat itu kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa.Kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam suatu kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk mencari dukungan dan pengakuan terhadap kedaulatan Indonesia, dan untuk menunjukan karakter yang dimiliki pada bangsa-bangsa lain di dunia internasional.

Politik luar negeri Indonesia pada masa ini juga bersifat revolusioner.Presiden Soekarno dalam era ini berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional melalui slogan revolusi nasionalnya, yakni Nasakom (nasionalis, agama dan komunis) yang elemen-elemen tersebut diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme).Dari sini dapat dilihat adanya pergeseran arah politik luar negeri Indonesia, yakni condong ke Blok komunis, baik secara domestik maupun internasional.Hal ini dilihat dengan adanya kolaborasi politik antara Indonesia dengan China dan bagaimana Presiden Soekarno mengizinkan berkembangnya Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia. Alasan Soekarno mengizinkan perluasan PKI itu adalah agar komunis mampu berasimilasi dengan revolusi Indonesia dan tidak merasa dianggap sebagai kelompok luar.

Ketidaksukaan Presiden Soekarno terhadap imperialisme juga dapat dilihat dari responnya terhadap keberadaan Belanda di Irian Barat.Tindakan militer diambil untuk mengambil alih kembali Irian Barat ketika diplomasi dianggap gagal.Dukungan Amerika Serikat yang kemudian didapatkan Soekarno muncul sebagai akibat

konfrontasi kedekatan Jakarta dengan Moskow.Taktik konfrontatif ini kemudian digunakan kembali oleh Soekarno ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akibat pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap Indonesia pro terhadap imperialisme Barat.Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.Hal ini menyulut kemarahan Indonesia.Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat.Mundurnya Indonesia dari PBB berujung pada terhambatnya pembangunan dan modernisasi Indonesia karena menjauhnya Indonesia dari pergaulan Internasional.

Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru berkaitan dengan sikap konfrontasi penuhnya terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu "Oldefos" (*Old Established Forces*) dan "Nefos" (*NewEmerging Forces*). Soekarno menyatakan bahwa ketegangan-ketegangan di dunia pada dasarnya akibat dari pertentangan antara kekuatan-kekuatan orde lama (Oldefos) dan kekuatan-kekuatan yang baru bangkit atau negara-negara progresif (Nefos).

Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme merupakan paham-paham yang dibawa dan dijalankan oleh negara-negara kapitalis Barat.Dalam upayanya mengembangkan Nefos, Presiden Soekarno melaksanakan Politik Mercusuar bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang mampu menerangi jalan bagi Nefos di seluruh dunia.Salah satu tindakan usaha penguatan eksistensi Indonesia dan Nefos juga dapat dilihat dari pembentukan poros Jakarta–Peking yang membuat Indonesia semakin dekat dengan negara-negara sosialis dan komunis seperti China.

Faktor dibentuknya poros ini antara lain, pertama, karena konfrontasi dengan Malaysia menyebabkan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik, mengingat Malaysia mendapat dukungan penuh dari Inggris, Indonesia pun harus mencari kawan negara besar yang mau mendukungnya dan bukan sekutu Inggris, salah satunya adalah China. Kedua, Indonesia perlu untuk mencari negara yang mau

membantunya dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni negara China dan Uni Soviet. Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin juga ditandai dengan usaha keras Presiden Soekarno membuat Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diadakan maupun diikuti Indonesia.Tujuan awal dikenalnya Indonesia adalah mencari dukungan atas usaha dan perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat.Namun, seiring berjalannya waktu, status dan prestis menjadi faktor-faktor pendorong semakin gencarnya Soekarno melaksanakan aktivitas politik luar negeri ini.Efek samping dari kerasnya usaha ke luar ini adalah ditinggalkannya masalah-masalah domestik, seperti masalah ekonomi.

Presiden Soekarno beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi pada fase awal berdirinya suatu negara adalah hal yang tidak terlalu penting.Beliau beranggapan bahwa pemusnahan pengaruh-pengaruh asing baik itu dalam segi politik, ekonomi maupun budaya adalah hal-hal yang harus diutamakan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi domestik. Soekarno dengan gencar melancarkan politik luar negeri aktif, namun tidak diimbangi dengan perbaikan kondisi perekonomian dalam negeri yang secara terus-menerus mengalami kemerosotan, sedangkan pengeluaran untuk proyek-proyek Politik Mercusuar seperti GANEFO (*Games of The New Emerging Forces*) dan CONEFO (*Conference of The New Emerging Forces*) terus membengkak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab krisis politik dan ekonomi Indonesia pada masa akhir pemerintahan Demokrasi Terpimpin.

2. Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Orde Baru

Pada masa awal Orde Baru terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi.Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik, tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang

mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri (polugri), yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan "*good neighbourhood policy*" melalui *Association South East Asian Nation* (ASEAN). Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia saat itu adalah pembangunan ekonomi, untuk mencapai struktur ekonomi yang seimbang dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat, pada dasawarsa abad yang akan datang. Tujuan utama politik luar negeri Soeharto pada awal penerapan *New Order* (tatanan baru) adalah untuk memobilisasi sumber dana internasional demi membantu rehabilitasi ekonomi negara dan pembangunan, serta untuk menjamin lingkungan regional yang aman yang memudahkan Indonesia untuk berkonsentrasi pada agenda domestiknya.

Berikut pernyataan Presiden Soeharto mengenai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

> *" Bagi Indonesia, politik luar negerinya yang berprinsip non-Blok tidak identik dengan tidak adanya keterlibatan. Itulah alasannya mengapa Indonesia lebih suka mengatakannya sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif karena politik luar negeri kita tidak hampa, mati, atau tidak berjalan. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas di mana Indonesia bebas dari ikatan apapun juga, baik itu dalam secara militer, politik ataupun secara ideologis bahwa Indonesia benar-benar terbebas dari berbagai masalah atau peristiwa dengan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun, baik secara militer, politis, ataupun secara ideologis." (Kumpulan Pidato Presiden Soeharto, http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/speech)*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam bidang politik luar negeri, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih menaruh perhatian khusus terhadap soal regionalisme. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin

keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak Barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing, serta bantuan pinjaman.Presiden Soeharto juga selalu menempatkan posisi Indonesia sebagai pemeran utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya tersebut, seperti halnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya mengakhiri konfrontasi terhadap Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari Barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing.Tindakan ini juga dilakukan untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia meninggalkan kebijakan luar negerinya yang agresif. Konfrontasi berakhir setelah Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri menandatangani Perjanjian Bangkok pada 11 Agustus 1966 yang isinya mengakui Malaysia sebagai suatu negara.

Selanjutnya, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.Dalam pembentukan ASEAN Indonesiamemainkan peranan utama dalam pembentukan organisasi ASEAN.ASEAN merupakan wadah bagi politik luar negeri Indonesia. Kerja sama ASEAN dipandang sebagai bagian terpenting dari kebijakan luar negeri Indonesia. Ada kesamaan kepentingan nasional antara negara-negara anggota ASEAN, yaitu pembangunan ekonomi dan sikap non komunis.

Dengan demikian, stabilitas negara-negara anggota ASEAN bagi kepentingan nasional Indonesia sendiri sangatlah penting.ASEAN dijadikan barometer utama pelaksanaan kerangka politik luar negeri Indonesia.Berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia coba difasilitasi dan dicarikan solusinya dalam forum regional ini. Pemerintahan Soeharto coba membangun Indonesia sebagai salah satu negara Industri baru di kawasan Asia Tenggara, sehingga pernah disejajarkan dengan Korea Selatan, Taiwan, dan Thailand sebagai macan-macan Asia baru. Di samping itu, politik luar negeri Indonesia dalam forum

ASEAN, juga untuk membentuk citra positif Indonesia sebagai salah satu negara yang paling demokratis dan sangat layak bagi investasi industri.

Presiden Soeharto memakai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia.Pada awalnya Indonesia tidak setuju dengan APEC.Kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan Indonesia menghadapi liberalisasi perdagangan.Kekhawatiran lainnya adalah kehadiran APEC dapat mengikis kerjasama antara negara-negara ASEAN.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, Indonesia mengubah pandangannya terhadap APEC. Faktor pendorongnya antara lain adalah karena Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC selanjutnya. Keberhasilan Indonesia menjadi ketua pertemuan APEC dan juga keberhasilan menjadi Ketua Gerakan Non-Blok X pada 1992, setidaknya memberikan pengakuan bahwa Indonesia adalah salah satu pemimpin internasional.

Selain ASEAN, keterlibatan Indonesia dalam membentuk kondisi perekonomian global yang stabil dan kondusif, serta memaksimalkan kepentingan nasional, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. OPEC menjadi barometer pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal stabilitas perekonomian dunia.Kepemimpinan Soeharto secara umum memunyai karakteristik yang berbeda dengan pendahulunya. Diparuh pertama kepemimpinannya, dia cenderung adaptif dan *low profile* dan di paruh terakhir kepemimpinannya, sejak 1983, Soeharto mengubah gaya kepemimpinannya menjadi *high profile*.

Gayanya tersebut memengaruhi pilihan-pilihan politik luar negerinya, yang pada kenyataannya tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik-ekonomi dan keamanan dalamnegeri Indonesia, dengan nilai ingin menyejahterakan bangsa, Soeharto mengambil gaya represif (di dalam negeri) dan akomodatif (di luar negeri).

3. Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi.

Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi akibat transisi pemerintahan.Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional.Pada masa awal reformasi yang dimulai oleh pemerintahan Presiden B.J.Habibie, pemerintah Habibie disibukkan dengan usaha memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional yang sempat terpuruk sebagai dampak krisis ekonomi di akhir era Orde Baru dan kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari *Dana Moneter Internasional/International Monetary Funds(IMF)* dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara Barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timor- Timur dari NKRI.Presiden Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional.Untuk itu beliau banyak melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri.Di setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif, selama masa pemerintahan yang singkat Presiden Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam setiap pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya.Termasuk dalam hal ini, isu Timor-Timur, soal integritas tertorial Indonesia seperti kasus Aceh, Papua dan isu perbaikan ekonomi.

Diplomasi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dalam konteks kepentingan nasional selain mencari dukungan pemulihan ekonomi, rangkaian kunjungan ke mancanegara diarahkan pula pada upaya-upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik, mempertahankan integritas teritorial Indonesia, dan hal yang tak kalah penting adalah demokratisasi melalui proses peran militer agar kembali ke peran profesional. Ancaman integrasi nasional di era Presiden

Wahid menjadi kepentingan nasional yang sangat mendesak dan diprioritaskan.Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001.Pada awal pemerintahannya, suasana politik dan keamanan menjadi sejuk dan kondusif.Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perbaikan, seperti nilai tukar rupiah yang agak stabil, tetapi Indonesia pada masa pemerintahannya tetap saja tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lainnya.

Belajar dari pemerintahan presiden yang sebelumnya, Presiden Megawati lebih memerhatikan dan memertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan dalam UUD 1945.Presiden Megawati juga lebih memprioritaskan diri untuk mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat.

Pada era pemerintahan Megawati, disintegrasi nasional masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial.Selain itu, pada masa pemerintahan Megawati juga terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air.Sehingga dapat dipahami, jika isu terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Megawati.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik menjadi Presiden ke-6 Republik Indonesia pada 20 Oktober 2004.Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung. Beliau berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang.Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai peluang.Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani dua karang’.Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah.Indonesia tidak pandang bulu bergaul dengan negara manapun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia.

Ciri politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan SBY, sebagai berikut.

1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dan lain-lain).
2. Terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia terhadap perubahan- perubahan domestik dan perubahan-perubahan yang terjadi di luar negeri (internasional).
3. Bersifat pragmatis kreatif dan oportunis, artinya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja (baik negara, organisasi internasional, ataupun perusahaan multinasional) yang bersedia membantu Indonesia dan menguntungkan pihak Indonesia.
4. Konsep *trust*, yaitu membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. prinsip-prinsip dalam konsep *trust* adalah *unity, harmony, security, leadership, prosperity*. prinsip-prinsip dalam konsep trust inilah yang menjadi sasaran politik luar negeri Indonesia di tahun 2008 dan selanjutnya.

C. Rangkuman

Proses lahirnya kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan dinamikanya sejak kemerdekaan hingga masa reformasi, serta peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia baik di tingkat regional dan global. Peran tersebut sesuai dengan komitmen bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea ke empat UUD 1945, yang menekankan pentingnya peran Indonesia dalam ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi.

D. Latihan dan Tugas

1. Mengapa politik luar negeri yang bebas dan aktif menjadi pilihan negara Republik Indonesia dalam kancah perpolitikan dunia?
2. Mengapa implementasi politik luar negeri RI (PLN RI) dapat berbeda-beda pada setiap rezim pemerintahan?.
3. Uraikan aspek determinan dalam implementasi PLN RI sesuai dengan masing-masing rezim pemerintahan!
4. Jika saudara adalah presiden RI sekarang, uraikan hal apa yang akan anda lakukan dalam menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif..

Lakukan secara berkelompok maksimal lima mahasiswa. Kajilah peristiwa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan kebijakan politik luar negerinya. Analisislah secara mendalam kebijakan tersebut dan pengaruhnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

GLOSARIUM

Ad hoc atau	: Bersifat tetap
Ad interi	: Bersifat sementara
City states	: Negara kota
Code of conduct	: Kesepahaman
Comparative advantage	: Keuntungan komparatif
DK	: Dewan Keamanan
DES	: Dewan Ekonomi Sosial
Free Trade	: Perdagangan Bebas
GATT	: *General Agreement on Tariffs and Trade*
Globalisasi	: Proses peningkatan interaksi atau hubungan antar masyarakat ke dalam satu bagian besar dunia global yang menimbulkan efek terhadap orang-orang yang jauh sekalipun
Konflik etnis	: Proses sosial dimana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lain yang di sertai dengan ancaman atau kekerasan.
Merkantilisme	: Sistem ekonomi untuk menyatukan dan meningkatkan kekayaan keuangan suatu bangsa dng pengaturan seluruh ekonomi nasional oleh pemerintah dengan kebijaksanaan yang bertujuan mengumpulkan cadangan emas, memperoleh neraca perdagangan yang baik, mengembangkan pertanian dan industri, dan memegang monopoli atas perdagangan luar negeri.
InGO	: *International Government Organization*
International customs	: Kebiasaan Internasional

International treties	: Perjanjian Internasional
Inward-looking	: Cara pandang terhadap internal/diri sendiri
Interlinkages	: Saling keterkaitan
Imperialisme	: Paham yang mendorong perluasan wilayah
modern states	: Negara modern
NGO	: *National Government Organization*
Persona non grata	: Seseorang yang dianggap tidak dapat dipercaya/tidak diterima
Post industrial order	: Tatanan masyarakat pasca industri
Revolusi elektronik mikro	: Revolus ilmu pengetahuan yang menciptakan teknologi
Self Interest	: Kepentingan pribadi
Solidaritas	: Ikatan kebersamaan
Sustainability	: Kesinambungan
Trial and error	: Mencoba dan belajar dari percobaan yang gagal.
WTO	: *World Trade Organization*
MI	: Mahkamah Internasional
MU	: Majelis Umum

DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani, 2006, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosda

Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Bakri, Umar Suryadi. 1999, *Pengantar Hubungan Internasional*, Jakarta: Jaya Baya University Pres

Barnett, Michael & Kathryn Sikkink. 2008. From International Relations to Global Society. dalam Reus-Smit, Christian & Snidal, Duncan (eds.). The Oxford Handbook of International Relations. Oxford: Oxford University Press.

Brown, Chris dan Ainley Kristen. 2003. *Understanding International Relations*. Palgrave Macmillian: New York.

Burchill, Scott & Linklater, Andrew. 2009. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. Terj. M.Sobirin. Nusamedia: Bandung.

Campbell, Patricia J, et al. 2010. *An Introduction to Global Studies*, Wiley Blackwell:Oxford.

Choplin, William. D, dan Masri Singarimbun (terjemahan)., *Pengantar Politik Internasional : Suatu Teoritis*, Sinar Baru, Bandung, 2003.

Elias, Juanita dan Peter Sutch. 2007. *International Relations*.The Basic, Routladge:London.

Farrel, Mary and Bjorn Hette. 2005. Global Politics of Regionalism. Pluto Press.

Fawcett, Louise, and Andrew Hurrel. 2002. Regionalism in World Politics.Oxford University Press.

Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri*. Nuansa: Bandung.

Halliday, J. 1997. Nationalism. dalam Baylis, John & Smith, Steve (eds.). The Globalization of World Politics, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Hay, Colin. 2013. International Relations Theory and Globalization. Oxford: Oxford University Press.

Held, David. 2000. A Globalizing word? Culture, Economic, and Politics. London: Routledge. Scholte, Jan Aart. 2001. The Globalization of World Politics. dalam Baylis, John & Smith, Steve (eds.). The Globalization of World Politics. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.

Jackson, Robert dan George Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Jones, Walter S. 1992. *Logika Hubungan Internasional : Persepsi Nasional*, PT. Gramedia : Jakarta.

Joshua S. Goldstein. 2002. *International Relations Brief Edition*, Amerika Serikat : Longman.

Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, LP3ES: Jakarta.

Mestoko, Sumarsono. 1988. *Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa*.Sinar Harapan : Jakarta.

Muhammad Musa, 2003, *Hegemoni Barat terhadap Percaturan Politik Dunia : Sebuah Potret Hubungan Intenasional*, Jakarta: Wahyu Press

Rossennau, James N, ed. 1969. *International Politics and Foreign Policy*, Free Press: New York.

Russet, Bruce dan Harvey Starr. 1985. *World Politics:Menu for Choice*, Freeman.

Short, John Rennie. 1993. *An Introduction to Political Geography*, Routledge, Chapman, and Hall Inc.: New York.

Sitepu, Anthonius. 2011. *Studi Hubungan Internasional*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Smith, Steve & John Baylis. 2001. Introduction. dalam Baylis, John & Smith, Steve (eds.). *The Globalization of World Politics. 2nd edition.* Oxford: Oxford University Press.

Soeprapto R. 1997. *Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi, dan Perilaku.* PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Spanier, John. 1985. *Games Nations Play : Analyzing International Politics*, Holt Rinehalt and Winston:New York.

Steans, Jill & Pettiford, Lloyd. 2009. *Hubungan Internasional : Perspektif dan Tema*. Terj. Deasy Silvya Sari. Pustaka Pelajar:Yogyakarta.

Sufri Yusuf, 1989, *Hubungan Iternasional dan Politik Luar Negeri, Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar

Tulus Warsito, 1998, *Teori-Teori Politik Luar Negeri : Relevansi dan Keterbatasannya,* Yogyakarta: Bigraf Publishing

Wuryandari, Ganewati (ed.) 2011. *Politik Luar Negeri Indonesia di Timur Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Pustaka Pelajar:Jakarta.

Winarno, Budi. 2011. *Isu – Isu Global Kontemporer*. *Center For Academic Publishing Service:* Yogyakarta.

Viotti, Paul R. dan Mark V. Kaupi, *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism*, Macmillan Publishing Company, New York, 1993.

Yulius P. Hermawan. 2007. *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu dan Metodologi*. Yogyakarta, Graha Ilmu.